

LAPORAN KINERJA 2025

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN MAKASSAR**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar selama Tahun 2025. Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala dan dinamika pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja BBKK Makassar pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Maros, 22 Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar,



dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua tanggal 27 Desember 2024. Dalam perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun pada tanggal 19 Desember 2025 diadakan revisi terhadap PK 2025, sehingga IKK menjadi 8 (delapan) indikator.

Adapun 8 (delapan) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.
Target bernilai 1, realisasi bernilai 1, sehingga capaian kinerja menjadi 100%.
Pagu Anggaran Efektif sebesar Rp. 1.145.171.000,- realisasi Rp. 1.142.040.759,-, sehingga capaian anggaran sebesar 99,73%.
Pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 1.720.699.000,- realisasi Rp. 1.142.040.759,- sehingga capaian anggaran sebesar 66,37%
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
Target 100%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 100%.
Pagu Anggaran efektif sebesar Rp. 277.981.000,- realisasi Rp. 276.105.180,, sehingga capaian anggaran sebesar 99,33%.
Pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 890.038.000,- realisasi Rp. 276.105.180,-, sehingga capaian anggaran sebesar 31,02%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Target bernilai 0,96, realisasi 1, sehingga capaian menjadi 104, 17%
Pagu Anggaran efektif Rp. 222.227.000,- realisasi Rp. 222.960.323,-, sehingga capaian anggaran sebesar 100,33%.
Pagu Anggaran keseluruhan Rp. 1.403.362.000,- realisasi Rp. 222.960.323,-, sehingga capaian anggaran sebesar 15,89%.
4. Nilai kinerja anggaran
Target 85, realisasi 99,54, serta capaian sebesar 117,11%
Pagu Anggaran efektif Rp. 80.729.000,- realisasi Rp. 79.742.170,- sehingga capaian anggaran sebesar 98,78%.

Pagu Anggaran keseluruhan Rp. 350.493.000,- realisasi Rp. 79.742.170,- sehingga capaian anggaran sebesar 22,75%.

5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Target 90, realisasi 99,16, dengan capaian sebesar 110,18%

Pagu Anggaran efektif Rp. 26.771.546.000,- realisasi Rp. 26.740.212.734,- sehingga capaian anggaran sebesar 99,88%.

Pagu Anggaran keseluruhan Rp. 29.706.525.000,- realisasi Rp. 26.740.212.734,- sehingga capaian anggaran sebesar 90,01%.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Target nilai 81, realisasi 88,99, serta capaian sebesar 109,86%

Pagu Anggaran efektif Rp. 5.994.000,- realisasi Rp. 5.983.305,- sebesar 99,82%.

Pagu Anggaran keseluruhan Rp. 30.562.000,- realisasi Rp. 5.983.305,- sebesar 19,58%.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Target 90%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 111,11%.

Pagu Anggaran efektif Rp. 43.357.000,- realisasi Rp. 42.838.289,-, sehingga capaian anggaran sebesar 98,80%.

Pagu Anggaran keseluruhan Rp. 276.259.000,- realisasi Rp. 42.838.289,-, sehingga capaian anggaran sebesar 15,51%.

8. Persentase realisasi anggaran

Target 96%, realisasi 99,87%, serta capaian 104,03% dengan Pagu Anggaran efektif Rp. 28.547.005.000,- realisasi Rp. 28.509.882.760,-.

Target 96%, realisasi 82,91%, serta capaian 86,36% dengan Pagu Anggaran keseluruhan Rp. 34.385.588.000,- realisasi Rp. 28.509.882.760,-.

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 4 yaitu Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan besaran capaian 117,11%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan BBKK Makassar tahun 2025 bersumber dari pagu efektif sebesar Rp. 28.547.005.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.509.892.760,- (99,87%) dengan capaian sebesar 104,03%. Untuk pagu keseluruhan sebesar Rp. 34.385.588.000,- dengan realisasi 28.509.882.760,- (82,91%) dengan capaian sebesar 86,36%.

Dalam laporan kinerja ini Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Surabaya, Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Medan, dan Balai Besar

Kekarantinaaan Kesehatan Batam, dijadikan sebagai pembandingan capaian kinerja untuk ke 8 indikator kinerja, hal ini karena BBKK tersebut dengan BBKK Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu Balai Besar;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Visi dan Misi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	17
A. Perencanaan Kinerja.....	17
1. Rencana Aksi Kegiatan	17
2. Rencana Kinerja Tahunan	19
B. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	122
BAB IV Penutup	129
A. Kesimpulan	129
B. Rencana Tindak Lanjut	131
Pustaka Acuan	133
Penyusun	134
Lampiran	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi BBKK Makassar Tahun 2025	7
Gambar III.1	Screenshoot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025	67
Gambar III.2	Screenshoot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025	67
Gambar III.3	Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025 ..	67
Gambar III.4	Dashboard Aplikasi OM-SPAN Hasil Perhitungan Capaian Kinerja IKPA BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025	74
Gambar III.5	Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025	118

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2025	10
Tabel I.2	Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2025	10
Tabel I.3	Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025	11
Tabel I.4	Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2025	11
Tabel I.5	Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025	11
Tabel I. 6	Jabatan Pelaksana (CPNS) BBKK Makassar Tahun 2025.....	12
Tabel II.1	Matriks RAK BBKK Makassar Tahun 2020-2024	17
Tabel II.2	Indikator Kinerja RKT BBKK Makassar Tahun 2025	19
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Revisi Desember Tahun 2025	21
Tabel II.5	Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025	21
Tabel II.6	Anggaran Kegiatan BBKK Makassar Tahun 2025 (Optimalisasi PNBK)	22
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja BBKK Makassar dibandingkan Dengan Target Nasional Tahun 2025	23
Tabel III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan yang diperiksa Sesuai Standar BBKK Makassar Tahun 2025	25
Tabel III.3	Perhitungan Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2025	27
Tabel III.4	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang BBKK Makassar Tahun 2025	35
Tabel III.5	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut BBKK Makassar Tahun 2025	36
Tabel III.6	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang BBKK Makassar Tahun 2025	36
Tabel III.7	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam	

	Pemeriksaan Lingkungan BBKK Makassar Tahun 2025	36
Tabel III.8	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan BBKK Makassar Tahun 2025	37
Tabel III.9	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2025	45
Tabel III.10	Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2025	46
Tabel III.11	Capaian Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Tahun 2025 Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 jam Dengan Kelengkapan 80%	47
Tabel III.12	Nilai Indeks Pinjal di Wilker BBKK Makassar Tahun 2025	48
Tabel III.13	Hasil Suevey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah BBKK Makassar Tahun 2025.....	49
Tabel III.14	Kepadatan Kecoa Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	50
Tabel III.15	Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	51
Tabel III.16	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	53
Tabel III.17	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Buffer < 1 di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	54
Tabel III.18	Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	55
Tabel III.19	Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	56
Tabel III.20	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025	57
Tabel III.21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	73
Tabel III.22	Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2025	76
Tabel III.23	Parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar Tahun 2025	79
Tabel III.24	Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar	

	Tahun 2025	80
Tabel III.25	Parameter Belanja Kontraktual BBKK Makassar Tahun 2025..	86
Tabel III.26	Pengukuran Kinerja Indikator Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2025	98
Tabel III.27	Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan Kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 JPL Tahun 2025 ..	106
Tabel III.28	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana BBKK Makassar Tahun 2025	122
Tabel III.29	Realisasi Anggaran Pagu Keseluruhan Berdasarkan Jenis Belanja Berdasarkan Jenis Belanja BBKK Makassar Tahun 2025	123
Tabel III.30	Realisasi Anggaran Pagu Efektif Berdasarkan Jenis Belanja Berdasarkan Jenis Belanja BBKK Makassar Tahun 2025	123
Tabel III.31	Realisasi Anggaran Pagu Keseluruhan berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan BBKK Makassar Tahun 2025	123
Tabel III.32	Realisasi Anggaran Pagu Efektif berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan BBKK Makassar Tahun 2025	125
Tabel III.33	Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025	127

DAFTAR GRAFIK

Grafik	I.1	Distrtribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK Makassar Tahun 2025	12
Grafik	I.2	Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2025	13
Grafik	I.3	Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2025	14
Grafik	III.1	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke-1 BBKK Makassar Tahun 2025	28
Grafik	III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke1 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025 ...	28
Grafik	III.3	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Tahun 2025 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam	29
Grafik	III.4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Tahun 2025	37
Grafik	III.5	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025	39
Grafik	III.6	Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar tahun 2025	39
Grafik	III.7	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar, BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	40
Grafik	III.8	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2025	58
Grafik	III.9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2024, dan Tahun 2025	58
Grafik	III.10	Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	59
Grafik	III.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Tahun 2025	68
Grafik	III.12	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar	

	Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025	68
Grafik	III.13 Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Tahun 2025	69
Grafik	III.14 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	69
Grafik	III.15 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Tahun 2025	90
Grafik	III.16 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025	91
Grafik	III.17 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	92
Grafik	III.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-6 BBKK Makassar Tahun 2025	99
Grafik	III.19 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025	99
Grafik	III.20 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	101
Grafik	III.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Tahun 2025	113
Grafik	III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025	113
Grafik	III.23 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	114
Grafik	III.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-8 BBKK Makassar Tahun 2025	118
Grafik	III.25 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Pagu Anggaran BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025 ..	119
Grafik	III.26 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025	120

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah dan menangkal masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Balai Besar Keekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Keekarantinaan Kesehatan memiliki peran strategis dalam pengendalian risiko kesehatan di pintu masuk negara, meliputi pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara di wilayah kerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan, BBKK Makassar melaksanakan tugas pencegahan dan penangkalan terhadap keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Seiring dengan penataan kelembagaan Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terjadi perubahan garis koordinasi dan pertanggungjawaban BBKK Makassar, yang semula berada di bawah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, serta untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, BBKK Makassar menyusun Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan instrumen evaluasi atas pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sarana untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja

sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai capaian kinerja BBKK Makassar, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kekarantinaan kesehatan pada periode selanjutnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat 2 (dua) kegiatan untuk BBKK Makassar yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada 8 indikator sesuai dengan PK 2025 revisi, yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8. Persentase realisasi anggaran.

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (LKj) BBKK Makassar Semester I tahun 2025.

Beberapa isu strategis Balai Besar Keekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun target kinerja dan kulaitas layanan public harus tetap ditingkatkan

2. Kewajiban vaksin polio dan covid bagi pelaku perjalanan yang memegang visa haji dan umroh.
3. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
4. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua kelompok Tim Kerja yang ada di induk, sehingga terdapat pendampingan petugas dari induk BBKK Makassar serta pemanfaatan tenaga kader untuk kegiatan tertentu sesuai dengna kompetensinya.
5. Keseragaman pelaksanaan SOP Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Alat Angkut pesawat belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

C. VISI DAN MISI

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden, yaitu “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Visi Dirjen Penanggulangan Penyakit ditetapkan selaras dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2 menetapkan visi yang sejalan dengan visi Ditjen P2 yakni Pintu Masuk serta bandara dan pelabuhan domestik yang bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 8 (delapan) misi Presiden tahun 2025-2029, yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna mendukung Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, sebagai berikut :

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien.

Seiring dengan misi Kemenkes, maka misi dari Ditjen Penanggulangan Penyakit, yakni :

1. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit.

3. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
4. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko
5. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/ wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi diwilayah dan pintu masuk negara
6. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program, Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program

Adapun misi dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, yakni :

1. Meningkatkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KKMMMD
2. Meningkatkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantinaan kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di pintu masuk negara, wilayah buffer dan perimeter
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi efektif dengan jejaring.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Instalasi

Struktur organisasi BBKK Makassar tahun 2025 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1

Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

Uraian tugas masing-masing adalah :

1. Sub Bagian Administrasi Umum

- a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Instalasi

- a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
- b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
- c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.

3. Wilayah Kerja BBKK Makassar

- a. Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
- b. Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja.
- c. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- d. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- e. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- f. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2025 sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang ASN, namun berdasarkan DUK Desember 2025 tersisa 139 orang ASN, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang pensiun, dengan uraian 130 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 9 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) serta tenaga outsourcing satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, dan cleaning service sebanyak 9 orang.

1. Menurut Jabatan:

a) ASN	= 142 orang
1) Jabatan Struktural	= 2 orang
2) Jabatan Fungsional Teknis (JFT)	= 100 orang
3) Jabatan Fungsional Administrasi (JFT)	= 14 orang
4) Jabatan Fungsional Umum Teknis (JFU)	= 12 orang
5) Jabatan Fungsional Umum Administrasi (JFU)	= 7 orang
6) Jabatan Pelaksana (JP) (CPNS)	= 7 orang
b) Non ASN	= 29 orang
1) Pengamanan Kantor (Satpam)	= 7 orang
2) Pengemudi (Sopir)	= 13 orang
3) Cleaning Service	= 9 orang

Tabel I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 menunjukkan pengelompokan ASN berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Kepala BBKK Makassar	1
2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
Jumlah		2

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa di BBKK Makassar terdapat 2 pejabat struktural yaitu Kepala BBKK Makassar dan Kasubag Adum.

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter Ahli Madya (JFT)	4
2	Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)	1
3	Dokter Ahli Muda (JFT)	13
4	Perawat Ahli Madya (JFT)	1
5	Perawat Ahli Muda (JFT)	4
6	Perawat Ahli Pertama (JFT)	6
7	Perawat Penyelia (JFT)	4
8	Perawat Mahir (JFT)	9
9	Perawat Terampil (JFT)	4
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	2
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
12	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JFT)	1
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	8
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	3
16	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	1
17	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	2
18	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	2
19	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	3
20	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
21	Entomolog Kesehatan Penyelia (JFT)	1
22	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	4
23	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	1
24	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	1
25	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	6
26	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	4
27	Sanitarian Mahir (JFT)	2
28	Sanitarian Terampil (JFT)	2
Jumlah		99

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	3
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JFT)	1
4	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)	1
5	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	2
7	Perencana Ahli Muda (JFT)	1
8	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
9	Arsiparis Ahli Muda (JFT)	1
10	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
11	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JFT)	1
Jumlah		15

Tabel I.4 Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Umum Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter (JFU)	2
3	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	4
4	Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU)	1
5	Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi (JFU)	1
6	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (JFU)	2
7	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	2
Jumlah		12

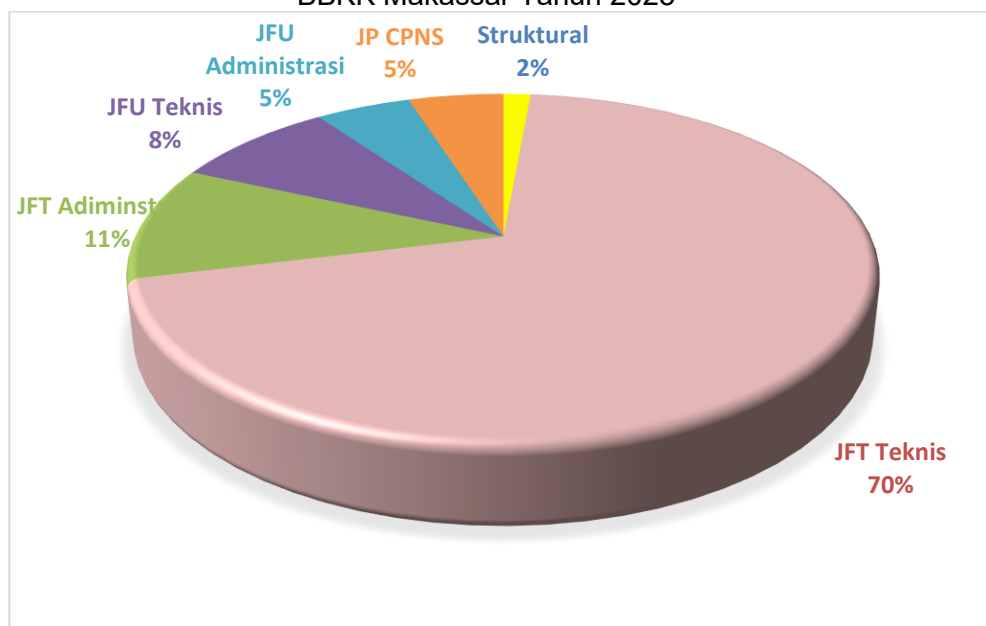
Tabel I.5 Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Fungsional Umum Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
2	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara / Analisis Barang Milik Negara (JFU)	1
3	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1
4	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	3
5	Analisis Kepegawaian Ahli / Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (JFU)	1
Jumlah		7

Tabel I.6 Jabatan Pelaksana (CPNS) BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Pelaksana (CPNS)	Jumlah (Orang)
1	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JP)	3
2	Sanitarian Terampil (JP)	3
3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JP)	1
Jumlah		7

Grafik I.1 Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK Makassar Tahun 2025



Grafik I.1 menunjukkan 70% pegawai BBKK Makassar adalah JFT Teknis, 11% JFT administrasi, 12% JFU teknis, 5% JP CPNS, 5% JFU administrasi, dan 2 % pejabat struktural.

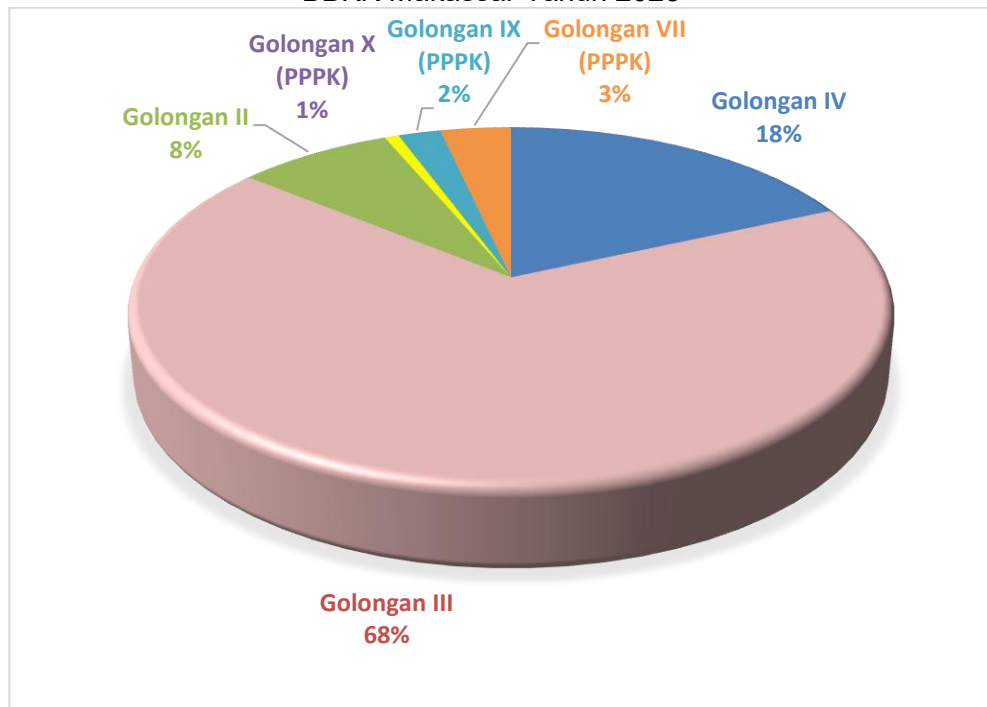
JFU teknis dan administrasi akan berproses menjadi JFT sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk JP yang masih berstatus calon PNS, akan berubah statusnya menjadi JFT teknis setelah menjadi PNS.

2. Menurut Golongan :

a) Golongan IV	=	26 orang
b) Golongan III	=	96 orang
c) Golongan II	=	11 orang
d) Golongan X (PPPK)	=	1 orang

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| e) | Golongan IX (PPPK) | = | 3 orang |
| f) | Golongan VII (PPPK) | = | 5 orang |

Grafik I.2 Distribusi ASN berdasarkan Golongan
BBKK Makassar Tahun 2025

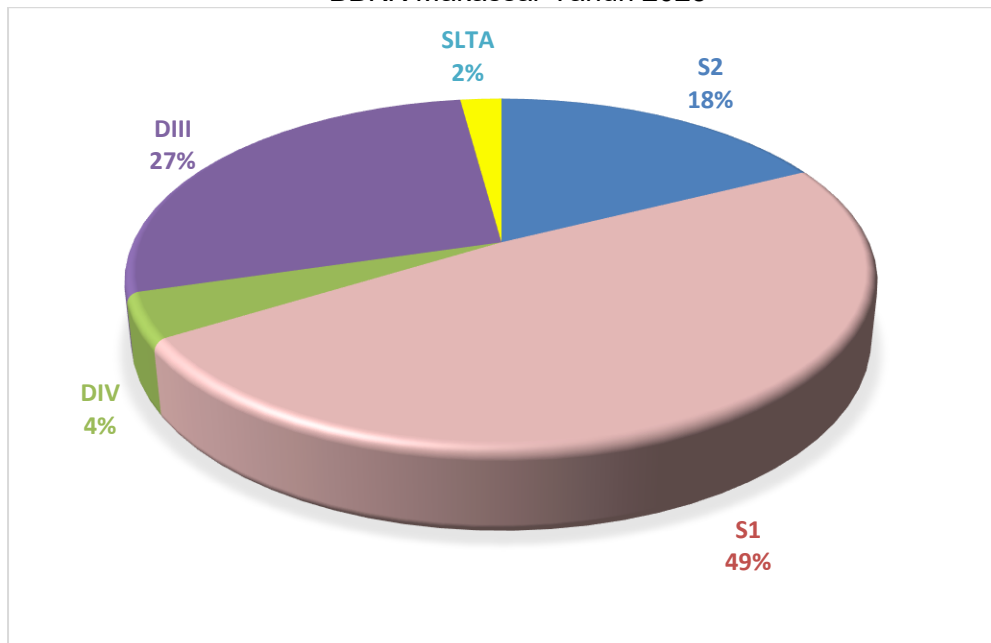


Berdasarkan grafik I.2 ASN BBKK Makassar terbesar berada pada Golongan III sebanyak 68% dan yang terkecil pada Golongan X sebesar 1%. Golongan VII, IX dan X merupakan golongan untuk ASN PPPK.

3. Menurut Pendidikan:

- | | | | |
|----|------|---|----------|
| a) | S2 | = | 25 orang |
| b) | S1 | = | 69 orang |
| c) | DIV | = | 6 orang |
| d) | DIII | = | 39 orang |
| e) | SLTA | = | 3 orang |

Grafik I.3 Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan
BBKK Makassar Tahun 2025



Berdasarkan Grafik I.3 distribusi ASN BBKK Makassar terbanyak pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 49% dan yang terkecil sebanyak 2% pada jenjang SLTA. Jenjang S1 dan DIII menempati urutan 1 dan 2 karena adanya kesempatan tugas belajar yang dibiayai oleh Kemenkes dengan mengikuti rangkaian aturan baik secara administrasi maupun akademik sesuai dengan MOU yang ditetapkan antara Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, sehingga ASN BBKK Makassar dapat mengupgrade jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya dari DIII ke Strata 1.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan 3 (tiga) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan lainnya;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan indicator dan rincian output.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Balai Besar Kekekarantinaan Kesehatan Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Penanggulangan Penyakit serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. BBKK Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2 Kemenkes RI. Olehnya itu, kegiatan yang dilaksanakan di BKK harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen Penanggulangan Penyakit.

Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BBKK Makassar dapat terlihat dalam tabel II.1

Tabel II.1 Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target BBKK Makassar
Tahun 2020 - 2025

No	Sasaran	Indikator	Target							
			2020	2021	2022	2023	2023 Des	2024	2024 Nov	2025
1	Meningkatnya Pelayanan Kekekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekekarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728						
		1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN			1	1	1	1	1	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator	Target							
			2020	2021	2022	2023	2023 Des	2024	2024 Nov	2025
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	85%	90%	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85	85	85	85
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%							
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93	90	90	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	81	81	81
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%						
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%	85%	85%	90%
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%	96%	96%	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%		95%		95%

Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020-2025 Sasaran, IKK, serta target BBKK Makassar terlihat pada indikator 8 dan 9 berbeda dengan tahun 2022. Dimana di tahun 2022 indikator berjumlah 7, namun sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 terdapat penambahan 2 indikator dalam Perjanjian Kinerja yaitu indicator Persentase Realisasi Anggaran dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti. Untuk tahun 2024 PK awal BBKK Makassar berjumlah 9 (sembilan) indicator, namun tanggal 16 November 2024 dilakukan revisi PK menjadi 8 (delapan) indicator. Karena untuk indicator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah

Tuntas Ditindaklanjuti sampai bulan November 2024 BBKK Makassar tidak menjadi sampel pemeriksaan oleh BPK.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2025, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Indikator Kinerja RKT
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,96
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%

Sumber Data : RKT KKP Kelas I Makassar 2025

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 yang ditandatangani pada Desember 2024 dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%

Namun hingga bulan Desember 2025, BBKK Makassar melakukan revisi terhadap PK 2025 karena indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti sampai bulan

Desember 2025 BBKK Makassar tidak terdapat catatan hasil pemeriksaan oleh BPK. Sehingga pada Desember 2025 indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Revisi Desember 2025 menjadi 8 (delapan) indikator, seperti terlihat dalam tabel II.4.

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja BBKK Makassar
Revisi Desember 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anaggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%

Tabel II.5 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja
BBKK Makassar Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Rp. 6.377.567.000,-
2	Dukungan manajemen pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 26.413.364.000,-
Total		Rp. 32.790.931.000,-

Anggaran Kegiatan BBKK Makassar bertambah dengan adanya optimalisa PNPB dari Rp. 32.790.931.000,- menjadi Rp. 34.385.588.000,-, dengan uraian anggaran di bawah ini :

Tabel II.6 Anggaran Kegiatan BBKK Makassar Tahun 2025
(Optimalisasi PNBK)

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Rp. 7.685.986.000,-
2	Dukungan manajemen pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 26.699.602.000,-
Total		Rp. 34.385.588.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar untuk tahun 2025 melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sehingga diperoleh data capaian.

Hasil pengukuran kinerja akan menghasilkan data berupa informasi masing-masing indikator, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Di samping itu pengukuran kinerja juga memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Penanggulangan Penyakit.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2025 tertera dalam tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BBKK Makassar
Dibandingkan dengan target Nasional 2025

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN		1	100%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target tahun 2025 sebesar 94%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Realisasi	Capaian
3	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN		1	104,17%
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dengan target tahun 2025 sebesar 92,3	99,54	117,11%
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		99,16	110,18%
6	Kinerja implementasi WBK satker		88,99	109,86%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100%	111,11%
8	Persentase Realisasi Anggaran (Pagu Efektif) Persentase Realisasi Anggaran (Pagu Keseluruhan)		99,87% 82,91%	104,03% 86,36%

Berdasarkan tabel III.1 di atas terdapat 2 (dua) indikator yang dapat dibandingkan dengan target nasional yaitu Renstra Kemenkes. Indikator 2 Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target 94% pada Renstra tahun 2025, realisasi sebesar 100% lebih besar di banding dengan dengan target pada Renstra. Untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit target 92,3 pada Renstra, realisasinya melampaui target yaitu sebesar 99,54.

Capaian indikator tahun 2025 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Kekeamatan Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Status kinerja deteksi dini factor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

$$\frac{\text{Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Target Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pada tabel III.2 digambarkan capaian indikator terhadap target parameter yang ditetapkan

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar BBKK Makassar Tahun 2025

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	9.400.000	11.502.668	122,37
	1. Jumlah penumpang pesawat datang	3.900.010	4.755.600	
	2. Jumlah penumpang pesawat berangkat	2.508.000	3.101.269	
	3. Kunjungan Poliklinik Bandara (Keur, Vaksinasi)			

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan	300	368	
	- Pelayanan vaksinasi MM, YF, Typhoid, dan Polio	2.600	3.174	
	- Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Bandara	6.700	8.129	
	4. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Bandara	35	45	
	5. Pemeriksaan Personil Pesawat (Termasuk ICV Personil Kedatangan)	310.000	386.960	
	6. Jumlah Penumpang Kapal Datang	1.200.000	1.463.749	
	7. Jumlah Penumpang Kapal Berangkat	1.170.000	1.415.992	
	8. Kunjungan Poliklinik Pelabuhan (Keur, Vaksinasi)			
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan	2.400	3.044	
	- Pelayanan vaksinasi MM, YF, Typhoid, dan Polio	5.300	6.843	
	- Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Pelabuhan	15.000	18.426	
	9. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Pelabuhan	10	0	
	10. Pemeriksaan Awak Kapal (Termasuk ICV Awak Kapal Kedatangan)	270.000	327.011	
	11. Jumlah Skrining HIV	1.500	1.824	
	12. Jumlah Skrining TB	2.500	3.252	
	13. Jumlah Skrining Sifilis	600	754	
	14. Jumlah Skrining Malaria	1.100	1.387	
	15. Jumlah Cek Kesehatan Gratis (CKG)	3.945	4.841	
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	16.500	19.848	120,29
	1. Jumlah General Declaration (Gendec) Terverifikasi (Ttd/Stempel) di Bandara	870	1.050	
	2. Jumlah COP	205	248	
	3. Jumlah PHQC	15.425	18.550	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	690	833	120,72
	1. Surat Ijin Angkut Jenazah di Bandara	627	757	
	2. Surat Ijin Angkut Jenazah di Pelabuhan	63	76	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	56.500	68.032	120,41
	1. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Bandara	81	98	
	2. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Bandara	119	143	
	3. Form inspeksi sarana PAB (Lokus) Bandara	25	30	
	4. Rekapitulasi hasil survey vektor Bandara	8.180	9.858	
	5. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Pelabuhan	208	250	
	6. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Pelabuhan	465	561	

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
	7. Form inspeksi sarana PAB Pelabuhan	156	188	
	8. Rekapitulasi hasil survey vektor Pelabuhan	47.266	56.904	

Dari table III.2 terlihat capaian untuk masing-masing parameter melebihi nilai 120%. Sehingga untuk perhitungan indeksnya dapat dijabarkan di dalam Tabel III.3.

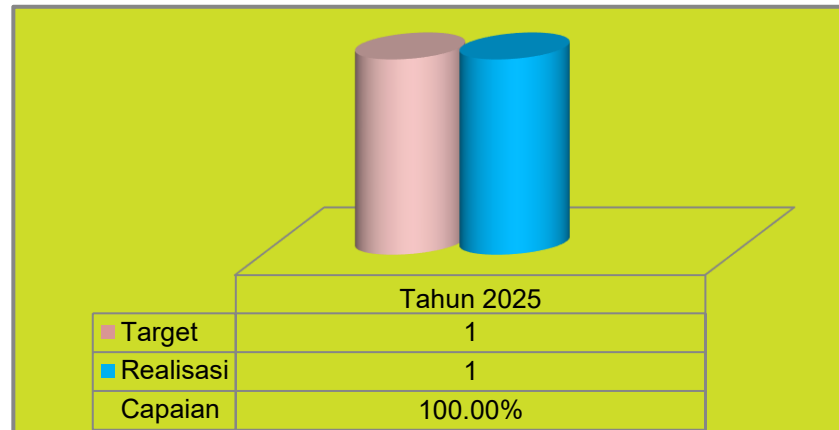
Tabel III.3 Perhitungan Indeks deteksi faktor risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Scoe Min
1	2	3	4	$5=(4/7)^*100$	$6=3*5$	7	8	$9=3*8$	10	$11=3*10$
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120	600	100	120	600	0	0
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	120	600	100	120	600	0	0
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120	360	100	120	360	0	0
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	120	600	100	120	600	0	0
Total					2.160			2.160		0
$Indeks = \frac{S}{S_{max} - S_{min}}$ $Indeks = \frac{2.160}{2.160 - 0}$ $Indeks = 1$										

Berdasarkan tabel III.3 diperoleh score sebesar 2.160. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 1.

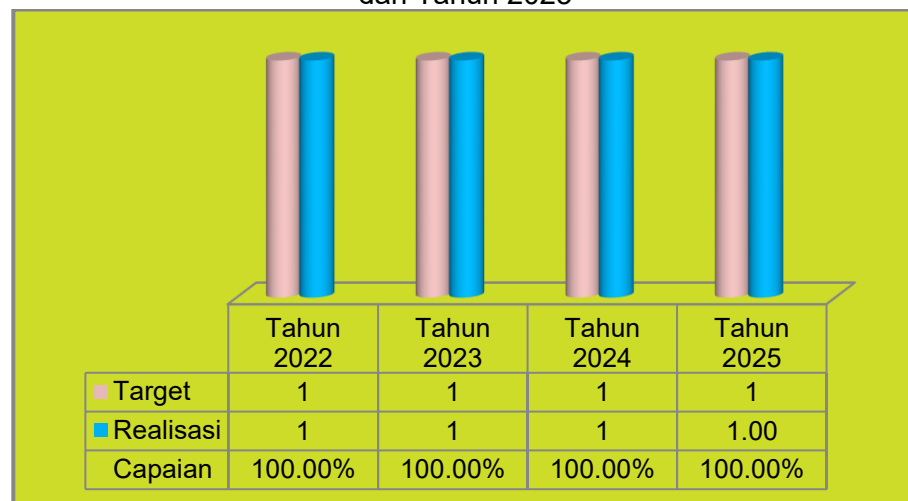
Grafik III. 1 menjelaskan perbandingan antara target tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2025 untuk indikator 1.

Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-1
BBKK Makassar tahun 2025



Grafik III.1 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 1, dapat dilihat realisasi bernilai 1. Penetapan target untuk tahun 2025 ditetapkan dengan nilai indeks 1 karena realisasi di tahun 2024 maksimal sebesar 1. Di tahun 2025 jumlah penumpang domestik dan internasional cukup meningkat, peningkatan ini signifikan berasal dari jumlah jemaah haji dan umroh. Seiring dengna signifikannya jumlah penumpang maka target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

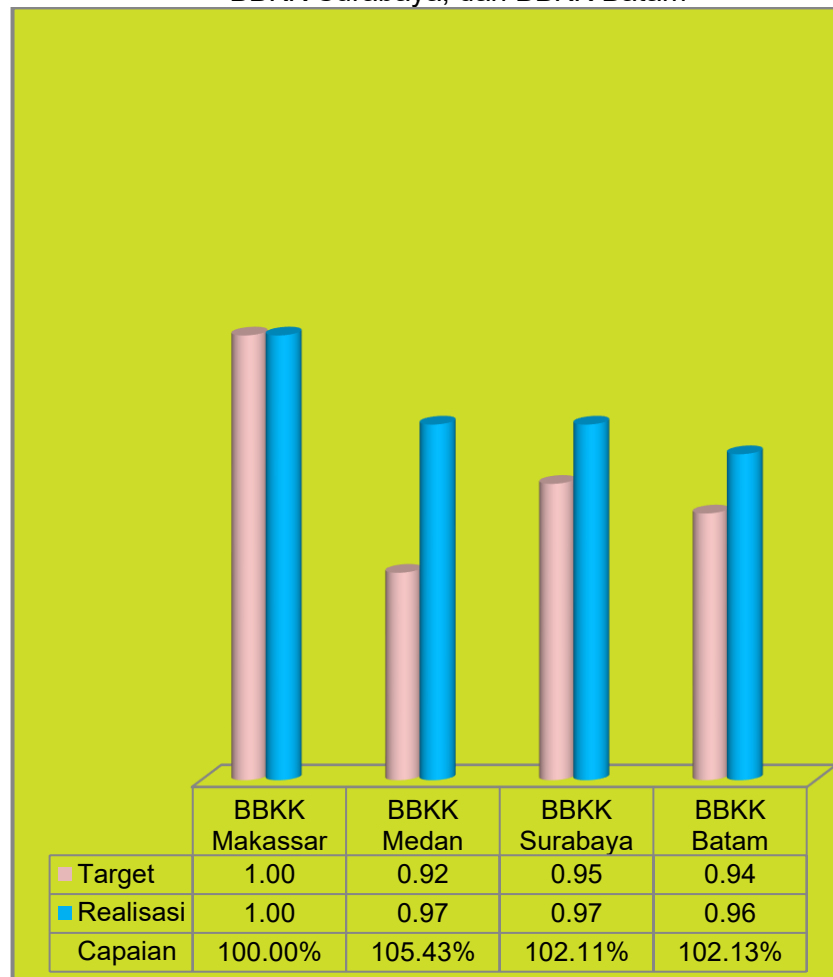
Grafik III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator Ke-1
BBKK Makassar tahun 2022, 2023, 2024
dan Tahun 2025



Dari grafik III.2 dapat dilihat realisasi target untuk indikator ke-1 pada tahun 2022 sd 2024 mencapai target yang telah ditetapkan. Melihat realisasi dari tahun 2022 sd 2024, sehingga untuk tahun 2025 ditetapkan target sama dengan tahun 2024, untuk tahun 2025, realisasi bernilai 1, sehingga capaian dapat bernilai 100%. Capaian ini seiring dengan meningkatnya jumlah pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan.

Grafik III.3 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1
Tahun 2025

BBKK Makassar dengan BBKK Medan
BBKK Surabaya, dan BBKK Batam



Grafik III.3 tergambar bahwa BBKK Makassar dengan capaian paling kecil, karena penentuan target yang lebih besar dari BBKK Medan, Surabaya, dan Batam. BBKK Makassar menetapkan target sebesar

nilai indeks 1 berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya yang mencapai target.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yakni :

- 1) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar mencapai target yang ditetapkan, dipengaruhi beberapa faktor keberhasilan yaitu :
 - a) Bertambahnya frekuensi penerbangan internasional yang signifikan sehingga pengawasan penumpang internasional juga bertambah, seperti halnya terbukanya pelayanan maskapai baru Flyadeal tujuan Arab Saudi
 - b) Dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap komunitas Pelabuhan dan bandara (All Indonesia– Karantina Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, Angkasa Pura, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan)
 - c) Pemeriksaan kesehatan pelaut untuk perpanjangan buku pelaut, perpanjangan lisensi dan melamar pekerjaan
- 2) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar mencapai target yang ditetapkan karena :
 - a) Penambahan frekuensi penerbangan internasional, signifikan jumlah frekuensi penerbangan dalam pelaksanaan umrah.
 - b) Pengawasan alat angkut pelaksanaan haji yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
- 3) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar mengalami tren peningkatan hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2025 terdapat peningkatan frekwensi penerbangan internasional dimana penerbangan dari Malaysia yang tadinya 5 kali penerbangan selama 1 minggu bertambah menjadi 7 kali seminggu

- 4) Persentase barang yang diperiksa sesuai standar mencapai target karena kemudahan akses untuk pengiriman jenazah melalui transportasi udara dan laut.
- 5) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar tercapai karena adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta peran lintas sektor yang mendukung tuisi dari BBKK Makassar.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Eksternal
 - a) Pelaku perjalanan luar negeri belum memahami prosedur pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
 - b) Beberapa Pelaku Perjalanan Luar Negeri (China) tidak memahami Bahasa Internasional sehingga menyulitkan dalam pendampingan pengisian All Indonesia.
 - c) Masih kurangnya PC yang tersedia di kedatangan Internasional untuk digunakan PPLN jika terkendala dalam penggunaan HP pribadi
 - d) Petugas lintas sektor terkait masih kurang pada saat kedatangan PPLN sehingga beberapa PPLN antri jika terkendala dalam pengisian All Indonesia
- 2) Internal
 - a) Thermal Scanner kadang mengalami gangguan
 - b) Ketersediaan tenaga yang masih kurang di beberapa wilker sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan
 - c) Kurangnya tenaga dokter dan perawat, sehingga belum semua wilker membuka layanan vaksinasi
 - d) Belum semua Wilker tersedia kendaraan boarding
 - e) Masih terdapat beberapa ruang pemeriksaan di terminal pelabuhan masih kurang representatif
 - f) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium
 - g) Cakupan layanan BBKK Makassar yang terlalu luas mencakup 2 (dua) provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat, sehingga koordinasi dengan Wilker yang jaraknya jauh kurang maksimal.

g. Usul Pemecahan Masalah

1) Eksternal

- a) Menginformasikan kepada pihak maskapai untuk mengarahkan penumpangnya mengisi All Indonesia pada saat check in di bandara sebelumnya
- b) Menyiapkan alat translater untuk memudahkan petugas dalam membantu pengisian All Indonesia
- c) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait proses kekarantinaan Kesehatan.
- d) Perlunya regulasi terhadap konsistensi keseragaman pelaksanaan SOP pengawasan kekarantinaan kesehatan untuk semua BKK
- e) Penggunaan modem internal pada saat pelayanan SSHP terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri.

2) Internal

- a) Penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPPK/Mutasi Internal
- b) Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional untuk *boarding*
- c) Koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara
- d) Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
- e) Melakukan kalibrasi secara berkala terhadap alat-alat Kesehatan yang digunakan di kedatangan Internasional
- f) Melakukan perbaikan/pemeliharaan termal scanner untuk hasil pengukuran yang optimal.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu

anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja i

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(1.145.171.000 \times 1) - 1.142.040.759}{1.145.171.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 0,27\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,27\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50,68\%$$

Untuk indikator 1 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.145.171.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.142.040.759,- serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,27%. Sehingga nilai efisiensi diperoleh sebesar 50,68%.

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator 1 penggunaan sumber daya efisien dengan nilai efisiensi di atas 50% yaitu 50,68%.

Selain dari penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Penggunaan alat skrining (*thermal scanner*) dengan sistem sensor lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan operator yang banyak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal dengan menjaga jarak aman.

- 2) Penerapan interkoneksi aplikasi Sinkarkes dan Simponi dalam penerbitan dokumen kesehatan.
- 3) Aplikasi Sehat Care yang memudahkan bagi pelanggan ataupun petugas untuk mendapatkan Formulir Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan secara Sistematis, Jelas, Hemat, dan terdata dengan baik.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan hasil dari pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar kekarantinaan, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{\text{Persentase FR penyakit yang dikendalikan}}{\text{Persentase target FR penyakit yang dikendalikan}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{590}{590} \times 100\% = 100\%$$

Sampai pada Triwulan III tahun 2025 terdapat 551 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan orang, 33 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan alat angkut, 1 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan barang, serta 5 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan lingkungan. Rincian faktor risiko yang dikendalikan terdapat dalam tabel III.4 sebagai berikut :

Tabel III.4 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang BBKK Makassar Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Orang	Faktor Risiko Ditemukan	Notifikasi	SKTLT
1. Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat => Notifikasi	1.147	799	348
2. Covid-19 Positif (Data PCR & Antigen Induk di NAR) => Notifikasi	Influenza : 79 Covid : 11	90	0
3. Sakit (Termasuk Saturasi < 95 , HB $< 8,5$) => SKTLT atau Pertolongan Gawat Darurat	222	0	222
4. Hamil > 32 Minggu => SKTLT	12	0	12
5. Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu (Jamaah Haji) => Berita Acara Tidak Laik Terbang	2	0	2
6. Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	18	0	18
7. Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0
8. Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	322	322	0
9. HIV Positif, TB Positif, Malaria Positif => Notifikasi+C2	HIV : 3 IMS : 5 TB : 2 Malaria : 2	12	0
Jumlah	1.825	1.223	602

Sumber : Data Sinkarkes Tahun 2025

Berdasarkan tabel III.4 terdapat 9 jenis pemeriksaan pada orang, dengan 1.732 FR yang ditemukan. Dengan jumlah notifikasi 1.130 dan SKTLT sejumlah 602.

Tabel III.5 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut
BBKK Makassar Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Alat Angkut	Faktor Risiko ditemukan	SSCC	Surat bebas karantina	One month extention
1. Sanitasi dan vektor	46	46	0	0
Jumlah	46	46	0	0

Berdasarkan tabel III.5 ditemukan 46 FR dalam pemeriksaan alat angkut, dengan pengendalian berupa dilakukan penyehatan alat angkut (fumigasi /disinseksi) kemudian diterbitkan Ship Sanitation Certificate Control (SSCC).

Tabel III.6 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang
BBKK Makassar Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Barang	Faktor Risiko ditemukan	Tolak berangkat	Tunda Berangkat	Desinfeksi
1. Jenazah penyakit menular	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.6 tidak ditemukan FR dalam pemeriksaan barang.

Tabel III.7 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Lingkungan
BBKK Makassar Tahun 2025

Jenis Pemeriksaan Lingkungan	Faktor Risiko ditemukan	Fogging	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Abatisasi	Pemberian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
1. TPP (e coli, MPN coliform, alat usap makan dan masak), yang tidak memenuhi syarat/indeks tinggi	0	0	0	0	0

Jenis Pemeriksaan Lingkungan	Faktor Risiko ditemukan	Fogging	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Abatisasi	Pemberian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	5	0	0	0	5
3. Vektor di lingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan	0	0	0	0	0
Jumlah	5	0	0	0	5

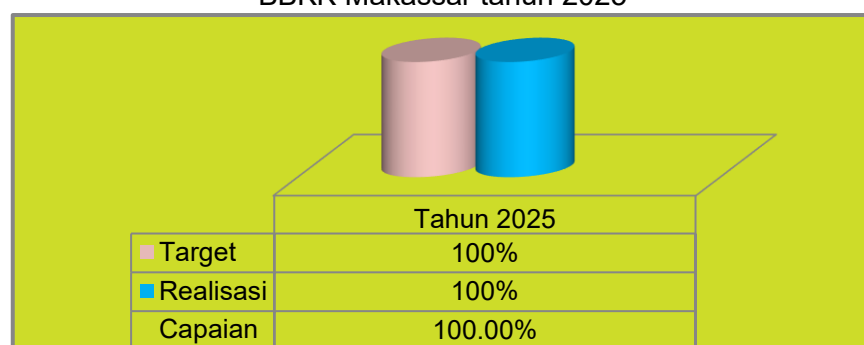
Dari table III.7 terdapat 5 FR pada pemeriksaan bakteriologis kualitas air yang dikendalikan dengan pemberian rekomendasi terhadap lokus yang bersangkutan.

Tabel III.8 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan BBKK Makassar Tahun 2025

Pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan $(3/2) \times 100$
1	2	3	4
Pemeriksaan orang	1.825	1.825	100
Pemeriksaan alat angkut	46	46	100
Pemeriksaan barang	0	0	100
Pemeriksaan Lingkungan	5	5	100
Total	1.876	1.876	100

Dalam Tabel III.8 terdapat 1.876 faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan.

Grafik III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar tahun 2025



Grafik III.4 menunjukkan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Target ditetapkan 100% karena realisasi di tahun 2024 sebesar 100%, sehingga di tahun 2025 ditetapkan target yang sama dengan tahun 2024. Untuk realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena untuk tahun 2025 semua faktor risiko yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar kekarantinaan, barang dan lingkungan dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

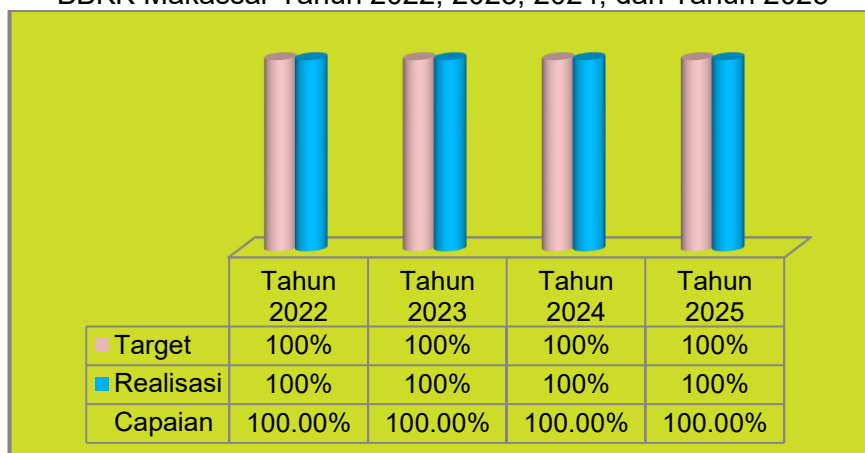
Untuk pemeriksaan orang, dalam hal pengawasan penumpang jika terdapat suhu di atas 37,5°C maka langsung diadakan pemeriksaan antigen dan jika hasil positif akan diberikan notifikasi yang dikirimkan ke Dinkes Provinsi yang selanjutnya akan dikirimkan ke Dinkes Kab/Kota dimana penumpang tersebut berdomisili. Pengawasan berlanjut dengan penyelidikan epidemiolog yang dilakukan oleh kolaborasi Timker I, II, III dan IV. Orang hamil dan sakit juga diterbitkan SKTLT nya jika tidak layak terbang dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan BBKK Makassar.

Untuk alat angkut jika terdapat faktor risiko maka akan diterbitkan dokumen SSCC.

Pemeriksaan barang berupa jenazah dengan penyakit menular langsung diadakan tindakan desinfeksi.

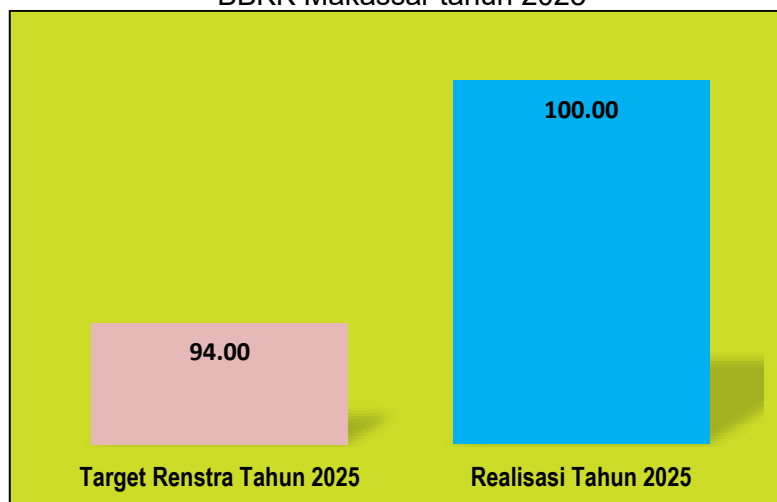
Untuk pemeriksaan lingkungan pengawasan TPP yang tidak sesuai fungsinya diberikan rekomendasi.

Grafik III.5 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2
BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025



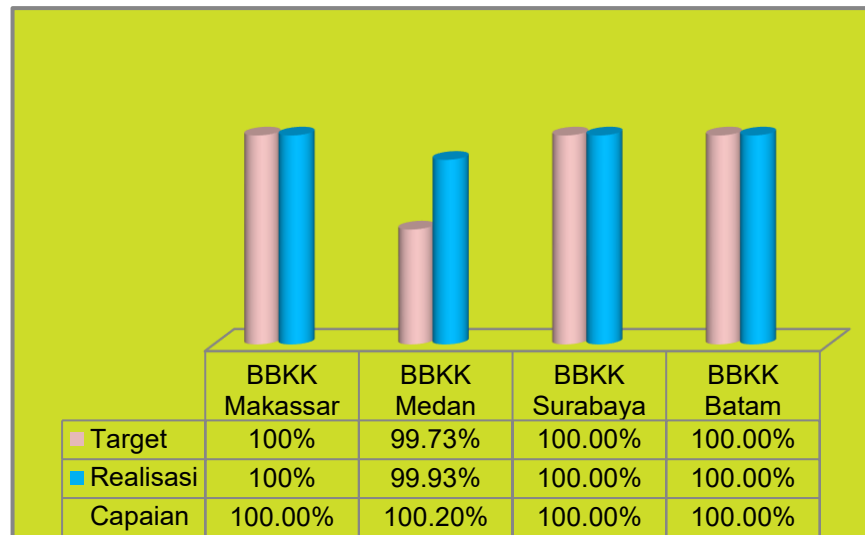
Grafik III.5 menggambarkan capaian untuk indikator ke-2 untuk tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025. Dimana realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tercapai maksimal karena semua faktor risiko yang ditemukan, semuanya dikendalikan.

Grafik III.6 Perbandingan Target Renstra
dengan Realisasi Indikator Ke-2
BBKK Makassar tahun 2025



Grafik III.6 menggambarkan realisasi indikator 2 BBKK Makassar Tahun 2025 sebesar 100% lebih besar dibanding dengan target Renstra Kemenkes sebesar 94%, karena semua factor risiko yang ditemukan pada indikator 1 dikendalikan pada indikator 2.

Grafik III.7 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Batam
Tahun 2025



Dari grafik III.7 di atas menunjukkan BBKK Makassar, Surabaya, dan Batam dengan realisasi 100%. BBKK Medan realisasi di atas target yang ditetapkan karena menetapkan target yang lebih kecil dibanding dengan ke tiga BBKK. Namun semua realisasi tercapai sampai akhir tahun 2025. Dalam menetapkan target BBKK Makassar mengacu pada tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi sesuai target, sehingga ditetapkan target sebesar 100%. Dengan maksud semua faktor risiko yang ditemukan dikendalikan sesuai dengan aturan berlaku berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing parameter.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dalam pemeriksaan orang, FR yang ditemukan langsung dikendalikan karena :
 - a) Adanya dukungan lintas sector dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel.

- b) Pengawasan pelaku perjalanan tetap dilaksanakan sebagai deteksi dini masuknya penyakit potensial wabah.
 - c) Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini pada pelaku perjalanan yang masuk kategori *suspect* penyakit menular dan kontak erat.
 - 2) Dalam pemeriksaan alat angkut, FR ditemukan langsung dikendalikan sehingga mencapai target yang telah ditetapkan karena :
 - a) Dukungan agen kapal yang memberikan informasi yang akurat
 - b) Dukungan lintas sektor dalam pengawasan alat angkut.
 - 3) Dalam pemeriksaan lingkungan, FR yang ditemukan langsung dikendalikan, sehingga target tercapai sesuai yang ditetapkan karena adanya dukungan lintas sector.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Sumber daya dalam pengawasan meliputi SDM, sarana, dan prasarana kurang memadai.
 - 2) Masih terdapat beberapa pelaku perjalanan yang tidak menerima dinyatakan status tidak laik terbang
 - 3) Masih terdapat Pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk suspect dan/atau kontak menolak untuk dilakukan pemeriksaan swab Antigen/PCR.
 - 4) Belum ada keseragaman pelaksanaan aturan pengawasan pesawat dalam negeri terjangkau dan OMKABA di BKK seluruh Indonesia.
 - 5) Pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri terkait pengisian assessment mandiri (SSHP) tidak seragam dilaksanakan di seluruh BKK Indonesia.
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Peningkatan sumber daya yang dibutuhkan di BKK.
 - 2) Memberikan edukasi kepada pelaku perjalanan tentang syarat laik terbang, izin angkut jenazah, orang sakit, dan pelaku

perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor mengenai prosedur penanganan pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.
- 4) Mengusulkan keseragaman regulasi dan pelaksanaan terkait pengawasan pesawat dan pelaku perjalanan di seluruh BKK.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(277.981.000 \times 1) - 276.105.180}{277.981.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 0,67\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,67}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 51,69\%$$

Untuk indikator 2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 277.981.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 276.105.180,- serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,67% dengan nilai efisiensi sebesar 51,69%.

Nilai efisiensi lebih dari 50, berarti untuk kegiatan pada indikator 2 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Adanya *Whatsapp Group* yang telah dibuat yang beranggotakan lintas sektor pelabuhan dan bandara, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta dari BBKK Makassar yang memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dan bertukar informasi dalam penanganan penyakit infeksi emerging.
- 2) EMFIRE (Mobile Emergency First Response) dengan Motor Listrik (molis) sebagai sarana mobilisasi dalam memberikan pertolongan kegawatdaruratan diharapkan dapat merespon kegawatdaruratan kesehatan yang terjadi di bandara dengan cepat, terutama pada saat kondisi macet yaitu pada arus mudik dan situasi khusus lainnya sehingga korban dapat terhindar dari risiko kecacatan atau kematian
- 3) *Telponma'* yaitu Saluran telepon atau call center untuk layanan kedaruratan medis di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
- 4) *Pasolle* bertujuan untuk memudahkan Badan Usaha Swasta (BUS) penyelenggara penyehatan alat angkut dalam mengajukan surat permohonan pengawas pelaksanaan penyehatan alat angkut di wilayah kerja Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar, akses untuk melihat progres dokumen, hanya dapat diakses dari email pemohon yang sudah didaftarkan

3. INDIKATOR KETIGA

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada tahun 2025 adalah sebesar 0,96.

a. Pengertian

Persentase status Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN selama periode satu tahun, berupa :

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1
- 3) Persentase Bandara/Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)
- 4) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa < 2
- 5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat < 2
- 6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter = 0
- 7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
- 8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi persentase target dan capaian:

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Indeks Pinjal ≤ 1

- 3) Larva Anopheles (< 1)
- 4) Populasi Kecoa < 2
- 5) Populasi Lalat < 2
- 6) HI Perimeter = 0
- 7) HI Buffer < 1
- 8) TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

$$\frac{\text{Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara}}{\text{Target Indeks FR di Pintu Masuk Negara}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{1}{0,96} \times 100\% = 104,17 \%$$

Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi
Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di
Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2025

No	Parameter	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100	100	100
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	100	100	100
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	100	100	100
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	100	100	100
5	Kepadatan lalat < 2	100	100	100
6	HI Perimeter = 0	100	100	100
7	HI Buffer < 1	100	100	100
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	100	100	100
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	100	100	100
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	60	100	100

Tabel III.10 Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2025

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Scoe Min
1	2	3	4	$5=(4/7)*100$	$6=3*5$	7	8	$9=3*8$	10	$11=3*10$
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	5	100	100	500	100	100	500	0	0
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	4	100	100	400	100	100	400	0	0
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	3	100	100	300	100	100	300	0	0
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	4	100	100	400	100	100	400	0	0
5	Kepadatan lalat < 2	4	100	100	400	100	100	400	0	0
6	HI Perimeter = 0	5	100	100	500	100	100	500	0	0
7	HI Buffer < 1	5	100	100	500	100	100	500	0	0
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	4	100	100	400	100	100	400	0	0
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500	0	0
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan	5	100	100	500	100	100	500	0	0

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max	Minimal	Score Min
	Mikrobiologis/ Bakteriologis									
	Total				4.400			4.400		0
$Indeks = \frac{S}{S_{max} - S_{min}}$ $Indeks = \frac{4.400}{4.400 - 0}$ $Indeks = 1$										

Berdasarkan Tabel II.10 diperoleh score sebesar 4.400. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal sebesar 4.400, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 1.

1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Tabel III.11 Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2025
Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Parameter	Pengendalian	Target (Sinyal)	Realisasi (Direspon <24 jam)	%Capaian
		100%	100%	100%
Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	Penyelidikan Epidemiologi (PE)	3	3	16.147
	Penumpang Meninggal di Pesawat	4	4	
	Notifikasi Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat =>	706	706	
	Penumpang Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) atau Pertolongan Darurat => SKTLT	222	222	
	Notifikasi TB Positif	2	2	
	Notifikasi HIV Positif	3	3	
	Notifikasi IMS Positif	5	5	
	Notifikasi Malaria Positif	2	2	
	Notifikasi Suspek Covid-19 dengan	11	11	

Parameter	Pengendalian	Target (Sinyal)	Realisasi (Direspon <24 jam)	%Capaian
		100%	100%	100%
	pemeriksaan Antigen/PCR			
	Notifikasi ILI	79	79	
	Notifikasi SSHP Kuning/Orange/Merah	14.637	14.637	
	Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah (SKTLT Penyakit Menular)	18	18	

Berdasarkan tabel III.14 dapat dilihat bahwa indikator sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% dengan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1

Nilai indeks pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel III.12

Tabel III.12 Nilai Indeks Pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Nilai Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belang-belang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III. 12 pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa dari seluruh wilayah kerja yang ditargetkan pemasangan perangkat tikus, indeks pinjal tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (≤ 1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Untuk parameter ini mencapai target 100% pelabuhan/bandara dengan Indeks pinjal ≤ 1 .

3) Persentase Bandara/ Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)

Tabel III.13 Hasil Survey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah Kerja BBKK Makassar pada Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Tidak Ditemukan Larva Anopheles sp (< 1)	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.13 pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa dari seluruh wilayah kerja yang ditargetkan dengan tingkat kepadatan larva *Anopheles sp.* tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (indeks habitat <1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh hasil mencapai target 100%.

4) Persentase Bandara/ Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa (< 2)

Tabel III.14 Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Kepadatan Kecoa	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Rendah < 2	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.14 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh wilayah kerja yang ditargetkan memenuhi syarat tidak melebihi nilai baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan diperoleh capaian target 100%.

5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat <2

Tabel III.15 Kepadatan Lalat
di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Kepadatan Lalat < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tumpa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0,4	0	0	0,3	1	1,6	1,4	0,93	0	0	0	0,4
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.15 di atas dapat dilihat terjadi fluktuasi pada hasil pengamatan setiap bulannya, hasil pengamatan yang melebihi baku mutu dilakukan tindakan pengendalian untuk menekan kepadatan dari seluruh wilayah kerja yang ditargetkan indeks populasi lalat tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh capaian target 100%.

6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter=0

Tabel III.16 Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.16 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survei jentik *Ae. aegypti*, seluruh wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area perimeter dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmkes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/

Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan.
Untuk indikator ini mencapai target 100%.

7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1

Tabel III.17 Kepadatan Jentik *Ae. aegypti* Area Buffer
di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
HI Buffer = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tamba Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.17 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, seluruh wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area buffer area dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmekes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

8) **Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan**

Tabel III.18 Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja
BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Awerange	4	4	
	Pelabuhan Bajoe Bone	2	2	
	Pelabuhan Belang Belang Mamuju	2	2	
	Pelabuhan Biringkassi	3	3	
	Pelabuhan Makassar	2	2	
	Pelabuhan Palopo	2	2	
	Pelabuhan Parepare	2	2	
	Bandara Hasanuddin	1	1	
	Bandara Tampa Padang	1	1	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	1	1	
	Pelabuhan Majene	1	1	
	Pos Pelabuhan Paotere	1	1	
	Pos Pelabuhan Pasangkayu	2	2	
	Total	24	24	

Berdasarkan tabel III.18 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2025 sebanyak 24 lokus dari 13 wilayah kerja, realisasi pada tahun 2025 sebanyak 24 lokus telah mencapai target dengan 3 (tiga) kali pemeriksaan kesehatan selama setahun dengan memenuhi syarat standar baku mutu kesehatan lingkungan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Persentase realisasi kinerja untuk indikator ini telah mencapai target realisasi sebesar 100%.

9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan

Tabel III.19 Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja
BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Bajoe Bone	12	12	
	Pelabuhan Belang Belang Mamuju	1	1	
	Pelabuhan Biringkassi	6	6	
	Pelabuhan Makassar	3	3	
	Pelabuhan Palopo	4	4	
	Pelabuhan Parepare	15	15	
	Bandara Hasanuddin	6	6	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	1	1	
	Pelabuhan Majene	1	1	
	Pos Pelabuhan Paotere	7	7	
	Total	56	56	

Berdasarkan tabel III.19 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2025 sebanyak 56 lokus dari 10 wilayah kerja dengan capaian realisasi sebanyak 100%. Setiap lokus ditargetkan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan minimal 2 (dua) kali pemeriksaan dengan nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan memenuhi syarat sesuai dengan Standar Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan, Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021. Persentase realisasi kinerja untuk indikator ini telah mencapai target realisasi sebesar 100%.

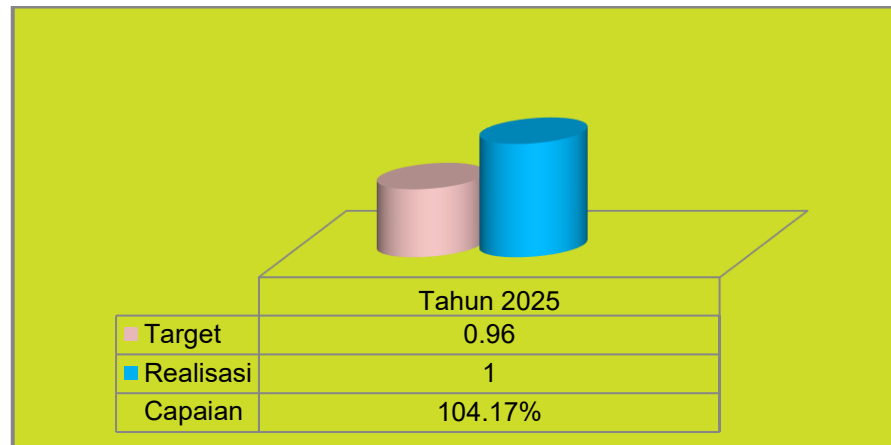
10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

Tabel III.20 Hasil Pemeriksaan Kualitas Air di Wilayah Kerja BBKK Makassar Tahun 2025

Parameter	Wilayah Kerja	Target Lokus (60%)	Pemeriksaan						Realisasi %	Capaian %
			P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6		
Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	Bandara Hasanuddin	2	2	2	2	2	2	2	100	100

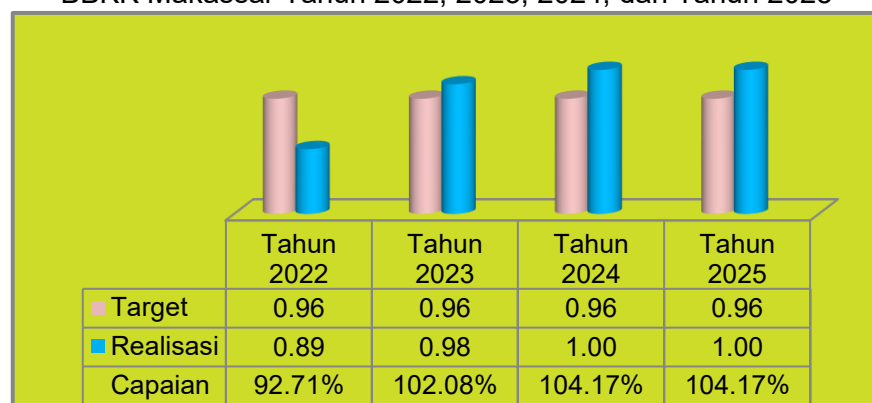
Berdasarkan tabel III.20 bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) lokus di Wilayah Kerja Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Realisasi capaian tahun 2025 telah mencapai target dengan memenuhi kriteria minimal 2 (dua) kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 (enam) kali pemeriksaan mikrobiologi memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Persentase realisasi kinerja untuk indikator ini telah mencapai target realisasi sebesar 100%.

Grafik III.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3
BBKK Makassar tahun 2025



Grafik III.8 menunjukkan realisasi tercapai untuk Tahun 2025. Perolehan Indeks pada tahun 2025 dipengaruhi oleh 10 parameter, di mana keseluruhan parameter telah mencapai target yang telah ditetapkan memenuhi syarat dengan Minimal 2 (dua) Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 (enam) Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis dengan hasil pemeriksaan memenuhi syarat kesehatan.

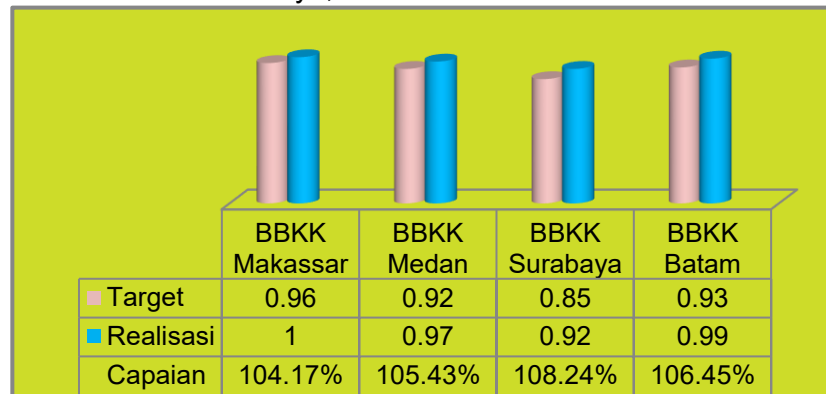
Grafik III.9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3
BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025



Grafik III.9 tergambar realisasi indikator untuk tahun 2022 yang tidak mencapai target. Tahun 2023 dan 2024 terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025 penetapan target sama

dengan tahun 2024, melihat realiasi di tahun 2024. Untuk Tahun 2025 keseluruhan target tercapai untuk 10 parameter.

Grafik III.10 Perbandingan Capaian Indikator ke-3
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025



Dari Grafik III.10 menunjukkan bahwa keseluruhan BBKK telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun untuk capaian terkecil di BBKK Makassar, karena target ditetapkan lebih besar dari BBKK lain.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Sistem surveilans yang mengintegrasikan pelaporan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas), Rumah Sakit dan BBKK pada website <https://skdr.surveilans.org> memudahkan dalam sistim kewaspadaan dini penyakit potensial KLB dan BBKK Makassar berperan aktif dalam menggunakan sistem ini.
- 2) Keberhasilan kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah kerja dalam rangka mengendalikan kepadatan populasi vektor karena adanya dukungan tenaga kader dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Kader yang direkrut sebagian dari lulusan program studi kesehatan lingkungan, sehingga sudah paham teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP.
- 3) Wilayah kerja yang melebihi baku mutu pada indikator yang dipersyaratkan dilakukan upaya pengendalian sesuai dengan

petunjuk teknis ataupun peraturan yang mengatur tentang upaya pengendalian vektor dan BPP antara lain :

- Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks pinjal yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap hidup (*lifetrap*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan untuk menghitung *succestrap* juga berperan untuk mengurangi populasi tikus pada area pemasangan perangkap sehingga populasi tikus yang berperan sebagai inang dari pinjal pada lokasi pengamatan akan berkurang, selanjutnya pada tikus yang tertangkap dilakukan penyisiran untuk melihat keberadaan pinjal. Pemasangan perangkap yang telah dilaksanakan merupakan intervensi pengendalian terhadap inang dari pinjal yang secara tidak langsung berkurangnya inang dari pinjal pada lokasi pengamatan juga akan menekan indeks pinjal pada area tersebut.
- Pemantauan dilakukan pada lokasi-lokasi yang memungkinkan sebagai perkembangbiakan nyamuk *Anopheles sp.* baik pada *perimeter area* ataupun di *buffer area*. Pada lokasi pengamatan yang ditemukan larva *Anopheles sp.* dilakukan tindakan pengendalian dengan larvasidasi menggunakan larvasida BTI (*bacillus thuringiensis israelensis*) Larvasida ini memiliki cara kerja yaitu sebagai racun perut, setelah tertelan kristal endotoksin larut yang mengakibatkan sel epitel rusak dan serangga berhenti makan lalu mati.
- Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks kepadatan kecoa yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap lem (*sticky trap*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan juga berperan untuk mengurangi populasi pada area pemasangan perangkap sehingga populasi kecoa pada lokasi pengamatan akan berkurang. Selain itu beberapa tempat pengolahan pangan di terminal bandara yang sudah rutin melaksanakan

pengendalian vektor dan BPP baik secara mandiri ataupun dengan menggunakan jasa *pest control*.

- Tindakan pengendalian yang dilakukan pada lokasi dengan indeks kepadatan lalat yang tinggi yaitu dengan metode pengendalian secara kimia (*spraying*), metode ini dapat menekan dan memberantas lalat dewasa sebagai tindakan pengendalian dalam rangka mencegah penyakit tular vektor dan BPP yang disebabkan oleh lalat.
 - Pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dilakukan pada fase jentik dengan larvasidasi dan untuk nyamuk dewasa yaitu dengan pengasapan/ fogging. Pemberian larvasida ini dapat menekan kepadatan populasi untuk jangka waktu 2 bulan. Pembubuhan larvasida dilakukan bersamaan saat melakukan survey jentik. Apabila ditemukan container yang berpotensi serta positif larva. Jenis larvasida yang digunakan adalah jenis larvasida granula temephos. Temephos 1 % sesuai dengan yang dianjurkan aman bagi manusia dan tidak menimbulkan keracunan. Jika dimasukkan kedalam air maka sedikit demi sedikit zat kimia tersebut akan larut secara merata dan membunuh semua larva nyamuk yang ada dalam tempat penampungan air tersebut. Dosis penggunaan temephos adalah 10 gram untuk 100 liter air.
- 5) Keberhasilan capaian kinerja pada setiap lokus tempat fasilitas umum (TFU), tempat pengelolaan pangan (TPP) dan kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan karena adanya upaya pengembangan edukatif melalui :
- a) pendekatan persuasif terhadap pengelola ataupun karyawan untuk memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi pendampingan
 - b) frekuensi pemeriksaan dilakukan melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen/variabel yang dinilai

- c) melakukan upaya peningkatan pengetahuan karyawan/ penjamah melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang kualitas dan keamanan pangan
 - d) Intervensi terhadap lokus yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan oleh pihak pengelola berdasarkan rekomendasi yang diberikan sehingga komponen yang diperiksa didapatkan hasil memenuhi syarat pada pemeriksaan berikutnya
 - 6) Adanya kesadaran masyarakat pelabuhan dan bandara membangun komitmen dalam mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat.
 - 7) Peran aktif lintas sektor dalam penerapan regulasi terkait SOP pelaksanaan program pengendalian risiko lingkungan di pelabuhan dan bandara.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Hasil pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu lama sehingga berpotensi menimbulkan penularan di wilayah.
 - 2) Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional di wilayah kerja
 - 3) Ketersediaan dana bersumber SBK dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP belum maksimal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Terbatasnya Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) yang dinyatakan sebagai petugas yang kompeten dalam pengambilan contoh uji air (PPCUA)
 - 5) Terbatasnya jumlah lokus yang menjadi target kualitas air bersih dipengaruhi ketersediaan anggaran terhadap biaya pemeriksaan laboratorium sampel lingkungan
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Berkoordinasi dengan Laboratorium untuk memberikan prioritas terhadap pemeriksaan sampel suspek KLB.
 - 2) Pengadaan SDM melalui CPNS, PPPK maupun mutasi internal Kemenkes untuk didistribusikan ke wilayah kerja.

- 3) Penambahan anggaran pelaksanaan program pengendalian vektor dan BPP.
- 4) Tenaga sanitasi lingkungan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (PPCUA)
- 5) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai metode pengendalian vektor serta pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 6) Target lokus kualitas air bersih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemeriksaan laboratorium

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(222.227.000 \times 1,04) - 222.960.323}{222.227.000 \times 1,04} \times 100\%$$

$$E = 3,69\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{3,69}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 59,22\%$$

Untuk indikator 3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.227.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 222.960.323,- serta capaian indikator sebesar 104,17%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,69% dengan nilai efisiensi sebesar 59,22%. Dari hasil perhitungan terlihat nilai efisiensi yang lebih dari 50, artinya kinerja terlaksana dengan penggunaan anggaran yang tidak terlalu besar.

Selain itu efisiensi penggunaan dari sisi anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Sumber daya yang digunakan adalah memanfaatkan petugas surveilans puskesmas, maupun petugas surveilans BKK, sedangkan untuk wilker dengan jumlah personil yang terbatas ditunjuk petugas penanggung jawab Timker 1.
- 2) Ketersediaan SDM terlatih yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.
- 3) Keterlibatan kader pada kegiatan survey dan pengendalian vektor dan BPP.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja yang diukur dengan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI..

b. Definisi Operasional

NKA diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI.

- 1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
 - a) Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75%
 - b) Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%
 - c) Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10%.
- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
 - a) Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10%
 - b) Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15%
 - c) Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20%
 - d) Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10%
 - e) Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10%
 - f) Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%
 - g) Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan
 - h) Dispensasi SPM (sebagai pengurang).

Target indicator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 85,00.

c. Rumus (cara perhitungan)

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Adapun bobot dan nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Parameter	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Capaian Realisasi Output	75%	100,00	75,00
2	Efisiensi SBK	15%	100,00	15,00
3	Penggunaan SBK	10%	99,40	9,94
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				99,94

2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Parameter	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	10%	100,00	10,00
2	Deviasi Hal III DIPA	15%	94,43	14,16
3	Penyerapan Anggaran	20%	100,00	20,00
4	Belanja Kontraktual	10%	100,00	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00	10,00
7	Capaian Output	25%	100,00	25,00
8	Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)		0	0
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran				99,16

Adapun pengukuran NKA ini adalah sebagai berikut:

$$NKA = (50\% \times \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran}) + (50\% \times \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran})$$

$$NKA = (50\% \times 99,94) + (50\% \times 99,16)$$

$$NKA = 49,97 + 49,58$$

$$NKA = 99,54$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Nilai Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{99,54}{85} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = 117,11\%$$

d. Evaluasi Capaian Kinerja

Perhitungan NKA di atas telah sesuai dengan nilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI dimana nilai kinerja perencanaan

anggaran sebesar 99,94 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,16 sehingga menghasilkan NKA sebesar 99,54.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Bulan September Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Gambar III.1

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	024.05.416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	99,91	100,00	100,00	99,40

Gambar III.1 Screenshoot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025

Adapun Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Gambar III.2

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	136	024	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nilai	100,00	94,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,16	100%	0,00	99,16
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	14,16	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
						Nilai Aspek	97,22			100,00			100,00				

Gambar III.2 Screenshoot Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025

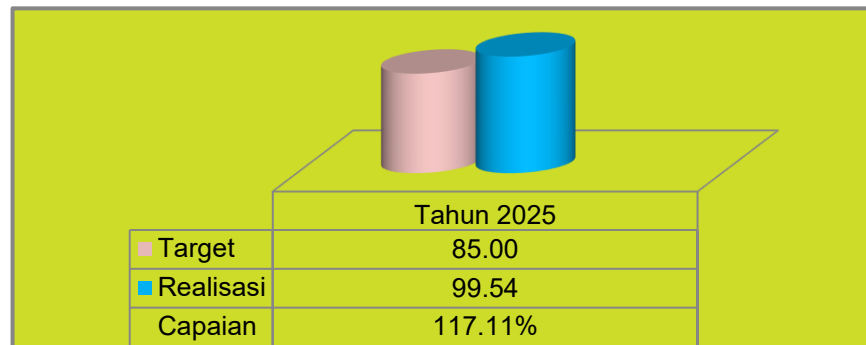
Sehingga Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Gambar III.3

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	024.05.416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	99,91	99,16	99,54

Gambar III.3 Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Nilai Kinerja Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI di atas, nilai BBKK Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 99,54.

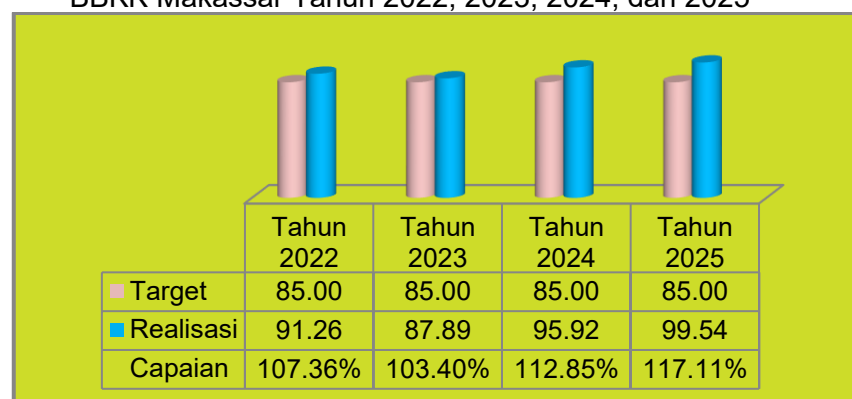
Grafik III.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2025



Grafik III.11 menunjukkan realisasi yang belum mencapai target. Realisasi di tahun 2024 dijadikan sebagai acuan untuk penetapan target di tahun 2025. Kegiatan on track, sehingga untuk akhir tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian indikator ke-4 antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam Grafik III.12.

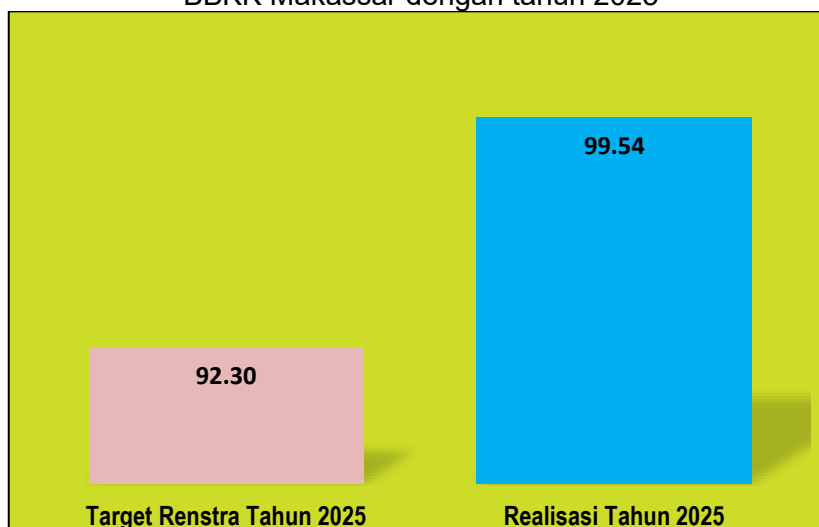
Grafik III.12 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025



Dari grafik III.12 terlihat untuk realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 berada di atas target yang telah ditentukan. Pada tahun 2025 juga mencapai target dan merupakan realisasi tertinggi dari tahun 2022. Hal ini karena nilai kinerja

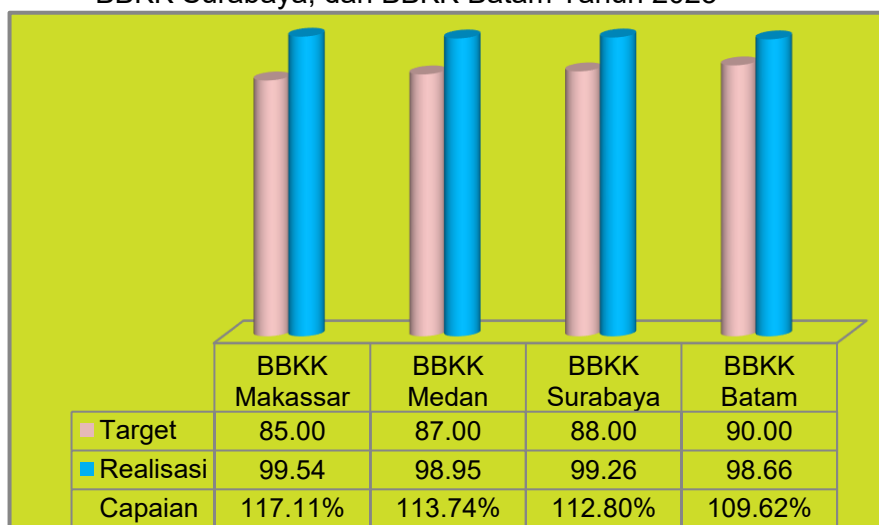
perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang mendapat nilai di atas 90, Dimana ke dua nilai tersebut sebagai indicator penilaian dalam Penentuan Nilai Kinerja Anggaran.

Grafik III.13 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan tahun 2025



Grafik III.13 menggambarkan realisasi yang melebihi target Renstra. Tahun 2025 BBKK Makassar menetapkan target lebih rendah dari target Renstra Kemenkes, namun realisasi tahun 2025 bisa melebihi target Renstra Kemenkes.

Grafik III.14 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025



Dari Grafik III.14 terlihat realisasi untuk ke empat BKK keseluruhan sudah mencapai target. Realisasi terbesar pada BBKK Makassar dengan nilai 99,54.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi (*money*) realisasi anggaran serta capaian output kegiatan secara berkala.
Seluruh kegiatan yang ada dalam RKAKL dilakukan pembahasan capaian realisasinya serta kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai alternatif pemecahan masalah.
- 2) Melakukan revisi kegiatan dan anggaran dalam RKAKL.
Untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang tidak terencana sebelumnya, maka dilakukan revisi anggaran baik pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), revisi Kanwil DJPb maupun revisi DJA.
- 3) Melaksanakan *money* per bulan terhadap RPK dan RPD.

f. Masalah yang dihadapi

Adanya efisiensi pagu anggaran sehingga berdampak pada jumlah pagu efektif yang jauh lebih kecil dari pagu keseluruhan, namun capaian output telah terealisasi secara maksimal sesuai bobot, seluruh volume kegiatan telah dilaksanakan sebesar 100% dan realisasi pagu anggaran efektif sebesar 99,87%. Nilai Capaian Output telah optimal dan maksimal yaitu sebesar 25,00 serta Nilai Penyerapan Anggaran yang maksimal sebesar 20,00 sehingga diperoleh Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA) sebesar 99,16 dan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 99,54.

g. Usul pemecahan masalah

Tim kerja penanggung jawab parameter ini (sub bagian administrasi umum) telah dapat mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran,

efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi serta melakukan pemantauan terhadap update dari dashboard aplikasi SAKTI dan SMART Kemenkeu dan telah dapat diperoleh Nilai Kinerja Anggaran yang maksimal dan sangat baik.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran kinerja
CKi : Capaian kinerja
RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(80.729.000 \times 1,17) - 79.742.170}{80.729.000 \times 1,17} \times 100\%$$

$$E = 15,65\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{15,65}{20} \times 50\%\right)$$

$$NE = 89,13\%$$

Untuk indikator 4 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.729.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.742.170,- serta capaian indikator sebesar 117,11%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,65% dan nilai efisiensi sebesar 89,13%.

Selain itu efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan money realisasi anggaran dan money capaian keluaran yang dilakukan secara berkala dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya seperti rekonsiliasi data PNBPN dan pertemuan koordinasi internal. Dengan metode pelaksanaan kegiatan money seperti ini maka akan terjadi efisiensi sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya.
- 2) Aplikasi D'Tawang untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungjawaban keuangan di BBKK Makassar.
- 3) Aplikasi Sitopeng yang dapat memonitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

5. INDIKATOR KELIMA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Pengertian

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

b. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA) Tahun 2025 adalah sebesar 90,00.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Satker dihitung sebagaimana berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

*) keterangan :

- 1) Konversi bobot bernilai 100 persen apabila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai dan
- 2) Konversi bobot bernilai dibawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

d. Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran terdapat 8 (delapan) indikator dengan bobot terlihat dalam tabel III.21.

Tabel III.21 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Aspek	No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%	100,00	10,00
	2	Deviasi Hal III DIPA	15%	94,43	14,16
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	20%	100,00	20,00
	4	Belanja Kontraktual	10%	100,00	10,00

Aspek	No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00	10,00
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00	10,00
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	7	Capaian Output	25%	100,00	25,00
	8	Dispensasi SPM (Sebagai Pengurang)		0	0
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran					99,16

Dari hasil perhitungan capaian kinerja indikator IKPA BBKK Makassar Tahun 2025 sebesar 99,16 dengan kategori sangat baik, ditunjukkan dalam gambar III.4 dashboard OM-SPAN.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	024	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nilai	100.00	94.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.16	100%	0.00	99.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.22			100.00			100.00				

Gambar III.4
Dashboard Aplikasi OM-SPAN
hasil perhitungan capaian kinerja IKPA
BBKK Makassar Tahun 2025

Dari gambar III.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Revisi DIPA

Indikator revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan Satker dalam satu semester.

Indikator revisi DIPA ini merupakan salah satu indikator yang mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 Tahun 2022 ke tahun 2024, dimana sebelumnya frekuensi yang dihitung adalah per triwulan menjadi semesteran.

Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat satker dan termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap

yang disahkan oleh DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kanwil DJPB Kementerian Keuangan antara lain :

- a. (201) Antar fungsi/sub fungsi dan/atau antar program
- b. (211) Pemenuhan belanja operasional
- c. (212) Penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional
- d. (213) Pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non-operasional
- e. (217) Penyelesaian tunggakan
- f. (220) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola
- g. (221) Pergeseran anggaran antarjenis belanja
- h. (222) Kontrak tahun jamak
- i. (225) RO cadangan
- j. (226) Penurunan volume RO secara total
- k. (229) Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
- l. (231) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
- m. (236) Pergeseran anggaran antar KRO dan/atau antar kegiatan
- n. (239) Revisi dalam rangka pagu tetap lainnya

Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA sebagaimana berikut :

Jumlah Revisi DIPA	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
≥ 3	50

Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan semester II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Formula perhitungan nilai IKPA revisi DIPA = (50% x NKRA Semester I) + (50% x NKRA Semester II), dimana NKRA berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester.

Tahun 2025 BBKK Makassar telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 8 kali.

Tabel III.22
Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2025

No	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan DIPA	Perubahan Pagu	Kode Revisi	Jenis Revisi	Objek penilaian Revisi DIPA
1	Revisi DIPA 1	21 Februari 2025	Tidak	306	Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)	Tidak
2	Revisi DIPA 2	19 April 2025	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
3	Revisi DIPA 3	08 Juli 2025	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
4	Revisi DIPA 4	31 Juli 2025	Tidak	223	Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional	Tidak
				239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	Ya
				306	Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)	Tidak
				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
5	Revisi DIPA 5	19 September 2025	Ya	106 PNB	Penggunaan Realisasi PNB di Atas Targetnya	Tidak
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	Tidak
6	Revisi DIPA 6	6 Oktober 2025	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
7	Revisi DIPA 7	23 Oktober 2025	Ya	122	Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya	Tidak
				211	Pemenuhan Belanja Operasional	Ya
				221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja	Ya

No	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan DIPA	Perubahan Pagu	Kode Revisi	Jenis Revisi	Objek penilaian Revisi DIPA
				223	Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional	Tidak
				237	Pergeseran Anggaran Antar-Unit Eselon I	Tidak
				307	Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .B	Tidak
				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak
8	Revisi DIPA 8	5 Desember 2025	Tidak	-	Pemutakhiran Revisi POK	Tidak

Sumber : Data Primer 2025

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN, Nilai Parameter Revisi DIPA BBKK Makassar Tahun 2025 adalah 100. Berdasarkan tabel III.22 terlihat bahwa sampai Bulan Desember Tahun 2025 dilakukan delapan kali revisi DIPA dengan pagu tetap enam kali dan pagu berubah dua kali. Dalam revisi tersebut, terdapat satu kali revisi yang masuk kedalam perhitungan nilai IKPA yakni revisi DIPA 4 dimana dilakukan revisi relaksasi blokir sesuai Surat Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor PR.04.02/C/2339/2025 tanggal 7 Juli 2025 Hal Penetapan Distribusi Pagu pada Revisi DJA Tahap 4 – Relaksasi Blokir Kode A Satker di Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit TA. 2025. Proses revisi relaksasi blokir tersebut dilakukan pada tingkat DJA dengan mengikutkan Satker BBKK/BKK/Loka Seluruh Indonesia termasuk BBKK Makassar melalui revisi oleh Eselon I. Meskipun termasuk dalam objek penilaian IKPA, namun masih mendapat nilai 100 karena jumlah yang menjadi objek penilaian hanya 1 dalam 1 semester.

2) Deviasi Halaman III DIPA

Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan

anggaran berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi Halaman III DIPA.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulanan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama bulan Februari.

Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum 100 adalah 5%. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

Adapun nilai parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar 2025 dapat dilihat pada tabel III.23 berikut ini.

Tabel III.23
Parameter Deviasi Halaman III DIPA
BBKK Makassar Triwulan III Tahun 2025

No.	Kode Saklar	Nama Saklar	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proposal Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
					S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7			
1	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	01	642,456,827	61,617,438	0	0	642,456,827	61,617,438	0	0	0	3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	02	1,453,685,242	412,619,996	0	0	1,474,241,899	381,836,180	0	0	20,576,657	30,783,836	0	0	1.42	7.46	0.00	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	03	2,820,295,818	837,763,500	55,999,999	0	2,905,652,983	754,504,483	47,100,000	0	145,356,265	83,259,017	8,999,999	0	5.15	9.94	15.89	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	04	1,451,066,300	292,421,204	0	0	1,444,662,687	318,144,417	0	0	6,343,813	25,723,213	0	0	0.44	8.90	0.00	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.27	3.22	0.00	0.00	3.49	0.87	100.00
5	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	05	1,444,166,634	402,592,896	40,414,000	0	1,442,785,324	318,301,417	61,050,000	0	1,381,410	94,291,439	20,636,000	0	0.10	20.94	51.06	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.06	7.67	0.86	0.00	8.59	2.42	100.00
6	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	06	2,950,810,081	1,202,625,681	103,012,000	0	2,908,300,774	819,991,894	41,015,610	0	42,509,307	352,633,987	61,966,390	0	1.44	31.82	60.18	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.89	11.65	1.02	0.00	13.56	4.27	100.00
7	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	07	1,438,342,796	928,219,307	39,609,000	0	1,415,563,686	885,742,294	39,205,500	0	22,759,198	42,477,013	403,500	0	1.58	4.58	1.02	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.97	1.66	0.02	0.00	2.67	4.04	100.00
8	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	08	1,455,930,253	470,430,494	8,000,000	0	1,450,492,150	454,976,281	44,622,000	0	5,438,193	15,454,213	36,622,000	0	0.37	3.29	100.00	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	0.23	1.20	1.89	0.00	3.12	3.93	100.00
9	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	09	1,455,930,253	578,945,819	270,594,000	0	1,496,319,280	526,207,487	224,815,500	0	40,389,627	52,736,332	45,778,500	0	2.77	9.11	16.92	0.00	61.69	36.62	1.89	0.00	1.71	3.34	0.29	0.00	5.34	4.09	100.00
10	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	10	1,492,551,303	638,497,685	66,950,499	0	1,483,613,800	502,831,418	21,625,575	0	9,937,593	135,686,267	45,324,924	0	0.67	21.25	67.70	0.00	59.32	35.42	5.26	0.00	0.40	7.53	3.56	0.00	11.49	4.83	100.00
11	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	11	1,492,551,303	521,555,189	1,180,803,000	0	1,513,928,353	374,272,276	681,364,501	0	20,377,050	147,282,913	499,436,499	0	1.36	28.24	42.30	0.00	59.32	35.42	5.26	0.00	0.81	10.00	2.22	0.00	13.03	5.57	94.43
12	416145	BALAI BESAR KEKARANTRUAN KESEHATAN MAKASSAR	136	12	1,492,551,303	521,555,189	1,180,803,000	0	1,513,928,353	374,272,276	681,364,501	0	20,377,050	147,282,913	499,436,499	0	1.36	28.24	42.30	0.00	59.32	35.42	5.26	0.00	0.81	10.00	2.22	0.00	13.03	5.57	94.43

Sumber : OM-SPAN 2025

Nilai deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN adalah 94,43. Indikator deviasi Halaman III DIPA mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 tahun 2022 ke tahun 2025, yakni deviasi bulanan semula dihitung hanya berdasarkan rata-rata per jenis belanja menjadi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja. Selain itu, bobot penilaian IKPA untuk deviasi halaman III DIPA dari 10% menjadi 15%. Nilai akhir % rata-rata deviasi kumulatif BBKK Makassar Tahun 2025 yakni 5,57% (diatas 5%) sehingga nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA adalah 100 – 5,57 menjadi 94,43.

3) Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran

berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja yakni :

a. Belanja Pegawai (51)

Triwulan I 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 75%, dan Triwulan IV 95%.

b. Belanja Barang (52)

Triwulan I 15%, Triwulan II 50%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

c. Belanja Modal (53)

Triwulan I 10%, Triwulan II 40%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

Nilai Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Tahun 2025 pada Aplikasi OM-SPAN adalah 100, sebagaimana yang terlihat pada tabel III.24 berikut ini :

Tabel III.24 Parameter Penyerapan Anggaran
BBKK Makassar Tahun 2025

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA	Nilai IKPA
		051	052	053		
'01	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	18.22	100
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	Target	15%	10%	5%		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA	Nilai IKPA
		051	052	053		
	Penyerapan s.d Periode Ini	642,456,827	61,617,438	-		
	% Realisasi	21.17%	9.95%	0.00%		
	NKPA Tertimbang	16	2	-		
'02	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	68.97	100
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	Target	15%	10%	5%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	2,116,698,726	443,453,598	-		
	% Realisasi	69.76%	71.58%	0.00%		
	NKPA Tertimbang	52	16	-		
'03	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	100.00	100
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	3,034,403,550	619,495,900	23,383,600		
	Target	15%	10%	5%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	5,082,350,809	1,197,958,081	47,100,000		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	75	23	2		
'04	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	75.65	88
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	8,091,742,800	2,477,983,600	93,534,400		
	Target	40%	40%	20%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	6,527,013,496	1,516,102,498	47,100,000		
	% Realisasi	80.66%	61.18%	50.36%		
	NKPA Tertimbang	61	14	1		
'05	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	94.02	97
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA	Nilai IKPA
		051	052	053		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	8,091,742,800	2,477,983,600	93,534,400		
	Target	40%	40%	20%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	8,645,689,256	1,834,403,915	108,150,000		
	% Realisasi	100.00%	74.03%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	75	17	2		
'06	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	100.00	100
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	8,091,742,800	2,477,983,600	93,534,400		
	Target	40%	40%	20%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	10,878,099,494	2,654,395,609	149,165,610		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	75	23	2		
'07	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	91.75	97
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	13,149,082,050	4,026,723,350	280,603,200		
	Target	65%	65%	60%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	12,293,683,182	3,540,137,903	188,371,110		
	% Realisasi	93.49%	87.92%	67.13%		
	NKPA Tertimbang	70	20	1		
'08	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	99.53	100
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	13,149,082,050	4,026,723,350	280,603,200		
	Target	65%	65%	60%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	13,744,175,332	3,995,114,184	232,993,110		
	% Realisasi	100.00%	99.22%	83.03%		
	NKPA Tertimbang	75	23	1		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA	Nilai IKPA
		051	052	053		
'09	Pagu Jenis Belanja	20,229,357,000	12,007,042,000	554,532,000	100.00	100
	Blokir	-	5,812,083,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,229,357,000	6,194,959,000	467,672,000		
	Proporsi Pagu Netto	75.22%	23.04%	1.74%		
	Nominal Target	13,149,082,050	4,026,723,350	280,603,200		
	Target	65%	65%	60%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	15,240,494,612	4,521,321,671	457,808,610		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	75	23	2		
'10	Pagu Jenis Belanja	20,515,595,000	12,077,512,000	1,792,481,000	93.32	98.33
	Blokir	-	5,751,723,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,515,595,000	6,325,789,000	1,705,621,000		
	Proporsi Pagu Netto	71.87%	22.16%	5.97%		
	Nominal Target	17,438,255,750	5,060,631,200	1,193,934,700		
	Target	85%	80%	70%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	16,724,108,412	5,024,153,089	479,434,185		
	% Realisasi	95.90%	99.28%	40.16%		
	NKPA Tertimbang	69	22	2.4		
'11	Pagu Jenis Belanja	20,515,595,000	12,077,512,000	1,792,481,000	99.83	99.96
	Blokir	-	5,751,723,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,515,595,000	6,325,789,000	1,705,621,000		
	Proporsi Pagu Netto	71.87%	22.16%	5.97%		
	Nominal Target	17,438,255,750	5,060,631,200	1,193,934,700		
	Target	85%	80%	70%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	18,238,036,765	5,398,425,365	1,160,798,686		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	97.22%		
	NKPA Tertimbang	72	22	5.81		
'12	Pagu Jenis Belanja	20,515,595,000	12,077,512,000	1,792,481,000	100	100
	Blokir	-	5,751,723,000	86,860,000		
	Pagu Netto	20,515,595,000	6,325,789,000	1,705,621,000		
	Proporsi Pagu Netto	71.87%	22.16%	5.97%		
	Nominal Target	17,438,255,750	5,060,631,200	1,193,934,700		
	Target	85%	80%	70%		

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA	Nilai IKPA
		051	052	053		
	Penyerapan s.d Periode Ini	20,494,917,267	6,310,844,209	1704121284		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	NKPA Tertimbang	72	22	5.97		

Sumber : OM-SPAN 2025

Berdasarkan tabel III.24 pada Tahun 2025 terlihat bahwa nilai IKPA untuk penyerapan anggaran mendapat nilai 100. Berdasarkan Surat dari Kepala KPPN Makassar II Nomor S-792/KPN.2502/2025 tanggal 28 Mei 2025 Hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025 untuk indikator penyerapan anggaran mendapat ketentuan penyesuaian yakni pemberian ambang batas toleransi (threshold) realisasi pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, batas threshold triwulan III belanja pegawai (51) yakni 10%, belanja barang (52) yakni 5% dan belanja modal (53) yakni 10%. Tidak ada threshold untuk triwulan IV namun realisasi anggaran untuk setiap jenis belanja telah mencapai target.

4) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja :

a. Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN. Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I adalah kontrak belanja barang/modal dengan nilai di atas Rp50 juta. Poin yang diberikan untuk kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan

disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (kontrak dini) adalah sebesar 120. Poin yang diberikan untuk data kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 110.

b. Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian kontrak belanja modal terhadap seluruh data kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN. Penyelesaian kontrak belanja modal yang dimaksud adalah penyelesaian pembayaran atas belanja modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas sampai dengan Rp200 juta. Penyelesaian pembayaran yang dimaksud mengacu pada tanggal SP2D.

Poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian kontrak belanja modal yakni :

- 1) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100;
- 2) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90;
- 3) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80; dan
- 4) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 70.

c. Komponen distribusi akselerasi kontrak (bobot 20%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai

sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap data perjanjian/kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II yakni :

- 1) Rasio >75% (nilai 100)
- 2) 50,01%<Rasio<=75% (nilai 80)
- 3) 25,01%<Rasio<=50% (nilai 60)
- 4) 0,01%<Rasio<=25% (nilai 50)
- 5) Rasio = 0% (nilai 0)

Nilai Belanja Kontraktual BBKK Makassar tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 100.

Tabel III.25 Parameter Belanja Kontraktual
BBKK Makassar Tahun 2025

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak			Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
					Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak SMT I	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak TW I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
1	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	01	7	12	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
2	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	02	7	12	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
3	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	03	7	12	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
4	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	04	7	12	100.00	5	2	112.86	0	0	0.00	100.00
5	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	05	9	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
6	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	06	9	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
7	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	07	10	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
8	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	08	10	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
9	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	09	12	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
10	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	10	12	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
11	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	11	13	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00
12	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	12	13	12	100.00	5	2	112.86	1	0	90.00	100.00

Sumber : OM-SPAN 2025

Pada bulan Desember 2025, terbit surat penyampaian dari KPPN Makassar II bahwa dalam rangka menerapkan prinsip *fairness treatment* dalam

penilaian IKPA, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA yaitu seluruh pengadaan yang dilaksanakan melalui Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC) dan dibayarkan menggunakan LS Kontraktual periode Triwulan IV 2025 tidak menjadi objek penilaian pada Indikator Belanja Kontraktual. Berdasarkan surat tersebut sehingga nilai IKPA untuk indikator belanja kontraktual BBKK Makassar tahun 2025 mendapat nilai 100.

5) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada Satker. Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Nilai Penyelesaian tagihan Triwulan III Tahun 2025 pada aplikasi OM SPAN 100, artinya seluruh SPM LS kontraktual disampaikan dengan tepat waktu ke KPPN.

6) Pengelolaan UP/TUP

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu Pertanggungjawaban UP (GUP) dan Pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai dari komponen :

a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%)

Dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari selain PNBK. Pengelolaan UP dan TUP

Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja :

- (1) Ketepatan waktu (bobot 50%)
- (2) Persentase GUP disebulankan (25%)
- (3) Setoran TUP (25%)

b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%)

Dihitung untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

Nilai Pengelolaan UP/TUP BBKK Makassar Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mendapat nilai 100.

7) Dispensasi SPM

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Indikator dispensasi SPM ini mengalami reformulasi untuk penilaian IKPA tahun 2024, dimana sebelumnya menjadi salah satu indikator yang memiliki bobot 5%, sekarang dihitung diluar komponen nilai IKPA yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.

Pengurangan nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensai SPM sebagai berikut :

- a. Kategori 1 : 0,00 (tidak ada dispensasi SPM) pengurangan nilai 0
- b. Kategori 2 : 0,01 - 0,099 pengurangan 0,25
- c. Kategori 3 : 0,1 – 0,99 pengurangan 0,50
- d. Kategori 4 : 1 – 4,99 pengurangan 0,75
- e. Kategori 5 : $\geq 5,00$ pengurangan 1,00

Hingga tahun 2025 tidak ada dispensasi SPM, sehingga nilai IKPA sesuai dengan bobot nilai tiap indikator.

8) Capaian Output

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada Satker. Capaian Output dihitung berdasarkan Nilai Kinerja :

a. Komponen Ketepatan Waktu (30%)

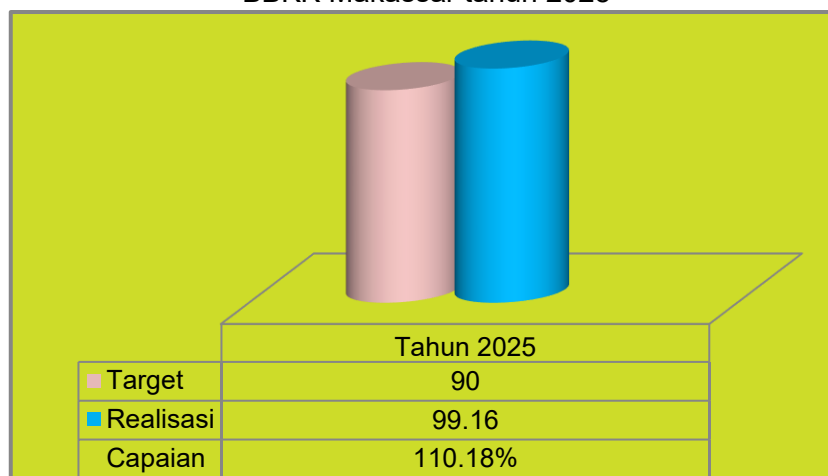
Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu ada sebesar 100 dan yang terlambat adalah sebesar 0.

b. Komponen Capaian RO (70%)

Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Ketentuan target capaian RO adalah periode Januari – November berdasarkan target progress capaian RO (TPCRO), periode Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA dan apabila pada periode Januari – November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status terkonfirmasi.

Nilai Capaian output Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM SPAN adalah sebesar 100.

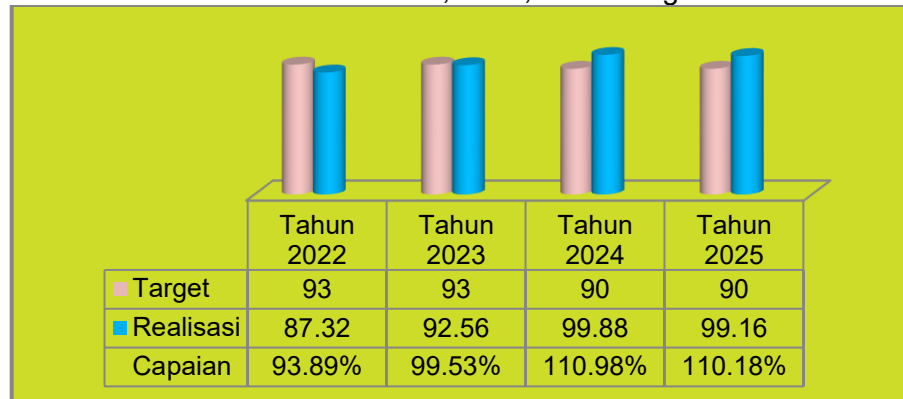
Grafik III.15 Perbandingan target dan realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar tahun 2025



Dari grafik III.15 terlihat indikator IKPA dengan realisasi sebesar 99,16 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 90. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu maksimalnya nilai untuk parameter IKPA yaitu : Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan capaian output. Terdapat 1 parameter yang tidak bernilai maksimal yaitu Deviasi Halaman III DIPA. Nilai deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN adalah 94,43. Indikator deviasi Halaman III DIPA mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 tahun 2022 ke tahun 2025, yakni deviasi bulanan semula dihitung hanya berdasarkan rata-rata per jenis belanja menjadi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja. Selain itu, bobot penilaian IKPA untuk deviasi halaman III DIPA dari 10% menjadi 15%. Nilai akhir % rata-rata deviasi kumulatif BBKK Makassar Tahun 2025 yakni 5,57% (diatas 5%) sehingga nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA adalah 100 - 5,57 menjadi 94,43.

Perbandingan realisasi indikator ke-5 BBKK Makassar tahun 2022 sd Tahun 2025 dapat dilihat dalam grafik III.16

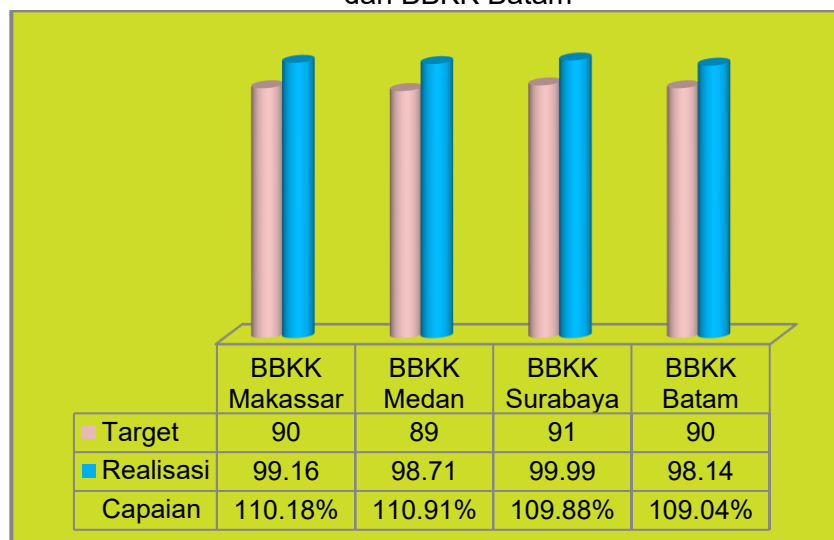
Grafik III.16 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5
BBKK Makassar tahun 2022, 2023, 2024 dengan Tahun 2025



Grafik III.16 terlihat untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator ke-5 tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2022 dan 2023 terdapat 8 parameter perhitungan yang sama dalam penentuan nilai IKPA yaitu revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

Tahun 2023 realisasi tidak tercapai karena terdapat 4 parameter yang tidak terealisasi secara maksimal yaitu Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP/TUP, sehingga realisasi hanya bernilai 92,56 mengakibatkan capaian menjadi 99,53%. Melihat realisasi yang tidak tercapai selama tahun 2022 dan 2023, sehingga pada tahun 2024 target diturunkan menjadi 90. Untuk tahun 2024 mencapai nilai 99,88, sehingga ditetapkan target yang sama untuk tahun 2025. Tahun 2025 melebihi target yang telah ditentukan, namun terdapat 1 parameter yang tidak mencapai nilai maksimal.

Grafik III.17 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 Tahun 2025
BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya,
dan BBKK Batam



Grafik III.17 menggambarkan seluruh BBKK mencapai target, BBKK Surabaya dengan nilai realisasi tertinggi, namun capaian tertinggi pada BBKK Medan karena target yang ditetapkan oleh BBKK Medan paling kecil di banding dengan BBKK lain. Untuk BBKK Makassar menetapkan target sama dengan BBKK Batam, namun BBKK Makassar memperoleh nilai IKPA lebih tinggi dari BBKK Batam. Hal tersebut tersebut karena adanya strategi dan kolaborasi yang mendukung terealisasinya parameter IKPA sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala;
- 2) Memonitoring masing-masing kegiatan yang mendukung nilai parameter pendukung IKPA sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
- 2) Maksimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Untuk deviasi halaman III DIPA di IKPA tidak bernilai maksimal hanya bernilai 94,43 Nilai Halaman III DIPA belum mencapai 100 disebabkan adanya perubahan perencanaan pelaksanaan anggaran pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Pada bulan September 2025 dilakukan optimalisasi PNBPN dengan penambahan belanja yang bersumber dari dana PNBPN, antara lain untuk pengadaan alat olah data berupa laptop dan PC.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2025 dilakukan revisi Halaman III DIPA Triwulan IV sesuai jadwal. Proses revisi ini mengunci Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Dalam perencanaan awal, seluruh belanja modal hasil optimalisasi PNBPN direncanakan dapat direalisasikan secara penuh pada bulan November 2025.

Namun demikian, dalam proses pengadaan alat olah data terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan. Untuk memaksimalkan realisasi anggaran agar sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan, dilakukan revisi kembali dengan mengusulkan pengadaan barang lain berupa alat kesehatan. Usulan pengadaan alat kesehatan tersebut memerlukan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Fasyankes), sehingga membutuhkan waktu proses tambahan.

Selain itu, penyedia barang tidak menyanggupi untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan, termasuk proses pencairan anggaran, dalam bulan November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi belanja modal yang semula direncanakan habis pada bulan November tidak dapat sepenuhnya terealisasi sesuai RPD. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya deviasi pada Halaman III DIPA sehingga nilainya belum mencapai 100.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sesuai bobot target pencapaian nilai IKPA masing-masing parameter.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(26.771.546.000 \times 1,10) - 26.740.212.734}{26.771.546.000 \times 1,10} \times 100\%$$

$$E = 9,35\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{9,35}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 73,36\%$$

Untuk indikator 5 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.771.546.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.740.212.734,- serta capaian indikator sebesar 110,18%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,35%. Dari efisiensi sebesar 9,35% sehingga diperoleh nilai efisiensi 73,36%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Koordinasi dan komunikasi yang intens antar timker dan subbag adum untuk memastikan progres pelaksanaan setiap kegiatan baik volume maupun progres keuangan sehingga dapat mengefisienkan sumber daya yang ada.
- 2) Penunjukan petugas khusus untuk konsultasi permasalahan di KPPN per satuan kerja sangat memudahkan untuk melakukan konsultasi kapan dan dimana saja melalui media komunikasi tercepat seperti WA dan telepon.
- 3) Aplikasi D'Tawang untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungjawaban keuangan di BBKK Makassar.
- 4) Aplikasi Sitopeng memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Berisi spreadsheet monitoring dan penyimpanan file google drive data arsip pengadaan. Dengan adanya monitoring pengadaan sehingga dapat menjadi warning/alarm apabila terdapat belanja kontraktual yang harus segera dilapor kontrak ke KPPN sehingga tidak terlambat untuk dilaporkan. Selain itu memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memonitor proses pengadaan hingga pencairan anggarannya.

6. INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Target nilai WBK untuk BBKK Makassar tahun 2025 sebesar 81.

a. Pengertian

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil dengan kriteria sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT
1. Pengungkit	60,00
a) Pemenuhan	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00
- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
- Pokja VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
b) Reform	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00
- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
- Pokja VI: Peningkatan Kualitas	5,00

Pelayanan Publik

2. Hasil	40,00
a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50
- Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50
- Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
b) Pelayanan Publik yang Prima	17,50
Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50

Adapun pengukuran capaian indikator Kinerja Implementasi WBK Satker ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2025 diambil berdasarkan Hasil Desk Reviu Implementasi WBK Satker UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desk Reviu Kinerja Indikator "Implementasi WBK Satker" di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025. yang dilaksanakan pada tanggal 27-31 Oktober 2025. Hasil reviu untuk satker BBKK Makassar sebesar nilai 88,99.

Adapun nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2025 dapat dijelaskan sesuai dengan nilai pemenuhan dan reform pada tabel III.26 berikut ini :

Tabel III.26 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Triwulan III Tahun 2025

No.	MATERI	NILAI MAKSIMAL	NILAI PEROLEHAN	%	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	60.00	54.09	90.14	
A.	Aspek Pemenuhan	30.00	26.38	87.93	
1	Manajemen Perubahan	4.00	3.77	94.16	
2	Penataan Tatalaksana	3.50	2.29	65.48	
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5.00	4.59	91.72	
4	Penguatan Akuntabilitas	5.00	5.00	100.00	
5	Penguatan Pengawasan	7.50	5.73	76.46	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	5.00	100.00	
B.	Aspek Reform	30.00	27.71	92.36	
1	Manajemen Perubahan	4.00	3.58	89.58	
2	Penataan Tatalaksana	3.50	3.00	85.71	
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5.00	4.25	85.00	
4	Penguatan Akuntabilitas	5.00	5.00	100.00	
5	Penguatan Pengawasan	7.50	6.88	91.67	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	5.00	100.00	
II	KOMPONEN HASIL	40.00	34.90	87.25	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22.50	20.07	89.19	
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.50	16.32	93.25	
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	3.75	75.00	
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50	14.83	84.75	
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17.50	14.83	84.75	
TOTAL NILAI		100.00	88.99	88.99	

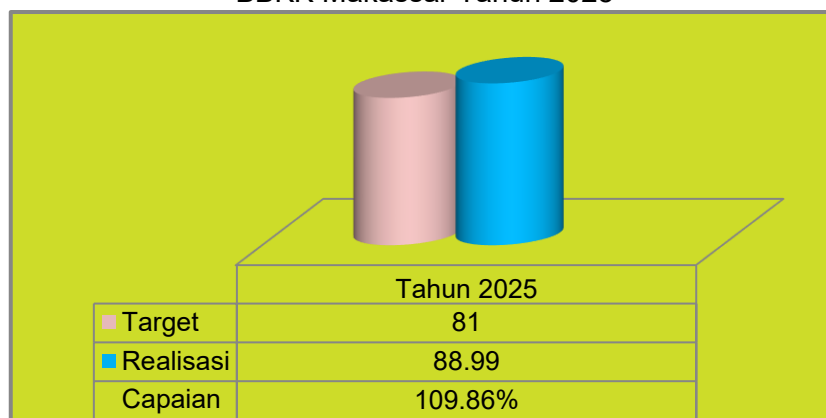
Dari tabel III.26 dapat diperoleh realisasi nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 88,99, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{88,99}{81} \times 100\%$$

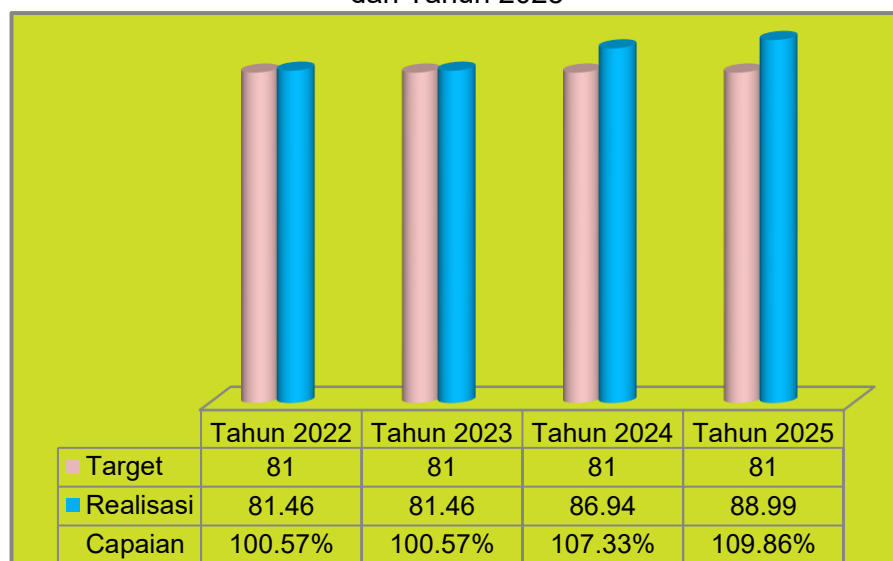
$$\text{Persentase Capaian} = 109,86\%$$

Grafik III.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2025



Grafik III.18 terlihat indikator ini terealisasi dengan realisasi nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2025 adalah sebesar 89,99 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 81. Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2025 diperoleh dari hasil Desk Reviu Kinerja Indikator "Implementasi WBK Satker" di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 27-31 Oktober 2025.

Grafik III.19 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025



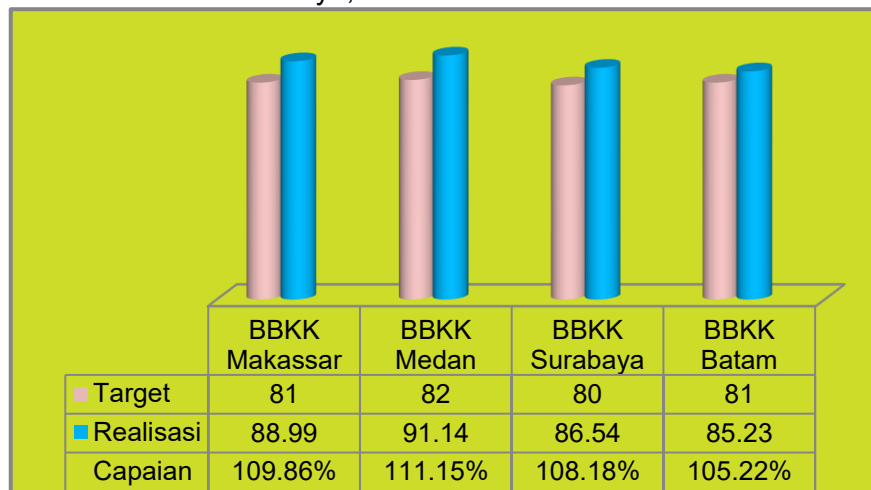
Grafik III.19 menggambarkan bahwa untuk tahun 2022-Triwulan III Tahun 2025 realisasi indikator berada di atas target yang telah

ditentukan. Untuk tahun 2020 implementasi WBK dijadikan sebagai salah satu indikator capaian kinerja, BBKK Makassar melalui berbagai tahap mulai dari pendampingan, pengawasan, *self assesment*, *pre assessment* sampai ke tahap Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI berhasil meraih predikat menuju WBK satker dengan nilai 81,46 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6590/2020. Dari nilai tersebut melampaui target indikator yang ditetapkan. Nilai ini masih dijadikan sebagai dasar penilaian indikator keenam pada tahun 2022. Namun pada tahun 2022 target ditingkatkan sebesar 81, merujuk dari realisasi pada tahun 2021, begitu pula dengan target pada tahun 2023 yang masih sebesar 81 dengan realisasi sebesar 81,46 berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Desk Tim Eselon I Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Pada Tanggal 29 November 2023. Untuk tahun 2024 berlanjut dengan diusulkannya BBKK Makassar menjadi satker berpredikat WBK Nasional. Untuk hal tersebut dibutuhkan pendampingan dari Tim Itjen dan P2P Kemenkes. Pada tanggal 13 Juni 2024 dilaksanakan *assessment* oleh Tim Itjen Kemenkes sehingga memperoleh nilai sebesar 82,19. Dan pada tanggal 22-25 Juli 2024 diadakan *assessment* penilaian oleh TPI Kemenkes RI sehingga diperoleh nilai 86,94. Dari nilai tersebut merupakan proses BBKK Makassar menuju WBK berpredikat nasional di tahun 2024, selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB yaitu pada tanggal 07 Oktober 2024 untuk sesi wawancara yang dilakukan secara virtual dan pada tanggal 07 November 2024 dilaksanakan verifikasi faktual dan peninjauan lapangan. Pada tanggal 10 Desember 2024 di Jakarta pada acara “satu dekade zona integritas dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024” BBKK Makassar memperoleh penghargaan satuan kerja berpredikat WBK Nasional dan WBK Kawasan khusus Kawasan Pelabuhan.

Untuk tahun 2025, penilaian implementasi WBK satker dilakukan oleh Tim Desk Reviu Kinerja Indikator “Implementasi WBK Satker” di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 pada

tanggal 27-31 Oktober 2025. Nilai BBKK Makassar sebesar 88,99. Nilai ini memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai satuan kerja menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Grafik III.20 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Batam Tahun 2025



Dari grafik III.20 terlihat dari keempat BBKK realisasi terbesar berada di BBKK Medan, selanjutnya BBKK Makassar diurutan kedua. Untuk target, BBKK Makassar sama dengan BBKK Batam sebesar 81, BBKK Surabaya target 80 dan BBKK Medan dengan target 82. Dari hasil penetapan target dan realisasi terlihat bahwa capaian tertinggi berada di BBKK Medan.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan, yang secara konsisten menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas
- 2) Kontribusi masing-masing kelompok kerja yang telah ditetapkan di dalam SK Kepala BBKK Makassar tentang Pembangunan Zona Integritas
- 3) Keikutsertaan seluruh pegawai, baik itu ASN maupun PPNP dalam mewujudkan pembangunan zona integritas

- 4) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga pembangunan zona integritas dapat berjalan secara berkesinambungan
- 5) Pendampingan dari Tim P2P dan Tim Itjen Kemenkes untuk pembangunan zona integritas
- 6) Dukungan lintas sektor yang sangat antusias dalam mewujudkan zona integritas
- 7) Pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan dan bandara yang menjadikan motivasi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas di BBKK Makassar

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Pengembangan inovasi dengan menggunakan sistem IT yang membutuhkan anggaran khusus dalam pengembangan tersebut
- 2) Standar inovasi yang ketat sehingga beberapa inovasi yang sudah digunakan baik dalam layanan public maupun dalam peningkatan kinerja tidak mendapatkan pengakuan dari Unit Utama.
- 3) Regulasi dari lintas sektor yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BBKK Makassar yang kadang berubah tanpa adanya sosialisasi kepada pengguna jasa.
- 4) Belum ada menu rincian output (RO) kegiatan pembangunan zona integritas dalam petunjuk perencanaan Ditjen P2 sehingga tidak ada anggaran spesifik untuk mendukung pembangunan zona integritas.
- 5) Perubahan kebijakan tingkat nasional yang berdampak pada perubahan tata kelola organisasi dan kebijakan operasional ditingkat satuan kerja seperti perubahan nomenklatur, perubahan pakaian dinas, perubahan kebijakan layanan publik dalam tata kelola vaksinasi.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Perlu dianggarkan terkait pengembangan inovasi dalam mendukung sistem operasional perkantoran serta mendukung pelayanan kepada pengguna jasa BBKK Makassar

- 2) Perlu petunjuk teknis dalam penentuan standar inovasi layanan publik, sehingga satker dapat menciptakan inovasi mengacu pada standar yang ditetapkan
- 3) Perlu adanya komitmen dan sosialisasi terhadap regulasi yang diterbitkan, sehingga tidak ada benturan terhadap pengguna layanan.
- 4) Sosialisasi tentang standar inovasi yang dapat diakui oleh Unit Utama atau Kementerian/Lembaga yang berkompeten

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(5.994.000 \times 1,10) - 5.983.305}{5.994.000 \times 1,10} \times 100\%$$

$$E = 9,14\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{9,14}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 72,84\%$$

Untuk indikator 6 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.994.000,- dan realisasi anggaran Rp. 5.983.305,- serta capaian indikator sebesar

109,86%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,14% dan nilai efisiensi sebesar 72,84%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

Adanya pengembangan inovasi aplikasi Simpelta, Siska, Sehat Care, M-EFR, D'Tawang, SiTopeng, Pasolle, Vision, Si Valid ICV, dan Telponma' serta saluran pengaduan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan dari BBKK Makassar.

7. INDIKATOR KETUJUH

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN dalam peningkatan kapasitasnya. Untuk tahun 2025 target untuk persentase ASN yang ditingkatkan komepetensinya sebesar 90%.

a. Pengertian

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN yang telah melaksanakan peningkatan kapasitas sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran yang disingkat menjadi JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

b. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan pada tingkat instansi maupun nasional.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya} \\ \text{Sebanyak Paling Sedikit} \\ \text{20 Jam Pelajaran}}{\text{Jumlah Seluruh ASN} \\ \text{KKP Kelas I Makassar}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator ketujuh ini yaitu persentase realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi dengan persentase target indikator ketujuh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Jumlah ASN} \\ \text{yang Ditingkatkan} \\ \text{Kompetensinya} \\ \text{Sebanyak Paling Sedikit} \\ \text{20 Jam Pelajaran}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada tabel III.27 di bawah ini dijabarkan jumlah ASN BBKK Makassar yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran pada Tahun 2025.

Tabel III.27 Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan
Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 (Dua Puluh)
Jam Pelajaran Tahun 2025

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi											Jumlah JP
		Tugas Belajar	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Seminar/ Konferensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning	Komunitas Belajar	
1	Dra. AISYAH SUFRIE, MSc. PH	0	0	0	0	2	0	0	0	0	41	0	43
2	HASTAWAVIA, SKM	0	0	0	0	6	0	0	0	0	21	0	27
3	dr. HJ. JUNIARTY NAIM, M.K.M	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
4	dr. HJ. TRI HANDAYANI NAIM	0	0	0	0	15	0	0	0	0	7	0	22
5	YUSFANDIAR	0	0	0	0	17	0	0	0	0	8	0	25
6	SYAHRUL, ST	0	0	36	0	12	10	0	0	0	0	0	58
7	HJ. MASRIANI, S.Kep, Ns	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
8	KARYADI EKA PUTRA, SKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
9	H. RIDWAN, SKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10	YURIS ARTHA ROMBE ADA, S.K.M	0	0	7	0	0	0	0	0	0	21	0	28
11	H. RAJIMAN, AMd.KL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
12	AKBAR HAPID, S.Farm	0	0	53	0	0	0	0	0	0	24	0	77
13	MARIA VERONIKA AMBABUNGA, SKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
14	NUR SAID RAIS, S.K.M.	0	0	0	0	14	0	0	0	0	21	0	35
15	FATIMAHSARI, S.Tr.Kes	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
16	ASRI, AMK	0	0	16	0	6	0	0	0	0	0	0	22
17	AULIA MAGHFIRAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
18	URBA AMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
19	dr. WAHJU VIVA IRIANAWATI	0	0	0	0	7	0	0	0	0	13	0	20
20	EGO, SKM, M.Kes	0	0	0	0	0	14	0	0	0	19	0	33
21	H. ANDI ALI RESA, SKM, M.Kes	0	0	0	0	4	0	0	0	0	42	0	46
22	drg. ARIFA SETIANI THAMRIN, M.Kes	0	0	0	0	20	24	0	0	0	0	0	44
23	IBRAHIM, SKM, M.Kes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi											Jumlah JP
		Tugas Belajar	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Seminar/ Konferensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning	Komunitas Belajar	
24	HJ. NUR MAGFIRAH, SKM, M.Kes	0	0	0	0	11	0	0	0	0	19	0	30
25	H. TUBIANTO ANANG ZULFIKAR, SKM, M.Epid	0	0	63.3	0	4	0	0	0	0	19	36.5	122.8
26	H. NUR KAMAR, SKM, M.Kes	0	0	22	0	7	0	0	0	0	28	0	57
27	dr. HJ. FITRIAH	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
28	ABD. GANI BUATAN, SKM	0	0	7	0	11	2	0	0	0	21	0	41
29	ARNI ANGRIANY AMIR, ST	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	20
30	PATMAWATY, SE	0	0	0	0	8	0	0	0	0	14	0	22
31	HJ. SATRIANI, SKM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	21	0	23
32	HJ. DELIA ROSIDAH, SKM, M.Kes	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
33	dr. NAJRIAH NASIR	0	0	21	0	22	0	0	0	0	2	0	45
34	NINING AYU PURNAMA, S.Kom	0	0	0	0	26	16	0	16	0	74	0	132
35	AMRIANA AMIN, SE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	46	0	48
36	RINA VIRGIANA THAMRIN, S.Tr.KL	0	0	0	0	7	2	0	0	0	19	0	28
37	HARMAWAN, AMd.KL	0	0	0	0	45.8	0	0	0	0	10	0	55.8
38	ASTRI EKA WARDANI, AMd.Kep	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
39	HIDAYANI SUTARDI	0	0	22	0	7	0	0	0	0	13	0	42
40	Ns. AHMAD RUSIDANI	0	0	0	0	8.6	0	0	0	0	24	0	32.6
41	dr. MARSELINA SILI PAPU, MPH	0	0	0	0	11	0	0	0	0	15.3	0	26.3
42	NIRWAN, SKM, M.Kes	0	0	0	0	11	0	0	0	0	54	0	65
43	dr. RIDHA ILAHI	0	0	35	0	0	3.3	0	0	0	13	0	51.3
44	dr. HJ. RINI ASTUTY	0	0	0	0	9	7.5	0	0	0	5	0	21.5
45	Drs. S E R D I, SKM	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
46	dr. H. ABBAS ZAVEY NURDIN, Sp.Ok, MKK	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
47	MARDIYANA, SKM, M.Adm.Kes	0	0	0	0	2	0	0	0	0	26	0	28

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi											Jumlah JP
		Tugas Belajar	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Seminar/ Konferensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning	Komunitas Belajar	
48	HJ. ZAINAB, AMK	0	0	35	0	11	0	0	0	0	0	0	46
49	FAISAL, S. Kep ,Ners	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47
50	dr. HJ JUMARNI	0	0	35	0	4	0	0	0	0	0	0	39
51	dr. WAHYUDI	0	47	19	0	4	7.3	0	0	0	0	0	77.3
52	dr. KESIA PATONGLOAN	0	0	0	0	18	4	0	0	0	6	0	28
53	ANDI KUDRAT, SKM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	22	0	24
54	dr. RUSLAN	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
55	dr. ANDI PERTIWIKUSUMA	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
56	dr. ANDI IRFAN LATIF	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
57	MIRNAWATY, S.ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
58	SYAFRUDDIN, S.Kep, Ns, M.K.M	0	0	22	3	0	4	0	0	0	19	0	48
59	HASANUDDIN, AMd.Kep	0	0	22	0	0	0	0	0	0	14	0	36
60	YULIANA SIRAJUDDIN, AMAK	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	23.5	0	36
61	dr. BONITA SESHARIKA C	0	0	4	0	15	0	0	0	0	10	0	29
62	NURHAYATI HL, SKM	0	0	7	0	3	0	0	0	3	8	0	21
63	GERARDHA SUMALU, S.Kep	0	0	0	0	15	0	0	0	0	21	0	36
64	IRHAM, SKM	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27
65	SUARNI S, AMK	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
66	HILDA ADRIATI MALIK, SKM	0	0	7	0	12	6	0	0	3	35	0	63
67	H. AMIR, S.Kep., Ners.	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
68	RISKA, AMAK	0	0	31	0	9	0	0	0	0	0	0	40
69	DIAN PURNITA, SKM	0	0	31	0	3	0	0	0	3	14	0	51
70	ANUGRAYANTI, S.Tr.KL	0	0	28	0	7	0	0	0	0	6.7	0	41.7
71	H. CHANDRA WAHYUDDIN, AMK	0	0	35	0	3	0	0	0	0	0	0	38

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi										Jumlah JP	
		Tugas Belajar	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Seminar/ Konferensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning		Komunitas Belajar
72	H. WAHYUDI HIDAYAT, S.Kep, Ners, M.K.K.K	0	0	0	0	10	6.5	0	0	0	5.5	0	22
73	RENY MARLINA, S.Kep., Ners	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
74	HARINA, S.KM	0	0	0	0	9	0	0	0	3	20	0	32
75	DESI MARLINA, SKM	0	0	7	0	22.8	2	0	0	0	14	0	45.8
76	FATHUL JANNAH, AMd.Kep	0	0	10	0	13	7	0	0	0	0	0	30
77	ISMAINAR, AMK	0	0	0	0	13	5	0	0	0	3	0	21
78	SYAMSURI, AMd. Kep	0	0	0	0	27.3	0	0	0	0	0	0	27.3
79	SRI WAHZUNI, AMK	0	0	0	0	13	0	0	0	0	24	0	37
80	RISMA TANGNGA GULING, AMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
81	ADIL NIRWANDI	0	0	22	0	12	2	0	0	3	39	0	78
82	dr. ACHMAD FARCHANNY TRI ADRYANTO, MKM	0	0	0	0	11	2	0	0	0	26	0	39
83	dr. MUH. HASKAR HASAN, M.Kes	0	0	0	0	5.8	0	0	0	0	19	0	24.8
84	dr. NURLAILAH MUHYIDDIN	0	0	0	0	10	0	0	0	4	10	0	24
85	HJ. SITTI HAMDIA, SKM., M.Kes	0	0	2.5	0	6.8	4	0	0	0	24	0	37.3
86	H. ARHAM ALAM, S.Kep, Ners, M.KKK	0	18	23	0	16	0	0	0	0	29.5	0	86.5
87	SITTI RAHMATIA, SKM	0	0	0	0	7.5	0	0	0	3	10	0	20.5
88	MARYAM, S. Kep, Ns	0	0	0	0	6	0	0	0	0	14	0	20
89	IDIL RAKHMAN, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
90	HJ. DIANA ABDULLAH, S.Kep, Ns	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
91	HELPI SOPIAN MOKODOMPIT, SKM	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	26	0	28.5
92	RIZAL, SKM	0	0	0	0	12	0	0	0	7	2	0	21
93	H.MAHLI SUNUSI, SKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
94	HJ. FATMAWATI SALIM, SKM	0	0	0	0	3	2	0	0	0	16	0	21
95	YUSRAN, S.Kom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi											Jumlah JP
		Tugas Belajar	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Seminar/ Konferensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning	Komunitas Belajar	
96	NURHASNI, SKM	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24	0	27
97	ARFIANI, SKM	0	0	0	0	12	0	0	0	2	14	0	28
98	MUSDALIFA M, S.KM	0	0	0	0	6	0	0	0	3	22	0	31
99	HJ. MUTHMAINNAH, S.Kep., Ners.	0	0	0	0	8	0	0	0	4	13	0	25
100	HJ. FITRIANI JAYA, S.Kep, Ners	0	0	0	0	25.8	2	0	0	0	20	0	47.8
101	NURSAKTI SAPUTRA, A.Md.KL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	24	0	28
102	Ns. ILHAM, S.Kep.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	14	0	25
103	SAYDATURRIZKY, AMd.Ak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
104	SUHERMAN, AMK	0	0	0	0	5	0	0	0	0	21	0	26
105	SURAHMAN SYAM	0	65	0	0	5	2	0	0	0	18	0	90
106	dr. HJ. SRI APRIANITA	0	0	0	0	12	0	0	0	0	13	0	25
107	ABDUL RAHMAN MUSTAFA, SKM	0	0	0	0	8	0	0	0	3	10	0	21
108	NURDIANSAH SAHRIR, SKM	0	0	0	0	5	0	0	0	6	10	0	21
109	NASIRUDDIN, AMd.KL	0	0	0	0	9.8	0	0	0	6	10	0	25.8
110	KAIMUDDIN, S.Tr.KL	0	0	0	0	8	4	0	22	0	7	0	41
111	SYAHRIANTI SAID, S.ST	0	0	0	0	6	0	5.3	0	6	24	0	41.3
112	WALUYO, SKM	0	0	18	0	3	0	0	0	0	0	0	21
113	NASRULLAH, A.Md.Kep	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
114	ZULVITA AYSAH, AMd.KL	0	0	0	0	3	0	0	0	9	10	0	22
115	MELIYANA, A.Md. Keb	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
116	NURUL ATIKAH, A.Md.Keb.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
117	RENDI SUPRIADI SUTANTO, A.Md.Kes.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
118	AHMAD MUDHOFAR, A.Md.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	19	0	24
119	KIKI NIRMALA SARI, A.Md.Kes.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22

No	Nama	Jenis Peningkatan Kompetensi											Jumlah JP
		Tugas Belajar	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Seminar/ Konferensi	Workshop/Lokakarya	Kursus	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	e-Learning	Komunitas Belajar	
120	NURAFIFAH AZZAHRA, A.Md.Aktr.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	22
121	NURUL AULIYAH YUSUF, A.Md. Kes.	0	0	0	0	3	0	0	0	3	19	0	25
122	MIRNA	0	0	18	0	7	0	0	0	3	0	0	28
123	HISKIA OVIANA, S.Kep, Ns	0	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0	22
124	HJ. NURHAYATI M, SKM	0	0	876	0	6	0	0	0	0	10	36.5	928.5
125	WELLY RUMPAK, A.Md.Kom	0	0	0	0	2	0	0	0	2	25	0	29
126	HASRIANI RAJAB FATTAH, S.KM., M.Kes	0	0	24	0	6	0	0	0	0	40	0	70
127	PURNIMAH RAZAK, S.H	0	0	0	0	2	3	0	0	0	22	0	27
128	H. IMRAN, SH	0	0	33	0	2	0	0	0	0	0	0	35
129	DEWI RARA AMIATI, S.Sos., M.M.	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32
130	H. ABD. RAUF, AMK	0	0	5.3	0	6	0	0	0	0	12	0	23.3
131	AMRAN, SKM,M.kes	0	0	0	0	2	0	0	0	3	18	0	23
132	YUSRIANTO, SKM	0	14	0	0	12	3	0	0	0	25	0	54
133	MUHAMMAD HUSAIFAH, SAP, M.A.P	0	0	0	0	2	0	0	8	0	10	0	20
134	LUKAS TANDI PAYUNG	0	0	12	0	2	0	0	0	0	10	0	24
135	HAMKA	0	0	0	0	10.5	0	0	0	0	10	0	20.5
136	SRI WULANDARI	0	0	0	0	4	0	0	0	0	16	0	20
137	ABD WAHID DAUD	0	0	23	0	2	0	0	0	3	4	0	32
138	HAKIM, S.Sos	0	0	0	0	5	0	0	0	0	20	0	25
139	ARWIN AMIN, AMd.Kom	0	0	0	0	5	16	0	0	0	16	0	37
140	RAHMAWATI, S.K.M	0	0	0	0	6	16	0	0	0	14	0	36
141	CITRA LESTARI ZAHAR, A.Md.KL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
142	YONITHA PALIMBUNGA, AMd.Kep	0	0	35	0	6	0	0	0	0	10	0	51
Jumlah		30	144	2058	3	950,2	177	5,3	46	89	2269	73	5843,2

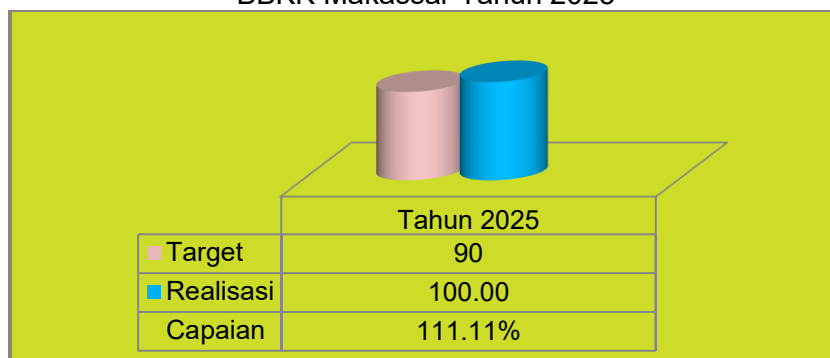
tabel III.27 di atas, diketahui bahwa jumlah ASN BBKK Makassar pada Tahun 2025 adalah sebanyak 142 orang dan seluruh ASN telah ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) JP. Dengan demikian persentase capaian indikator ketujuh dituangkan pada rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan} \\
 & \text{Kompetensinya} \\
 & \text{Sebanyak Paling Sedikit} \\
 & \text{20 Jam Pelajaran} \\
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Seluruh ASN}}{\text{KKP Kelas I Makassar}} \times 100\% \\
 \text{Persentase Realisasi} &= \frac{142}{142} \times 100\% \\
 \text{Persentase Realisasi} &= 100\%
 \end{aligned}$$

Setelah diperoleh hasil persentase dari pengukuran di atas, dapat diperoleh persentase capaian indikator ketujuh ini, dengan rumus sebagai berikut:

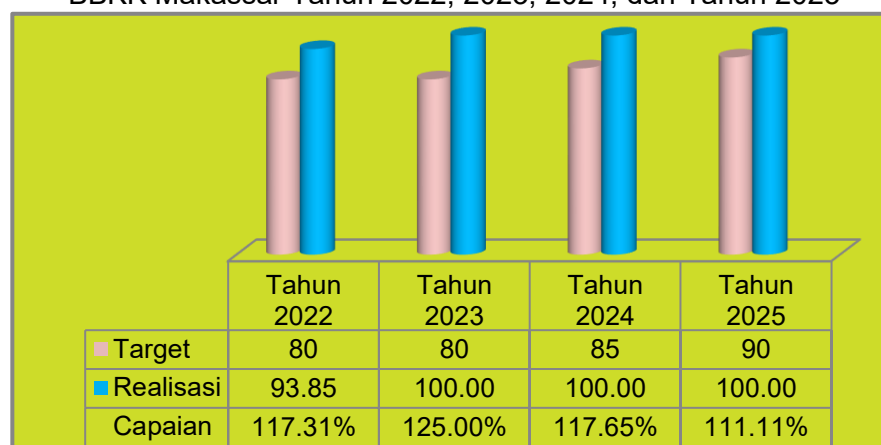
$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Realisasi Jumlah ASN} \\
 & \text{yang Ditingkatkan} \\
 & \text{Kompetensinya} \\
 & \text{Sebanyak Paling Sedikit} \\
 & \text{20 Jam Pelajaran} \\
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase Target Indikator}}{\text{Persentase Realisasi}} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\
 \text{Capaian} &= 111,11\%
 \end{aligned}$$

Grafik III.21 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-7
BBKK Makassar Tahun 2025



Dari grafik III.21 terlihat realisasi IKK belum mencapai target yang telah ditentukan. Peningkatan kapasitas pada tahun 2025 dilakukan dengan cara tatap muka dan dalam jaringan (daring). Informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sangat mudah diperoleh dan fleksibel untuk diikuti. Peningkatan kapasitas dengan daring masih menjadi keuntungan yang maksimal bagi ASN karena tanpa biaya pelaksanaan, kegiatan tersebut dapat diikuti. Untuk realisasi tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100%, maka di tahun 2025 targetnya ditingkatkan menjadi 90%. Untuk Tahun 2025 jumlah ASN yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JPL sebanyak 142 orang.

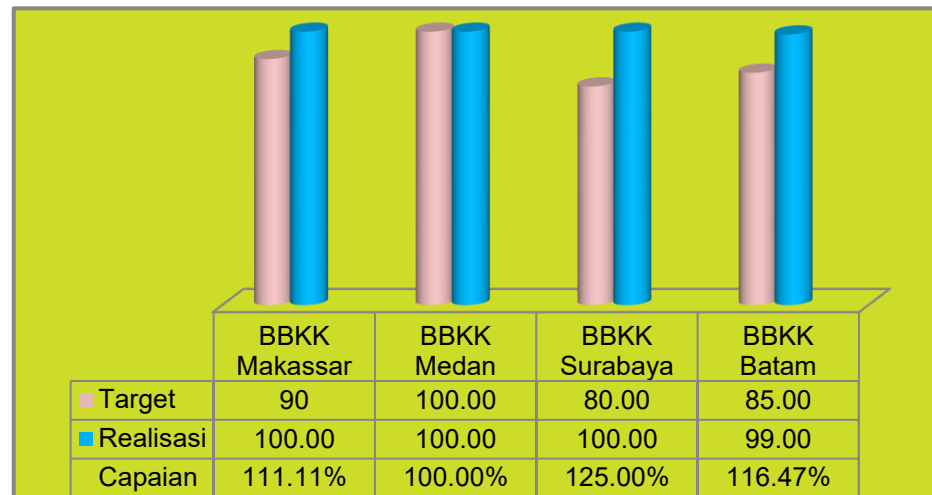
Grafik III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7
BBKK Makassar Tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025



Dari grafik III.22 terlihat target untuk tahun 2025 naik dibanding target 2024, karena realisasi di tahun 2024 yang bernilai 100%. Untuk Tahun

2025 sudah terealisasi sebesar 100% atau 142 orang ASN telah mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JPL.

Grafik III.23 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya dan BBKK Batam
Tahun 2025



Berdasarkan Grafik III.23 terlihat bahwa 3 BKK terealisasi 100%, dan BBKK Batam yang hanya terealisasi 99%. Namun capaian tertinggi di BBKK Surabaya karena paling rendah dalam menetapkan target. Peningkatan kapasitas ASN sangat fleksibel dapat dilakukan secara daring tanpa menggunakan anggaran, sehingga realisasi tercapainya kegiatan ini sangat maksimal.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk peningkatan kapasitas ASN sangat mendukung;
- 2) Informasi yang diperoleh terkait peningkatan kapasitas sangat mudah didapatkan, baik melalui undangan secara *online*, via email kantor, WA grup sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN;
- 3) ASN BBKK Makassar sebagian besar adalah pejabat fungsional tertentu sehingga membutuhkan angka kredit dalam peningkatan kompetensi.

- 4) Peningkatan kapasitas ASN mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Kepala Kantor dengan Pejabat Eselon I.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Peningkatan kapasitas ASN via online mempunyai kelemahan karena peserta Webinar yang cukup banyak, dengan keterbatasan jaringan sehingga kadang materi yang disampaikan kurang maksimal dipahami oleh peserta Webinar
- 2) Distribusi ASN dalam peningkatan kapasitas belum merata.
- 3) Peningkatan kapasitas ASN kebanyakan dari bagian teknis, sehingga kadang peningkatan kapasitas yang diikuti tidak relevan dengan kompetensi ASN tersebut

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Peningkatan kapasitas ASN secara online dapat dibuat secara bergelombang, sehingga optimalisasi pelaksanaan peningkatan kapasitas via online dapat lebih maksimal;
- 2) Usulan peningkatan kapasitas ASN substansi harus dibuat secara berkala dan dibuatkan TNA, sehingga peningkatan kapasitas dapat merata untuk setiap ASN.
- 3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas ASN terkait kompetensi jabatan masing-masing ASN.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(43.357.000 \times 1,11) - 42.838.289}{43.357.000 \times 1,11} \times 100\%$$

$$E = 11,08\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{11,08}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 77,69\%$$

Untuk indikator 7 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.357.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.838.289,- serta capaian indikator sebesar 111,11%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,08%, sehingga nilai efisiensinya 77,69%. Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan.
- 2) Mengikuti peningkatan kapasitas yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan LMS

8. Indikator Kedelapan

Persentase Realisasi Anggaran

Target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96%.

a. Pengertian

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan

realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

b. Definisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

Persentase realisasi anggaran BBKK Makassar Tahun 2025 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran persentase realisasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja dibagi dengan jumlah keseluruhan pagu anggaran dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator kedelapan ini yaitu persentase realisasi anggaran dibagi dengan persentase target indikator kedelapan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada pengukuran kinerja indikator kedelapan, Persentase Realisasi Anggaran diambil dari Aplikasi OM SPAN Kemenkeu RI, sebagaimana dalam *screenshot* gambar III.5 di bawah ini :

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	024-416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	PAGU	20,515,595,000	12,077,512,000	1,792,481,000	0	0	0	0	0	0	34,385,588,000
				REALISASI	20,494,547,223	6,310,844,209	1,704,121,284	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28,509,512,716
				PERSENTASE	(99.90%)	(52.25%)	(95.07%)							(82.91%)
				SISA	21,047,777	5,766,667,791	88,359,716	0	0	0	0	0	0	5,876,075,284
				TOTAL	20,515,595,000	12,077,512,000	1,792,481,000	0	0	0	0	0	0	34,385,588,000
				REALISASI	20,494,547,223	6,310,844,209	1,704,121,284	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28,509,512,716
				PERSENTASE	(99.90%)	(52.25%)	(95.07%)							(82.91%)
				SISA	21,047,777	5,766,667,791	88,359,716	0	0	0	0	0	0	5,876,075,284

Gambar III.5 Screenshot Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 BBKK Makassar

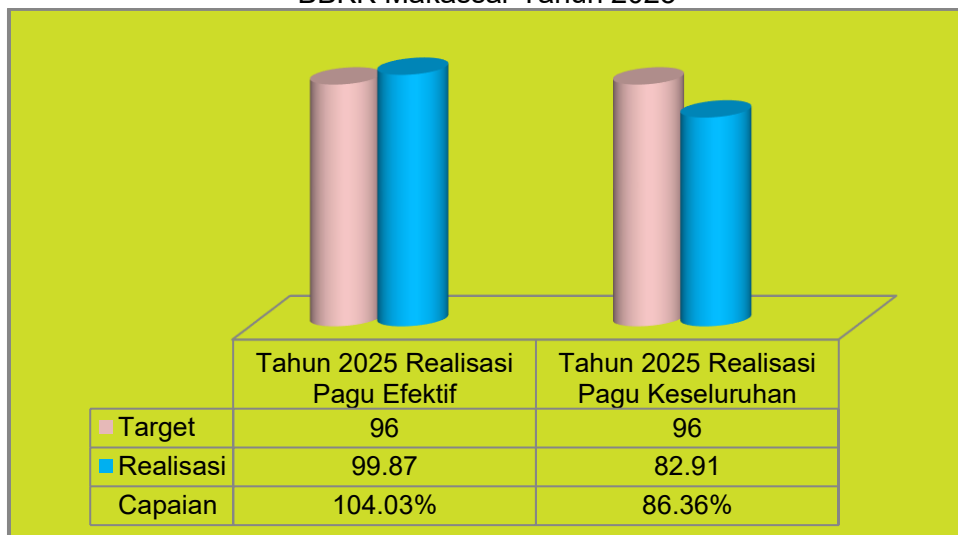
Berdasarkan gambar III.3 di atas, realisasi anggaran BBKK Makassar Tahun 2025 sebesar 82,91%, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{82,91\%}{96\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 86,36\%$$

Grafik III.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar Tahun 2025

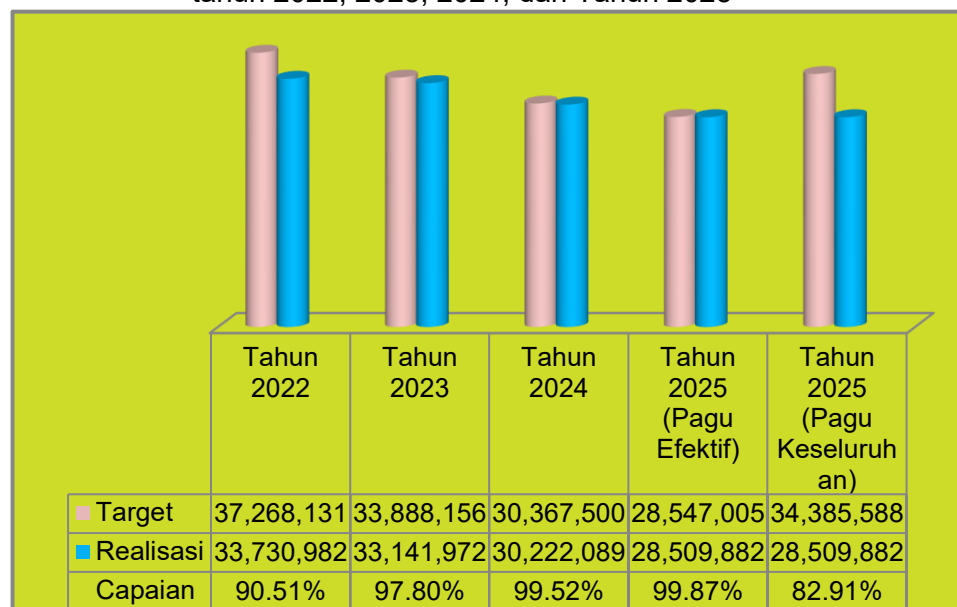


Dari grafik III.24 terlihat Realisasi anggaran sebesar 82,91% dengan target sebesar 96% dengan menggunakan pagu keseluruhan. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak

berjalan sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diatur kembali sesuai dengan anggaran yang masih bisa digunakan.

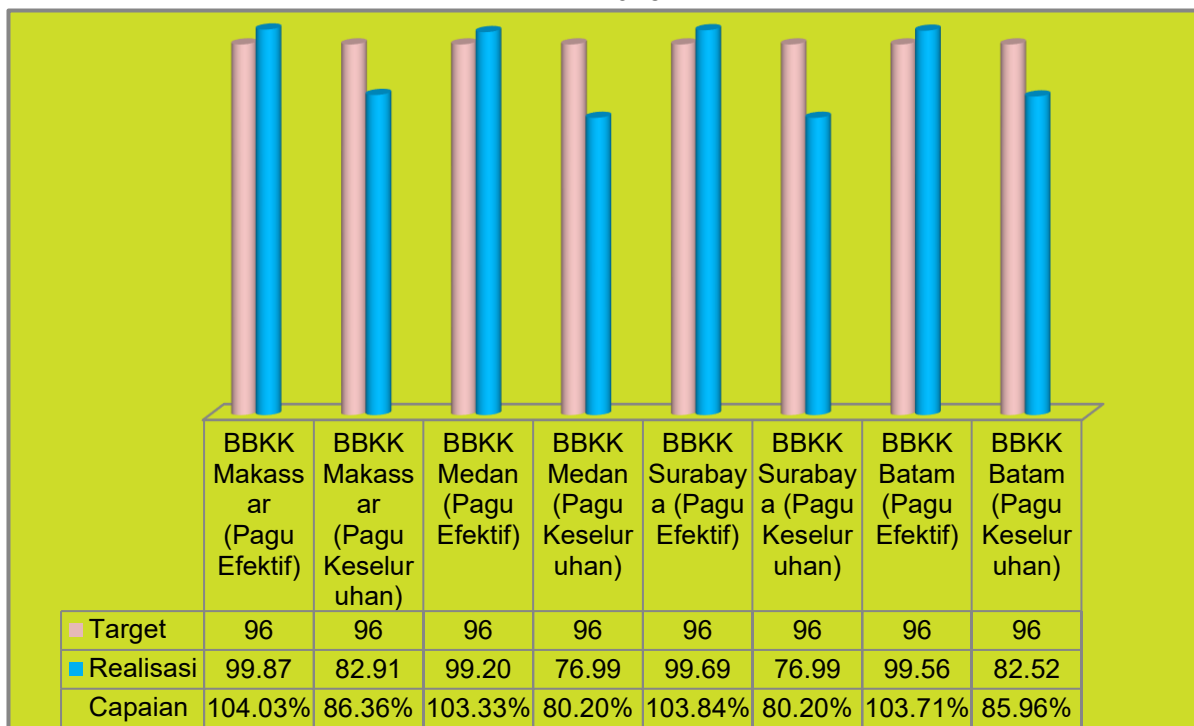
Untuk pagu efektif, realisasi anggaran melampaui target yang ditetapkan sebesar 99,87%. Seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan anggaran yang ada, sehingga serapan anggaran dapat bernilai maksimal.

Grafik III.25 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Pagu Anggaran BBKK Makassar tahun 2022, 2023, 2024, dan Tahun 2025



Dari grafik III.25 dapat dilihat realisasi anggaran terbesar pada tahun 2025 dengan menggunakan pagu efektif. Target untuk tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Realisasi rendah dengan menggunakan pagu keseluruhan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang diblokir untuk penggunaan anggarannya.

Grafik III.26 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya dan BBKK Batam
Tahun 2025



Berdasarkan Grafik III.26 terlihat bahwa realisasi terbesar terdapat di BBKK Makassar untuk pagu efektif yaitu sebesar 99,87% disusul BBKK Surabaya, Batam, dan Medan. Untuk penggunaan pagu keseluruhan tertinggi realisasi pada BBKK Makassar sebesar 82,91% disusul BBKK Batam, untuk BBKK Surabaya dan Medan sama realisasi di angka 76,99%.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dukungan anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Dukungan lintas sektor dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.

3) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD

f. Masalah yang dihadapi

Adanya kebijakan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga terhadap APBN, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang diblokir penggunaan anggarannya, sehingga beberapa kegiatan berjalan tidak sesuai dengan RPK dan RPD.

g. Usul pemecahan masalah

Melakukan revisi terhadap RPK dan RPD yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan anggaran yang bisa digunakan.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(28.547.005.000 \times 1,04) - 28.509.882.760}{28.547.005.000 \times 1,04} \times 100\%$$

$$E = 4\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 60,00\%$$

Untuk indikator 8 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.547.005.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.509.882.760,- serta capaian indikator sebesar 104,03%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4%, sehingga nilai efisiensinya 60%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara parallel, sehingga terdapat efisiensi anggaran.
- 2) Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan dan biaya perjalanan dinas.
- 3) Terdapat sarana dan prasarana pendukung yang membantu dalam pengawasan pelaku perjalanan.
- 4) Penerapan aplikasi online dalam penerbitan dokumen kesehatan, sehingga mempersingkat waktu dan menyederhanakan alur pelayanan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel III.28 di bawah ini.

Tabel III.28 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rupiah Murni (RM)	31.157.790.000	26.564.817.282	85,26
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.227.798.000	1.945.065.478	60,26
	Total	34.385.588.000	28.509.882.760	82,91

2. Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel III.29 di bawah ini.

Tabel III.29 Realisasi Anggaran Pagu Keseluruhan
Berdasarkan Jenis Belanja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	20.515.595.000	20.494.547.223	99,90
2	Belanja Barang	12.077.512.000	6.311.214.253	52,25
3	Belanja Modal	1.792.481.000	1.704.121.284	95,07
	Total	34.385.588.000	28.509.882.760	82,91

Tabel III.30 Realisasi Anggaran Pagu Efektif
Berdasarkan Jenis Belanja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	20.515.595.000	20.494.547.223	99,90%
2	Belanja Barang	6.325.789.000	6.311.214.253	99,77%
3	Belanja Modal	1.705.621.000	1.704.121.284	99,91%
	Total	28.547.005.000	28.509.882.760	99,87%

3. Berdasarkan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dapat dilihat dalam tabel III.31 dan Tabel III.32

Tabel III.31 Realisasi Anggaran Pagu Keseluruhan berdasarkan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO) Kegiatan
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
BBKK Makassar				34,385,588,000	28,509,882,760	82.91%
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			7,685,986,000	3,504,646,242	45.60%
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			7,685,986,000	3,504,646,242	45.60%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
4249.PEA	Koordinasi [Base Line]	17	kegiatan	210,211,000	8,110,000	3.86%
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	17	kegiatan	210,211,000	8,110,000	3.86%
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat [Base Line]	37	Orang	24,770,000	-	0.00%
4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS-29)	37	Orang	24,770,000	-	0.00%
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya [Base Line]	1802	layanan	3,779,118,000	1,632,996,262	43.21%
4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	10	layanan	267,560,000	90,826,140	33.95%
4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	67	layanan	996,376,000	399,930,522	40.14%
4249.QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)	240	layanan	140,400,000	60,860,000	43.35%
4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	104	layanan	127,504,000	4,841,000	3.80%
4249.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	138	layanan	404,478,000	5,610,000	1.39%
4249.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare (HS-29)	180	layanan	86,760,000	10,115,000	11.66%
4249.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	480	layanan	172,800,000	27,200,000	15.74%
4249.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria (HS-29)	54	layanan	92,880,000	15,300,000	16.47%
4249.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare (HS-29)	360	layanan	190,800,000	30,515,000	15.99%
4249.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS (HS-29)	35	layanan	45,990,000	1,516,000	3.30%
4249.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TBC (HS-29)	14	layanan	76,370,000	1,176,000	1.54%
4249.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (HS-29)	60	layanan	58,200,000	8,500,000	14.60%
4249.QAH.U25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I (layanan)	30	layanan	585,000,000	532,428,000	91.01%
4249.QAH.U28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I (layanan)	30	layanan	534,000,000	444,178,600	83.18%
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	12	PAKET	3,435,468,000	1,827,214,216	53.19%
4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS-29)	12	Paket	3,435,468,000	1,827,214,216	53.19%
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	25	Orang	236,419,000	36,325,764	15.36%
4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	25	Orang	236,419,000	36,325,764	15.36%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
WA	Program Dukungan Manajemen			26,699,602,000	25,005,236,518	93.65%
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			26,699,602,000	25,005,236,518	93.65%
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	47	Layanan	26,259,325,000	24,918,981,823	94.90%
4815.EBA.956	Layanan BMN	6	Layanan	50,090,000	-	0.00%
4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	12	Layanan	15,950,000	-	0.00%
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	30,562,000	5,983,305	19.58%
4815.EBA.962	Layanan Umum	8	Layanan	106,063,000	4,652,389	4.39%
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	17,660,000	3,690,000	20.89%
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	26,039,000,000	24,904,656,129	95.64%
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	9	Orang	39,840,000	6,512,525	16.35%
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	9	Orang	25,940,000	6,512,525	25.11%
4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	13,900,000	-	0.00%
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	48	Dokumen	400,437,000	79,742,170	19.91%
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13	Dokumen	158,407,000	21,541,350	13.60%
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14	Dokumen	95,650,000	35,955,120	37.59%
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	14	Dokumen	104,086,000	22,245,700	21.37%
4815.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	5	Dokumen	35,382,000	-	0.00%
4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2	Dokumen	6,912,000	-	0.00%

Tabel III.32 Realisasi Anggaran Pagu Efektif berdasarkan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO) Kegiatan
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
BBKK Makassar				28,547,005,000	28,509,882,760	99.87%
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			3,511,105,000	3,504,646,242	99.82%
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			3,511,105,000	3,504,646,242	99.82%
4249.PEA	Koordinasi[Base Line]	17	kegiatan	8,110,000	8,110,000	100%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
4249.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	17	kegiatan	8,110,000	8,110,000	100%
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1802	layanan	1,637,269,000	1,632,996,262	99.74%
4249.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan (HS-29)	10	layanan	91,190,000	90,826,140	99.60%
4249.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	67	layanan	401,717,000	399,930,522	99.56%
4249.QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)	240	layanan	61,200,000	60,860,000	99.44%
4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	104	layanan	5,574,000	4,841,000	86.85%
4249.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	138	layanan	5,610,000	5,610,000	100%
4249.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare (HS-29)	180	layanan	10,200,000	10,115,000	99.17%
4249.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	480	layanan	27,200,000	27,200,000	100%
4249.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria (HS-29)	54	layanan	15,300,000	15,300,000	100%
4249.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare (HS-29)	360	layanan	30,600,000	30,515,000	99.72%
4249.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS (HS-29)	35	layanan	1,984,000	1,516,000	76.41%
4249.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TBC (HS-29)	14	layanan	1,194,000	1,176,000	98.49%
4249.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (HS-29)	60	layanan	8,500,000	8,500,000	100%
4249.QAH.U25	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I (layanan)	30	layanan	532,700,000	532,428,000	99.95%
4249.QAH.U28	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I (layanan)	30	layanan	444,300,000	444,178,600	99.97%
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	12	PAKET	1,828,882,000	1,827,214,216	99.91%
4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS-29)	12	Paket	1,828,882,000	1,827,214,216	99.91%
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	25	Orang	36,844,000	36,325,764	98.59%
4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	25	Orang	36,844,000	36,325,764	98.59%
WA	Program Dukungan Manajemen			25,035,900,000	25,005,236,518	99.88%
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			25,035,900,000	25,005,236,518	99.88%

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	47	Layanan	24,948,658,000	24,918,981,823	99.88%
4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	5,994,000	5,983,305	99.82%
4815.EBA.962	Layanan Umum	8	Layanan	4,655,000	4,652,389	99.94%
4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	3,690,000	3,690,000	100%
4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	24,934,319,000	24,904,656,129	99.88%
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]	9	Orang	6,513,000	6,512,525	99.99%
4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	9	Orang	25,940,000	6,512,525	99.99%
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	48	Dokumen	80,729,000	79,742,170	98.78%
4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13	Dokumen	21,683,000	21,541,350	99.35%
4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14	Dokumen	36,189,000	35,955,120	99.35%
4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	14	Dokumen	22,857,000	22,245,700	97.33%

4. Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar

Realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2025.

Tabel III.33 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1	1,00	100,00%	1.145.171.000	1.142.040.759	99,73%
		2. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%	100%	100,00%	277.981.000	276.105.180	99,33%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.96	1,00	104,17%	222.227.000	222.960.323	100,33%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis	4. Nilai Kinerja Anggaran	85	99,54	117,11%	80.729.000	79.742.170	98,78%
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	99,16	110,18%	26.771.546.000	26.740.212.734	99,88%
		6. Kinerja Implementasi WBK Satker	81	88,99	109,86%	5.994.000	5.983.305	99,82%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi (Rp)	Capaian
						(Rp)		
	lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	90%	100,00%	111,11%	43.357.000	42.838.289	98,80%
		8. Persentase Realisasi Anggaran (Pagu Efektif)	96%	99,87%	104,03%	28.547.005.000	28.509.882.760	99,87%
		8. Persentase Realisasi Anggaran (Pagu keseluruhan)	96%	82,91%	86,36%	34.385.588.000	28.509.882.760	82,91%

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja berdasarkan Target kinerja BBKK Makassar tahun 2025 yang tertulis di dalam Perjanjian Kinerja Revisi Desember 2025 yang ditandatangani oleh Dirjen P2 dengan Kepala BBKK Makassar, dapat disimpulkan :

1. Terdapat 8 indikator dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2025, meliputi :
 - a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 1 realisasi 1 dengan nilai capaian 100%;
 - b. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan dengan target 100% realisasi 100% dengan nilai capaian 100%;
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target 0,96 realisasi 1 dengan nilai capaian 104,17%;
 - d. Nilai kinerja anggaran dengan target 85 realisasi 99,54 dengan nilai capaian 117,11%;
 - e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 90 realisasi 99,16 dengan nilai capaian 110,18%;
 - f. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 81 realisasi 88,99 dengan nilai capaian 109,86%;
 - g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 90% realisasi 100% dengan nilai capaian 111,11%, dan;
 - h. Persentase realisasi anggaran pagu efektif dengan target 96% realisasi 99,87% dengan nilai capaian 104,03%.

Persentase realisasi anggaran pagu keseluruhan dengan target 96% realisasi 82,91% dengan nilai capaian 86,36%.

Secara keseluruhan indikator mencapai target yang telah ditetapkan, dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,06% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif dan capaian rata-rata 104,85% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhan.

2. Selama kurun waktu tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025, BBKK Makassar memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar :
 - a. Tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar 101,69%;
 - b. Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 104,19%.
 - c. Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 107,08%.
 - d. Tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar 107,06% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif
 - e. Tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar 104,85% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhanRata-rata capaian kinerja tahunan paling rendah di tahun 2022 sebesar 101,69% dan tertinggi di Tahun 2024 sebesar 107,08%.
3. Perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 dengan BKK dengan klasifikasi yang sama yaitu BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Batam sebesar :
 - a. BBKK Makassar sebesar 107,06% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif;
BBKK Makassar sebesar 104,85% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhan;
 - b. BBKK Medan sebesar 106,68% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif;
BBKK Medan sebesar 103,79% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhan;
 - c. BBKK Surabaya sebesar 109,93% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif;
BBKK Surabaya sebesar 106,97% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhan;;
 - d. BBKK Batam sebesar 106,44% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif;
BBKK Batam sebesar 104,22% dengan IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhan;.Rata-rata capaian kinerja untuk IKK realisasi anggaran menggunakan pagu efektif paling rendah berada di BBKK Batam dan yang paling tinggi adalah capaian kinerja BBKK Surabaya.

Rata-rata capaian kinerja untuk IKK realisasi anggaran menggunakan pagu keseluruhan paling rendah berada di BBKK Medan dan yang paling tinggi adalah capaian kinerja BBKK Surabaya.

4. Peran sumber daya dalam mewujudkan realisasi kinerja sangatlah penting, dalam menganalisis efisiensi sumber daya diperoleh efisiensi dan nilai efisiensi untuk setiap indikator yaitu :
 - a. indikator 1 efisiensi 0,27% dan nilai efisiensi 50,68%;
 - b. indikator 2 efisiensi 0,67% dan nilai efisiensi 51,69%;
 - c. indikator 3 efisiensi 3,69% dan nilai efisiensi 59,22%;
 - d. indikator 4 efisiensi 15,65% dan nilai efisiensi 89,13%;
 - e. indikator 5 efisiensi 9,35% dan nilai efisiensi 73,36%;
 - f. indikator 6 efisiensi 9,14% dan nilai efisiensi 72,84%;
 - g. indikator 7 efisiensi 11,08% dan nilai efisiensi 77,69%;
 - h. indikator 8 efisiensi 4% dan nilai efisiensi 60%.

Efisiensi sumber daya terbesar terdapat pada indikator 4 sebesar 15,65% dan nilai efisiensi 89,13% hal ini dipengaruhi oleh nilai capaian indikator yang tinggi dibanding indikator lain, karena realisasi terlalu besar melampaui target yang ditentukan.

5. Anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator BBKK Makassar untuk tahun 2025 sebesar Rp. 28.509.882.760,- dari pagu anggaran efektif yang disediakan sebesar Rp. 28.547.005.000,-, sehingga realisasi menjadi 99,87% dengan capaian 104,03% karena target untuk tahun 2025 sebesar 96%.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator BBKK Makassar untuk tahun 2025 sebesar Rp. 28.509.882.760,- dari pagu anggaran keseluruhan yang disediakan sebesar Rp. 34.385.588.000,-, sehingga realisasi menjadi 82,91% dengan capaian 86,36% karena target untuk tahun 2025 sebesar 96%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas nilai IKPA pada indikator deviasi Halaman III DIPA yang belum mencapai hasil maksimal, satuan kerja akan melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan

anggaran melalui penerapan inovasi tracking Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

Inovasi ini dilakukan dengan mengubah pendekatan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA yang selama ini lebih berfokus pada waktu pencairan atau penarikan anggaran, menjadi perencanaan yang berbasis waktu pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci. Penyusunan RPD akan diselaraskan dengan jadwal riil pelaksanaan kegiatan, sehingga antara rencana anggaran dan realisasi kegiatan dapat berjalan secara lebih sinkron. Metode calendar tracking akan digunakan sebagai alat pemantauan, yaitu dengan memetakan setiap tahapan kegiatan ke dalam kalender pelaksanaan bulanan hingga mingguan. Melalui metode ini, satuan kerja dapat memantau secara lebih akurat kapan kegiatan harus dilaksanakan, kapan dokumen pendukung disiapkan, serta kapan anggaran harus direalisasikan.

Dengan adanya inovasi tracking berbasis kalender ini, diharapkan deviasi antara rencana dan realisasi pada Halaman III DIPA dapat diminimalkan, kualitas perencanaan anggaran semakin meningkat, serta nilai IKPA pada indikator deviasi dapat diperbaiki dan mencapai hasil yang optimal pada periode berikutnya.

PUSTAKA ACUAN

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan
- Peraturan MENPAN-RB RI** Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- Rencana Strategis (Renstra)** Kemenkes Tahun 2025-2029
- Rencana Aksi Program (RAP)** Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024
- Rencana Aksi Kegiatan (RAK)** BBKK Makassar Tahun 2025-2029, BBKK Makassar Januari 2025
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** BBKK Makassar tahun anggaran 2025
- Daftar Urut Kepangkatan (DUK)** BBKK Makassar, tahun 2025
- Laporan Keuangan** BBKK Makassar Semester I tahun 2025

PENYUSUN

Pengarah	:	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Penanggung Jawab	:	Kasubag Adum
Ketua	:	Arni Angriany Amir, ST
Anggota	:	Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes Andi Kudrat, SKM Nining Ayu Purnama, S.Kom Arfiani, SKM Amriana Amin, SE Saydaturrizky, AMd.Ak

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP 197603192006041001

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya Surveilans yang Adekuat	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Respon KLB/Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tata Laksana Kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi dan Respon Potensi KLB/Wabah serta Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan yang Berpotensi KLB/Wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Karantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Karantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1,00 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Capaian Tata Kelola Kemenkes yang Baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	81 Nilai
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	90 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	6.377.567.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26.413.364.000,00
TOTAL			32.790.931.000,00

Pihak Kedua

dr. Yulhi Pramono, MARS
NIP 197603192006041001

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

PK 2025 Revisi Desember 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Murti Utami, MPH, QGIA, QGCAE
Jabatan : Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, QGCAE
NIP 196605081992032003


/ dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP 196902192002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya Surveilans yang Adekuat	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Respon KLB/Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tata Laksana Kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi dan Respon Potensi KLB/Wabah serta Pengendalian Faktor Resiko Kesehatan yang Berpotensi KLB/Wabah	40 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1,00 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Capaian Tata Kelola Kemenkes yang Baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	81 Nilai
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	90 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	95 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	7.685.986.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26.699.602.000,00
TOTAL			34.385.588.000,00

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama



drg. Murti Utami, MPH, QGIA, QGCAE
NIP 196605081992032003

/ dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP 196902192002121003

SK Tim Pengelola SAKIP



Kementerian Kesehatan
BBKK Makassar

Jalan Bendera Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552
 (0411) 4834926
 <https://bbkkmakassar.com>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
 - b. bahwa untuk tercapainya point 1 tersebut di atas, salah satunya melalui peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**



- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar adalah :
- Melakukan koordinasi untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja;
 - Melakukan inventarisasi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan
Makassar,



Agus Jamaludin

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar Tentang Tim Pengelola
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Nomor : HK.02.03/C.IX.3/3869/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**


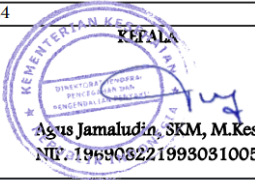
Pengarah	:	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Penanggung Jawab	:	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
Ketua	:	Arni Angriany Amir, ST
Sekretaris	:	Nining Ayu Purnama, S.Kom
Anggota	:	Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes Andi Kudrat, SKM Arfiani, SKM Amriana Amin, SE Saydaturrizky, AMd.Ak

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar,












Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

SOP Pengumpulan Data Kinerja


















<p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P</p>  <p>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</p>	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0403/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 14 November 2018
	REVISI	: Ke-3
	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196903221993031005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll	

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	KETUA TIM KERJA	PERENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan pengumpulan data kinerja					SK Tim Penyusun Lakip, Surat dan Disposisi	1 hari	Disposisi	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum						1 hari	Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja	
3	Mengisi form kinerja masing-masing Timker dan Subag Adum					Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja	3 hari	Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum					Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	1 hari	Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum	
5	Memverifikasi semua data kinerja untuk bahan final laporan kinerja bulanan					Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum diverifikasi	3 hari	Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi data kinerja ke Kasubag Adum					Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	30 menit		
7	Melakukan input data kinerja ke dalam format rekapitulasi bulanan					Data Kinerja	1 hari	File format data kinerja laporan bulanan	
8	Menyimpan data kinerja bulanan					File format data kinerja laporan bulanan	30 menit	Arsip file format data kinerja laporan bulanan	

SOP Pengukuran Kinerja

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P  BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0404/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 12 November 2018
	REVISI	: Ke-3
	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Agus Jarnaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	TIM PENYUSUN LKJ	PERENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja					SK Tim Penyusun LKJ, Surat dan Format	1 hari	Disposisi	
2	Mengolah data dan menganalisa data kinerja dari pengumpulan data kinerja ke dalam kertas kerja perhitungan kinerja					Disposisi dan data kinerja	1 hari	Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
3	Memeriksa dan melakukan koreksi hasil perhitungan kinerja					Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	3 hari	Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
4	Melakukan pengesahan atas kertas kerja perhitungan kinerja yang telah valid					Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah disahkan	
5	Menyusun hasil perhitungan kinerja ke dalam format laporan kinerja					Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah Format laporan kinerja	1 hari	Format laporan kinerja	
6	Memeriksa dan melakukan koreksi atas draft laporan kinerja					Draft Laporan Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja	
7	Mengesahkan draft laporan kinerja yang telah valid					Draft Laporan Kinerja	30 menit	Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan	
8	Penandatanganan Laporan kinerja oleh Kepala Balai					Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	
9	Penggandaan laporan kinerja dan pengiriman ke Eselon 1 via email atau Jasa Kirim					Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai terkirim ke Eselon 1 dan diarsipkan oleh Arsiparis	SOP Pengukuran Kinerja

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 – 2029 Januari 2025
Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1	1	1	1	1	1.714.661.000	1.800.394.050	1.890.413.753	1.984.934.440	2.084.181.162	Timker 1, 2, 3, dan 4
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	897.410.000	942.280.500	989.394.525	1.038.864.251	1.090.807.464	Timker 1, 2, 3, dan 4
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	1.391.898.000	1.461.492.900	1.534.567.545	1.611.295.922	1.691.860.718	Timker 1, 2, 3, dan 4
4	Nilai kinerja anggaran	85	85	86	87	88	350.493.000	368.017.650	386.418.533	405.739.459	426.026.432	Subag Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	91	92	93	28.147.798.000	29.555.187.900	31.032.947.295	32.584.594.660	34.213.824.393	Subag Adum
6	Kinerja implementasi WBK satker	81	81	81	81	81	32.302.000	33.917.100	35.612.955	37.393.603	39.263.283	Timker 5
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	92%	93%	94%	95%	248.719.000	261.154.950	274.212.698	287.923.332	302.319.499	Subag Adum
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%	32.790.931.000	34.430.477.550	36.152.001.428	37.959.601.499	39.857.581.574	Timker 1, 2, 3, 4, 5, dan Subag Adum
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%	7.650.000	8.032.500	8.434.125	8.855.831	9.298.623	Timker 1, 2, 3, 4, 5, dan Subag Adum

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Makassar Tahun 2025**

Penanggung Jawab Tim Kerja 1

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.8/0822/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 Tahun 2025

15 Januari 2026

Yth. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: PR.05.06/C.I/83/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Hal: Penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan) BBKK Makassar Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja 1
(Surveilans dan Penindakan Pelanggaran
Kekarantinaan Kesehatan)



H. Tjipto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NIP 197806212005011005

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal														
• Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)														
Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE ORANG YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
Bandara														
1. Jumlah Penumpang Pesawat Datang Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	385270	344785	350576	389905	339911	405313	431861	402890	382731	432374	430123	459861	4755600	Tim Kerja 1
2. Jumlah Penumpang Pesawat Berangkat Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	276453	233093	203363	282184	229699	254972	295544	265509	254437	275754	267789	262472	3101269	
3. Pemeriksaan Personil Pesawat (Kedatangan)	15146	13169	14012	15465	15071	16306	18215	16606	15612	17378	16914	17492	191386	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pelabuhan														
1. Jumlah Penumpang Kapal Datang Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	114975	97096	127479	154232	111466	145068	140450	111087	104409	111719	116178	129590	1463749	
2. Jumlah Penumpang Kapal Berangkat Khusus bagi yang Bisa Melakukan Pemeriksaan	130565	94819	103603	182720	101479	139260	139234	107042	98040	109326	102117	107787	1415992	
3. Pemeriksaan Awak Kapal (Kedatangan)	27162	23935	28221	28142	16412	27075	29772	28084	28155	30725	29742	29586	327011	


Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 1

H. Tubi Japto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
NID. 147806212005011005

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah serta Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, B

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2025												Jumlah	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Realisasi	
Definisi Operasional: Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dalam satu tahun														
Formula Perhitungan: Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%														
Target dan capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
Persentase Faktor Risiko pada Orang yang Dikendalikan														Timker 1
	Faktor Risiko Ditemukan													
Penumpang, Jamaah Haji dan Umroh Demam	5	4	3	9	5	36	10	14	6	18	6	590	706	
Hasil Skrining HIV Positif	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	8	
Hasil Skrining TB Positif	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
Hasil Skrining Malaria Positif	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
Penumpang dengan Antigen/PCR Positif Kasus Covid	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4	2	1	11	
Penumpang dengan Antigen/PCR Positif Kasus LI	8	3	1	0	0	24	14	14	1	8	3	3	79	
Penumpang dengan Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah	4	0	1	1	1	2	5	1	3	0	0	0	18	
Penumpang Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) atau Pertolongan Darurat	18	13	15	31	26	6	18	19	13	12	19	32	222	
Penumpang Hamil > 32 Minggu	0	1	0	0	1	1	1	4	3	0	1	0	12	
Penumpang Demam (Suhu > 37,5)	2	0	0	1	335	2	0	1	1	2	2	2	348	
Kontak Erat	11	0	0	3	0	46	27	0	0	0	2	4	93	
Jamaah Haji Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
Jamaah Haji / Umroh Belum Vaksin Meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buku ICV Palsu/Expired	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Faktor Risiko Dikendalikan														
Penumpang, Jamaah Haji dan Umroh Demam => Notifikasi	5	4	3	9	5	36	10	14	6	18	6	590	706	
Hasil Skrining HIV Positif (IMS) => Notifikasi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	8	
Hasil Skrining TB Positif => Notifikasi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
Hasil Skrining Malaria Positif => Notifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
Notifikasi Suspek Covid	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4	2	1	11	
Notifikasi Suspek Kasus ILI	8	3	1	0	0	24	14	14	1	8	3	3	79	
Penumpang dengan Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	4	0	1	1	1	2	5	1	3	0	0	0	18	
Penumpang Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) atau Pertolongan Darurat => SKTLT	18	13	15	31	26	6	18	19	13	12	19	32	222	
Penumpang Hamil > 32 Minggu => SKTLT	0	1	0	0	1	1	1	4	3	0	1	0	12	
Penumpang Demam (Suhu > 37,5) => SKTLT	2	0	0	1	335	2	0	1	1	2	2	2	348	
Kontak Erat Jamaah => Notifikasi	11	0	0	3	0	46	27	0	0	0	2	4	93	
Jamaah Haji Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu => Berita Acara Tidak Laik Terbang	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
Jamaah Haji / Umroh Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	

Makassar, Januari 2026
 Mengetahui,
 Ketua Tim Kerja 1

 H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
 Nip-197806212005011005

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 Tim Kerja 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan)
 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
 Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
 Indikator 3: Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal • Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Target dan capaian indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dihitung bulanan sesuai cara perhitungan														
Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 1
Berdasarkan Data Pengawasan Penumpang 2025 1 Penyelidikan Epidemiologi (PE) 2 Penumpang Meninggal di Pesawat (UMROH) 3 Penumpang, Jamaah Haji dan Umroh Demam => Notifikasi 4 Hasil Skrining HIV Positif (IMS) => Notifikasi 5 Hasil Skrining TB Positif => Notifikasi 6 Hasil Skrining Malaria Positif => Notifikasi 7 Penumpang dengan COVID Antigen/PCR Positif => Notifikasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	
	5	4	3	9	5	36	10	14	6	18	6	590	706	
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	8	
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4	2	1	11	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan		Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	pj
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
8	Penumpang dengan Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	4	0	1	1	1	2	5	1	3	0	0	0	18	
9	Penumpang Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) atau Pertolongan Darurat => SKTLT	18	13	15	31	26	6	18	19	13	12	19	32	222	
10	Penumpang Hamil > 32 Minggu => SKTLT	0	1	0	0	1	1	1	4	3	0	1	0	12	
11	Penumpang Demam (Suhu > 37,5) => SKTLT	2	0	0	1	335	2	0	1	1	2	2	2	348	
12	Kontak Erat Jamaah => Notifikasi	11	0	0	3	0	46	27	0	0	0	2	4	93	
13	Jamaah Haji Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu => Berita Acara Tidak Laik Terbang	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
14	Notifikasi ILI	8	3	1	0	0	24	14	14	1	8	3	3	79	
15	Notifikasi SSHP Kuning/Oren/Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14637	14637	

Makassar, Januari 2026
 Mengetahui,
 Ketua Tim Kerja 1



H. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
 NIB 497806212005011005



**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025**

Penanggung Jawab Tim Kerja 2

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.9/0823/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 2 Tahun 2025

15 Januari 2026

Yth. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: PR.05.06/C.II/83/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Hal: Penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang) BBKK Makassar Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja 2
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat
Angkut dan Barang)



Hj. Nur Magfirah, SKM, M.Kes
NIP 197409162005012001

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang)
Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	pj
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal														
• Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)														
Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE ALAT ANGKUT YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
Bandara														
Jumlah General Declaration (Gendec) Terverifikasi (Ttd/Stempel)	82	75	83	68	92	79	103	108	91	88	89	92	1050	Tim Kerja 2
Pelabuhan														
Jumlah COP	21	10	19	17	20	24	17	24	22	23	20	31	248	
Jumlah PHQC	1448	1335	1424	1466	1480	1507	1641	1631	1622	1711	1625	1660	18550	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
PERSENTASE BARANG YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR														
Bandara														
Surat Izin Angkut Jenazah	69	48	49	61	61	50	69	63	61	66	67	66	730	
Pelabuhan														
Surat Izin Angkut Jenazah	13	8	4	8	13	6	11	3	8	9	9	11	103	

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 2

Nur Mulyah, SKM, M.Kes
NIP. 197309162005012001

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 2: Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dalam satu tahun Formula Perhitungan: Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100% Target dan capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan. Persentase Faktor Risiko pada Alat Angkut yang Dikendalikan														
Faktor Risiko Ditemukan	3	3	6	3	7	4	1	3	4	3	5	4	46	Tim Kerja 2
Ditemukan Vektor Kecoa pada Alat Angkut													0	
Ditemukan Vektor Tikus pada Alat Angkut													0	
Ditemukan Vektor Lalat pada Alat Angkut													0	
Ditemukan Vektor Nyamuk pada Alat Angkut													0	
Ada Penumpang Positif													0	
Vektor, Air Terkontaminasi, dan Kotak P3K	3	3	6	3	7	4	1	3	4	3	5	4	46	
Faktor Risiko Dikendalikan	3	3	6	3	7	4	1	3	4	3	5	4	46	
SSCC	3	3	6	3	7	4	1	3	4	3	5	4	46	
(Desinfeksi, Desinfeksi, Dekontaminasi, Deratasi)													0	
Surat Bebas Karantina Kapal													0	
Laporan Desinfeksi Pesawat													0	
One Month Extension													0	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Jumlah Faktor Risiko pada Barang yang Dikendalikan														
Faktor Risiko Ditemukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jenazah Penyakit Menular & Potensial Wabah Meningitis, Covid-19, TB (Berdasarkan Rekapitulasi Nasional Surat Izin Angkut Jenazah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Faktor Risiko Dikendalikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jenazah Tidak Diberangkatkan atau Tunda Keberangkatan sampai Dokumen Lengkap (Surat Izin Angkut Jenazah Penyakit Menular & Potensial Wabah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 2

Nur Muflihah, SKM, M.Kes
NIP. 197409162005012001

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025**

Penanggung Jawab Tim Kerja 3

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.10/0824/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 Tahun 2025

15 Januari 2026

Yth. Kepala Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan
Makassar

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: PR.05.06/C.II/83/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Hal: Penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) BBKK Makassar Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja 3
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan
Lingkungan)



Abdul Rahman Mustafa, SKM
NIP 198006272009121002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email bbkkmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

[illegible]

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Survei Anopheles (Jumlah Habitat)														
Bandara Hasanuddin	20	20	20	11	10	10	8	6	10	10	17	8	150	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	13	10	13	10	10	10	15	11	11	11	11	11	136	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Tikus (Jumlah Perangkap)														
Bandara Hasanuddin	400	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	2800	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	400	400	0	400	0	400	200	0	200	200	200	0	2400	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Lalat (Jumlah Bangunan Disurvei)														
Bandara Hasanuddin	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	71	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	5	1	0	0	4	4	1	2	4	4	4	4	33	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Kecoa (Jumlah Bangunan Disurvei)														
Bandara Hasanuddin	18	6	20	4	6	8	8	13	22	9	18	10	142	
Bandara Tampa Padang & Pos Pelabuhan Mamuju	1	3	5	1	1	1	1	1	5	1	4	4	28	
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Pelabuhan</u>														
Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TTU	24	22	22	20	20	20	22	20	20	20	20	20	250	
Form Inspeksi Hygiene & Sanitasi TPP	50	49	51	51	51	48	43	42	45	42	43	46	561	
Form Inspeksi Sarana PAB	18	18	15	15	15	15	16	16	15	15	15	15	188	
Rekapitulasi Hasil Survei Vektor														
Survei Aedes Aegypti (Jumlah Kontainer)														
Wilker Pelabuhan Awerange	42	41	41	38	42	44	40	43	45	43	41	44	504	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	880	1000	0	1010	775	774	645	307	691	635	646	557	7920	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	180	7	183	10	10	10	10	10	10	10	10	10	460	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2460	
Wilker Pelabuhan Makassar	393	369	312	323	387	272	292	337	342	253	256	217	3753	
Wilker Pelabuhan Malili	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	145	125	127	115	118	150	185	184	180	126	113	104	1672	
Wilker Pelabuhan Parepare	250	250	240	230	230	240	227	243	225	215	205	205	2782	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	124	0	72	83	75	82	103	49	48	40	46	50	772	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	14	16	10	8	4	7	9	9	5	4	3	2	91	
Pos Pelabuhan Paotere	158	172	163	168	139	162	166	154	127	135	180	175	1899	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	72	69	66	70	70	68	71	35	35	35	35	35	697	
Pos Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	34	30	30	34	32	30	32	30	30	30	29	32	373	
Survei Anopheles (Jumlah Habitat)														
Wilker Pelabuhan Awerange	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	44	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	21	21	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	231	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27	
Pos Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	8	10	7	7	7	7	7	6	6	6	7	5	83	
Pos Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Survei Tikus (Jumlah Perangkap)														
Wilker Pelabuhan Awerange	400	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	0	2800	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	400	400	400	400	400	400	0	400	0	400	0	400	3600	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	400	0	400	0	400	0	80	0	0	0	0	0	1280	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	400	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	400	3200	
Wilker Pelabuhan Makassar	400	400	0	400	0	400	0	400	400	0	400	0	2800	
Wilker Pelabuhan Malili	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	0	2800	
Wilker Pelabuhan Parepare	400	400	0	0	400	400	0	400	0	400	0	0	2400	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	400	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	600	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	400	400	0	400	400	400	0	400	0	400	0	400	3600	
Pos Pelabuhan Paotere	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	400	400	3200	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	400	400	0	400	0	400	0	400	400	0	0	400	2800	
Pos Pelabuhan Siwa	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	400	0	0	400	0	400	0	0	400	0	400	0	2000	
Survei Lalat (Jumlah Bangunan Survei)														
Wilker Pelabuhan Awerange	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Wilker Pelabuhan Makassar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
Wilker Pelabuhan Malili	20	0	10	10	10	12	12	0	0	0	0	0	74	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Wilker Pelabuhan Parepare	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	3	0	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	3	4	3	5	3	3	2	2	2	2	2	2	33	
Pos Pelabuhan Paotere	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
Pos Pelabuhan Pasangkayu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	59	
Pos Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	15	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Survei Kecoa (Jumlah Bangunan Survei)														
Wilker Pelabuhan Awerange	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	44	
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
Wilker Pelabuhan Biringkassi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Wilker Pelabuhan Makassar	20	12	12	12	13	12	15	15	12	12	10	10	155	
Wilker Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wilker Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Pos Pelabuhan Paotere	10	6	6	6	5	4	5	5	5	5	5	6	68	

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pos Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 3

Abdul Rahman Mustafa, SKM
NIP. 198006272009121002


Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan)
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 2: Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Jumlah Faktor Risiko Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	pj
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dalam satu tahun Formula Perhitungan: Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100% Target dan capaian dihitung bulanan sesuai cara perhitungan. Jumlah Faktor Risiko pada Lingkungan yang Dikendalikan														Tim Kerja 3
Faktor Risiko Ditemukan	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	
1. Hygiene & Sanitasi TTU (Suhu & Kelembaban, Fisik & Kimia Lingkungan) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Hygiene & Sanitasi TPP (Fisik, E Coli, MPN Coliform, ALT untuk Alat Usap Makan & Masak) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Inspeksi Sarana PAB (E Coli, MPN Coliform, Risiko Pencemaran Tinggi & Amat Tinggi) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pemeriksaan Kualitas Air (Lokus) yang Tidak Memenuhi Syarat/Indeks Tinggi:														
Pemeriksaan Fisik, Kimia, Bakteriologis yang Tidak Memenuhi Syarat														
- Pemeriksaan Fisik Tidak Memenuhi Syarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Pemeriksaan Kimia Tidak Memenuhi Syarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Pemeriksaan Bakteriologis Tidak Memenuhi Syarat	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	

[illegible]

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah	PJ	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Realisasi		
4 Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat ≤ 2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilker Pelabuhan Awerange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Makassar	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
Wilker Pelabuhan Malili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Parepare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Paotere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Siwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tana Toraja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	0.40	0.00	0.00	0.30	1.00	1.60	1.40	0.93	0.00	0.00	0.00	0.40			
5 Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter=0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3	
Wilker Pelabuhan Awerange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Makassar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Malili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Parepare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Paotere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Siwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tana Toraja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer ≤ 1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3	
Wilker Pelabuhan Awerange	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Biringkassi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Makassar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Malili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Definisi Operasional & Formula Perhitungan		Realisasi Per Bulan Tahun 2025											Jumlah Realisasi	PJ	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov			Des
Wilker Pelabuhan Parepare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Paotere		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Pasangkayu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Siwa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bandara Tana Toraja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7 Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan		0.00%	87.50%	95.83%	95.83%	95.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilayah Kerja / Pos															
Wilker Pelabuhan Awerange		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Biringkassi		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Wilker Pelabuhan Makassar		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Malili		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Wilker Pelabuhan Parepare		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Majene & Silopo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Paotere		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Pasangkayu		2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pos Pelabuhan Siwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju		0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1		
Bandara Tana Toraja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin		1	1	2	6	55	5	1	3	1	1	11	1		
8 Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilayah Kerja / Pos															
Wilker Pelabuhan Awerange		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wilker Pelabuhan Bajoe Bone		12	12	12	12	12	12	7	7	7	7	7	7		
Wilker Pelabuhan Belang Belang Mamuju		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Wilker Pelabuhan Biringkassi		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Wilker Pelabuhan Makassar		5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Wilker Pelabuhan Malili		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wilker Pelabuhan Palopo dan Bandara Lagaligo Bua		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Wilker Pelabuhan Parepare		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Pos Pelabuhan Bira Bulukumba		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pos Pelabuhan Maiene & Silopo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	pj
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pos Pelabuhan Paotere	4	4	7	7	7	4	4	3	6	3	4	7		
Pos Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pos Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pos Pelabuhan Perikanan Untia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bandara Tanpa Padang dan Pos Pelabuhan Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bandara Tana Toraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kantor Induk / Bandara Hasanuddin	6	4	6	6	44	4	7	5	18	5	8	8		
9 Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Timker 3
Wilayah Kerja / Pos														
Bandara Hasanuddin														
1. WTP		MS	TMS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	-	-	-		
2. GWT		MS	TMS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS	-	-		

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Tim Kerja 3

Abdul Rahman Mustafa, SKM
NIP. 198006272009121002



**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025**

Penanggung Jawab Tim kerja 4

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.11/0825/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 4 Tahun 2025

15 Januari 2026

Yth. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: PR.05.06/C.II/83/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Hal: Penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 4 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus) BBKK Makassar Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja 4
(Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang,
Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus)



dr. Ridha Ilahi
NIP. 196905012001122001

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator 1: Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.														
Formula Perhitungan: $Indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal • Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) • Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) • Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)														
Target dan capaian indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN dihitung bulanan sesuai cara perhitungan.														
PERSENTASE ORANG YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR 1. Kunjungan Poliklinik: (Keur, Vaksinasi) di Bandara 2. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Bandara 3. Kunjungan Poliklinik: (Keur, Vaksinasi) di Pelabuhan 4. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Pelabuhan	1727 0 3525 0	1192 0 3024 0	484 0 1403 0	1049 0 1127 0	324 45 1709 0	890 0 3371 0	1442 0 2777 0	984 0 1580 0	1272 0 2881 0	777 0 2394 0	596 0 1982 0	934 0 2540 0	11671 45 28313 0	Tim Kerja 4

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
<u>Masyarakat di Wilayah Pelabuhan & Bandara</u>														
1. Jumlah Skrining HIV	17	27	12	209	23	84	76	203	527	95	134	417	1824	
2. Jumlah Skrining TB	17	27	12	209	0	84	229	549	847	484	206	588	3252	
3. Jumlah Skrining Sifilis	17	27	12	189	0	28	0	210	0	0	129	142	754	
4. Jumlah Skrining Malaria	24	26	76	177	133	101	168	299	213	38	105	27	1387	
5. Jumlah Cek Kesehatan Gratis (CKG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4841	4841	

Makassar, Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 4



dr. Ridha Alahi
NIP. 9905012001122001

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar Tahun 2025**

Penanggung Jawab Tim Kerja 5

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.12/0826/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 5 Tahun 2025

15 Januari 2026

Yth. Kepala Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan
Makassar

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: PR.05.06/C.I/83/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Hal: Penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja 5 (Layanan Publik dan Zona Integritas) BBKK Makassar Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja 5
(Layanan Publik dan Zona Integritas)



Nirwan, SKM, M.Kes
NIP.197406251997031002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tim Kerja 5 (Layanan Publik dan Zona Integritas)
Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 6: Kinerja Implementasi WBK Satker

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
<p>Definisi Operasional: Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assessment) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.</p> <p>Formula Perhitungan: Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil. Target dan capaian dihitung secara bulanan.</p> <p>Sumber data: 1 Hasil self assessment Satker 2 Hasil SIPINAL 3 Hasil assessment Itjen 4 Hasil assessment Bagian Hukomas</p> <p>Keterangan 1 Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker diambil berdasarkan Surat Inspektur Investigasi Kemenkes, Tanggal 13 Agustus 2024, Nomor PS.08.02/G.VI/727/2024, Hal: Surat Pemberitahuan Hasil Self Assessment Menuju WBK/WBBM Nasional Tahun 2025 bahwa BBKK Makassar Memenuhi syarat minimal WBK dan Diusulkan Menuju WBK Nasional ke Kemenpan RB dengan Nilai 86,94 2 Berdasarkan Berita Acara Hasil Desk Reviu Kinerja Implementasi WBK Tahun 2025 oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Risiko Reformasi Birokrasi dan Monev selaku Tim Penilai Internal, pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan total nilai 88,99</p>														
Nilai	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	88.99	88.99	88.99	88.99	Timker 5

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 5

Bawani, SKM, M.Kes
197406251997031 002




BERITA ACARA HASIL DESK REVIU KINERJA IMPLEMENTASI WBK TAHUN 2025

Pada hari ini Senin, Tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2025 telah dilaksanakan desk reviu Kinerja "Implementasi WBK Satker" berikut ini:

Nama Satuan Kerja: : Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar

Adapun hasil reviu disimpulkan sebagai berikut:

No.	MATERI	NILAI MAKSIMAL	NILAI PEROLEHAN	%	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	60.00	54.09	90.14	
A.	Aspek Pemenuhan	30.00	26.38	87.93	
1	Manajemen Perubahan	4.00	3.77	94.16	
2	Penataan Tataaksana	3.50	2.29	65.48	
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5.00	4.59	91.72	
4	Penguatan Akuntabilitas	5.00	5.00	100.00	
5	Penguatan Pengawasan	7.50	5.73	76.46	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	5.00	100.00	
B.	Aspek Reform	30.00	27.71	92.36	
1	Manajemen Perubahan	4.00	3.58	89.58	
2	Penataan Tataaksana	3.50	3.00	85.71	
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5.00	4.25	85.00	
4	Penguatan Akuntabilitas	5.00	5.00	100.00	
5	Penguatan Pengawasan	7.50	6.88	91.67	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.00	5.00	100.00	
II	KOMPONEN HASIL	40.00	34.90	87.25	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22.50	20.07	89.19	
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.50	16.32	93.25	
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	3.75	75.00	
2.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50	14.83	84.75	
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17.50	14.83	84.75	
TOTAL NILAI		100.00	88.99	88.99	
Ketua Tim ZI WBK Satuan Kerja,				Petugas Desk Eselon 1 Ditjen P2,	
					
Nirwan, SKM, M.Kes				Elfi Rahmi	
NIP 197406251997031002				NIP. 198309272015032001	
		Mengetahui,			
Kepala BBKK Makassar,				Ketua Tim Kerja Manajemen Risiko Reformasi Birokrasi dan Monev,	
dr. Achmad Farchanny Tri Adyanto, MKM				Indra Jaya, SKM, M. Epid	
NIP 196902192002121003				NIP 197509122000031001	

**Kertas Kerja Perhitungan Kinerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025**

Penanggung Jawab Sub Bagian Administrasi Umum

Nomor : PR.05.06/C.IX.3.1/0827/2026
Lampiran : satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Subbag Adum Tahun 2025

15 Januari 2026

Yth. Kepala Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan
Makassar

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor: PR.05.06/C.I/83/2026 Tanggal 15 Januari 2026, Hal: Penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Sub Bagian Administrasi Umum BBKK Makassar Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Yusrianto, SKM

NIP 197208112000031005

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kemdigi.go.id/verifyPDE>.

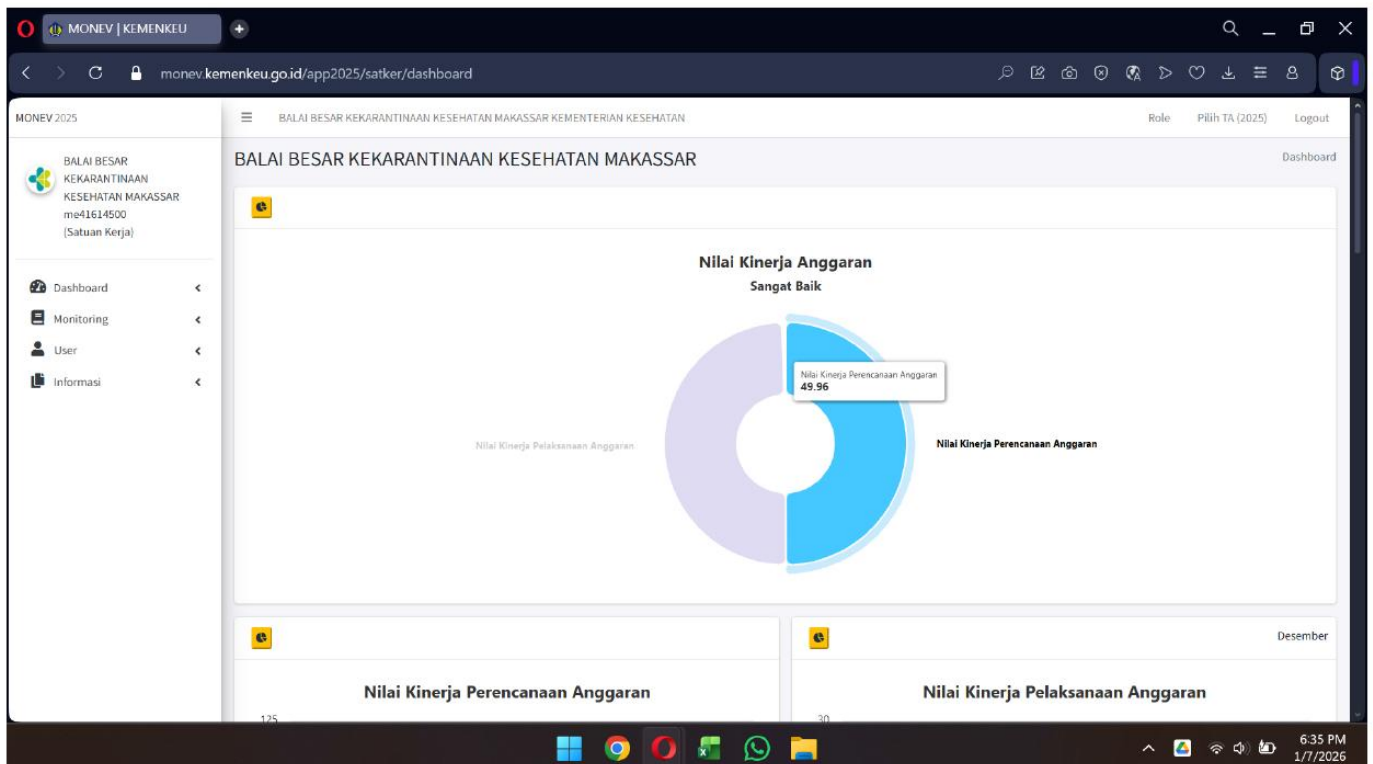
Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

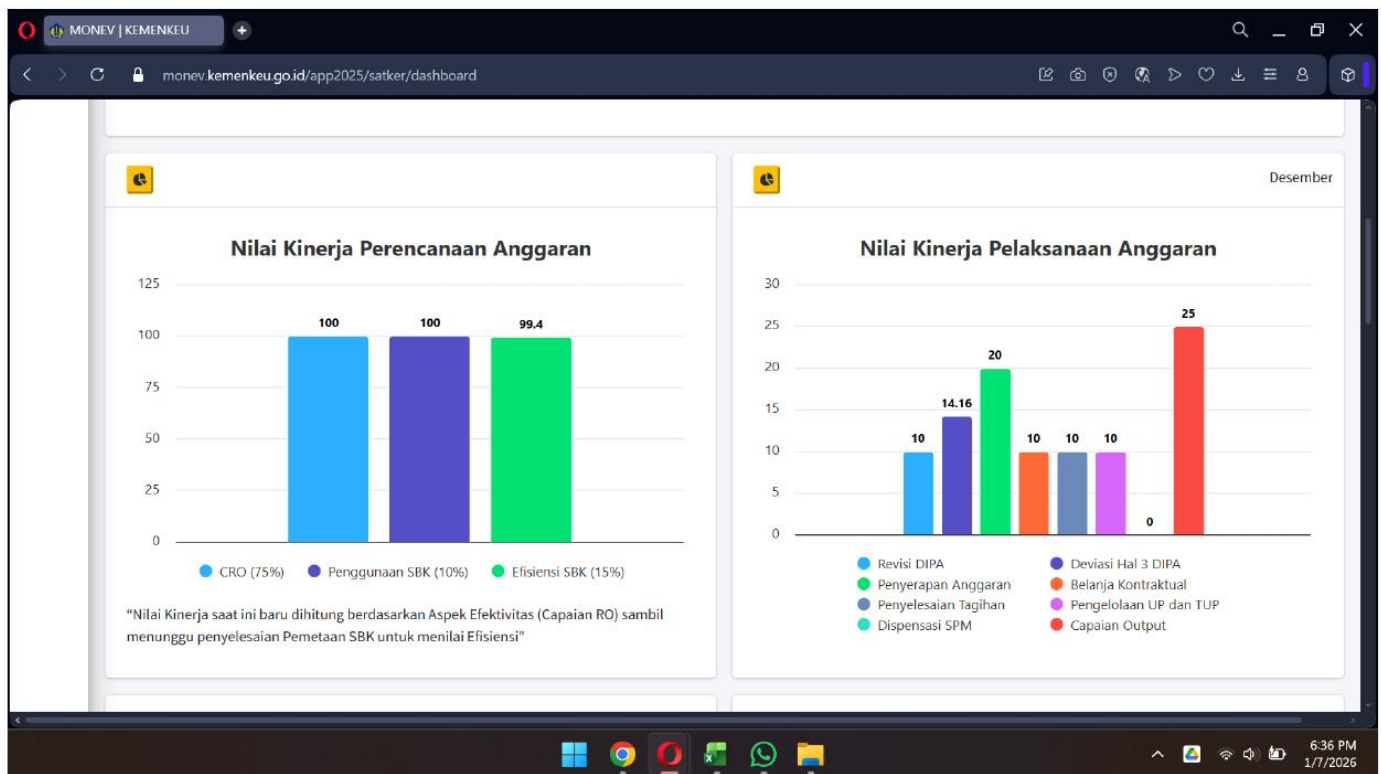
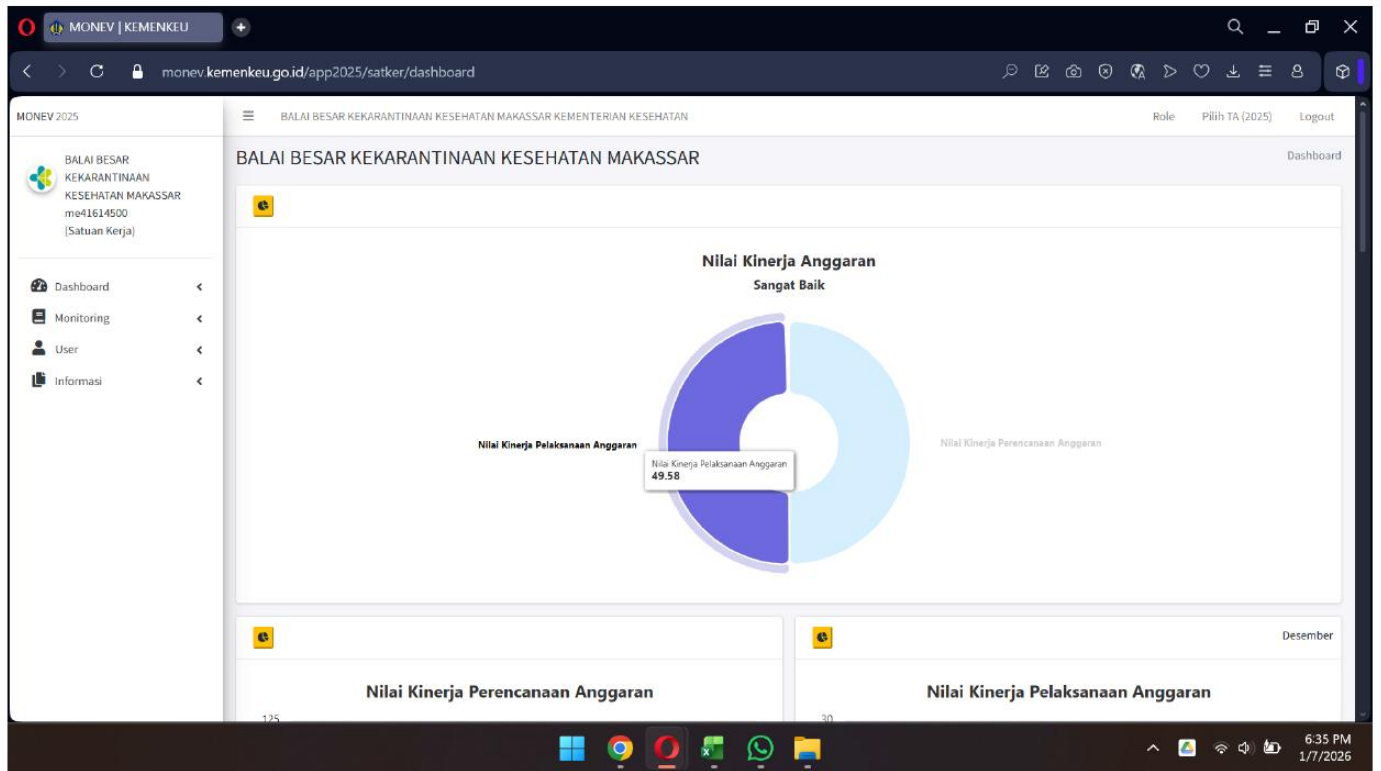
Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 4: Nilai Kinerja Anggaran

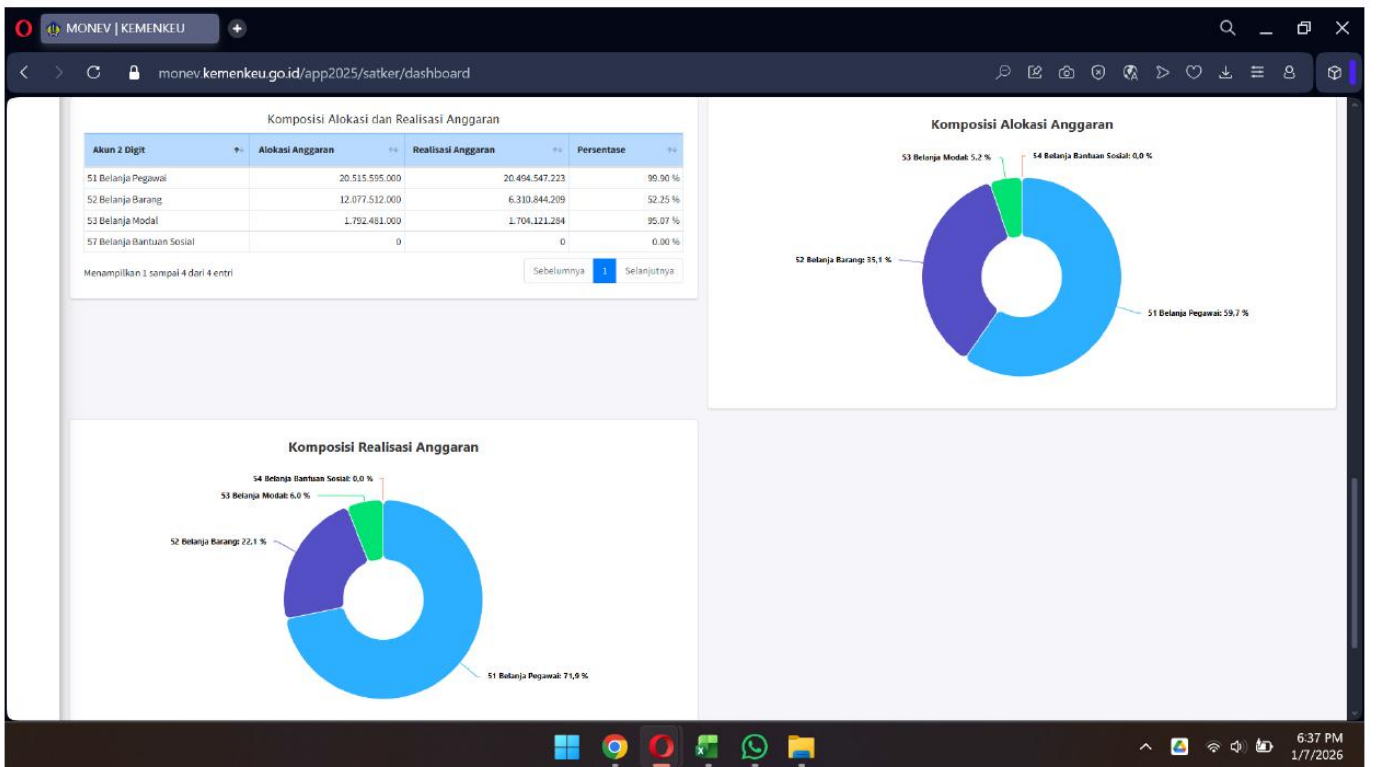
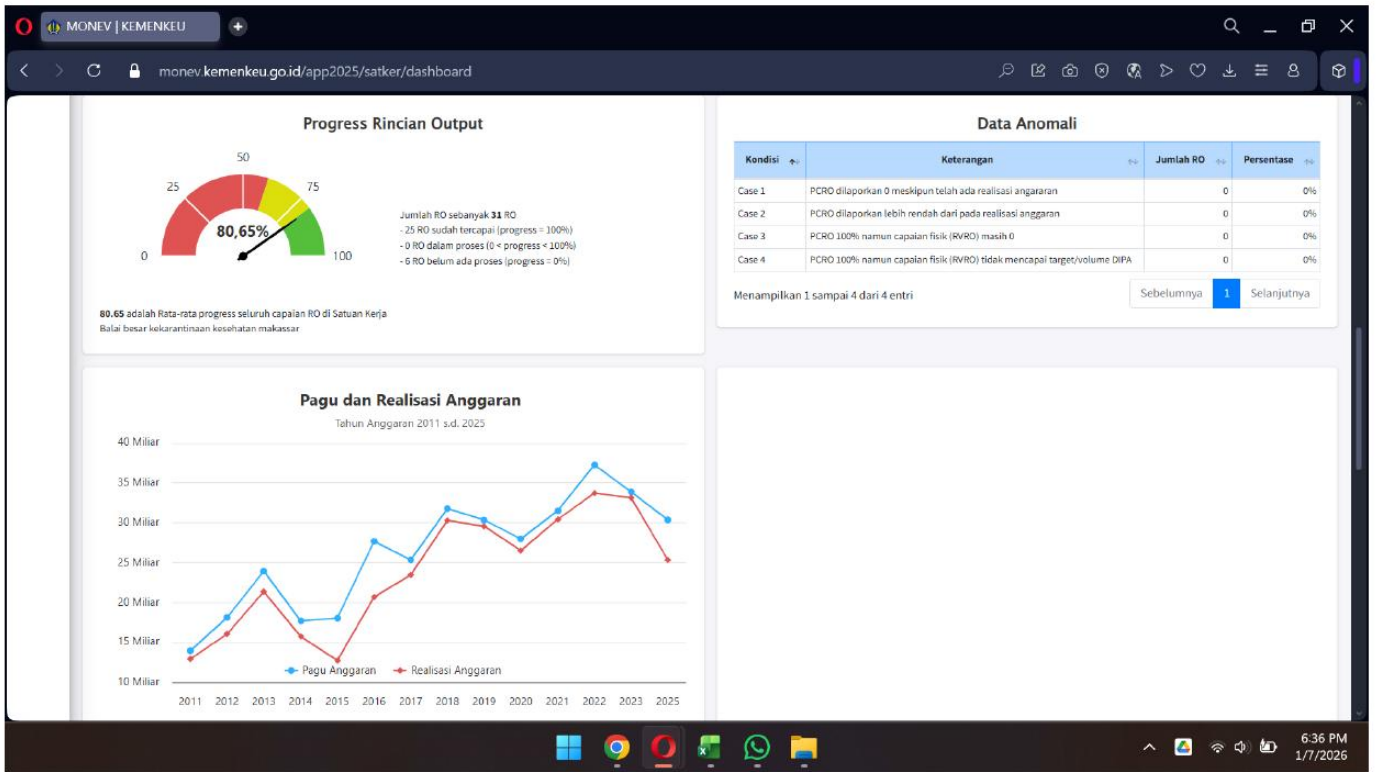
Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
<p>Definisi Operasional: Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada <i>dashboard</i> aplikasi SMART Kemenkeu RI</p> <p>1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu: Capaian Realisasi Output dengan bobot sebesar 75%, Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%, dan Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10%.</p> <p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa indikator, yaitu: Revisi DIPA dengan bobot sebesar 10%, Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot sebesar 15%, Penyerapan Anggaran dengan bobot sebesar 20%, Belanja Kontraktual dengan bobot sebesar 10%, Penyelesaian Tagihan dengan bobot sebesar 10%, Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, Capaian Output dengan bobot sebesar 25%, dan Dispensasi SPM (sebagai pengurang).</p> <p>Formula Perhitungan: Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Target dan capaian dihitung secara kumulatif.</p>														
Nilai	50.00	50.00	50.00	48.34	56.54	57.26	60.30	62.50	66.05	66.76	89.73	99.54	99.54	Subag Adum

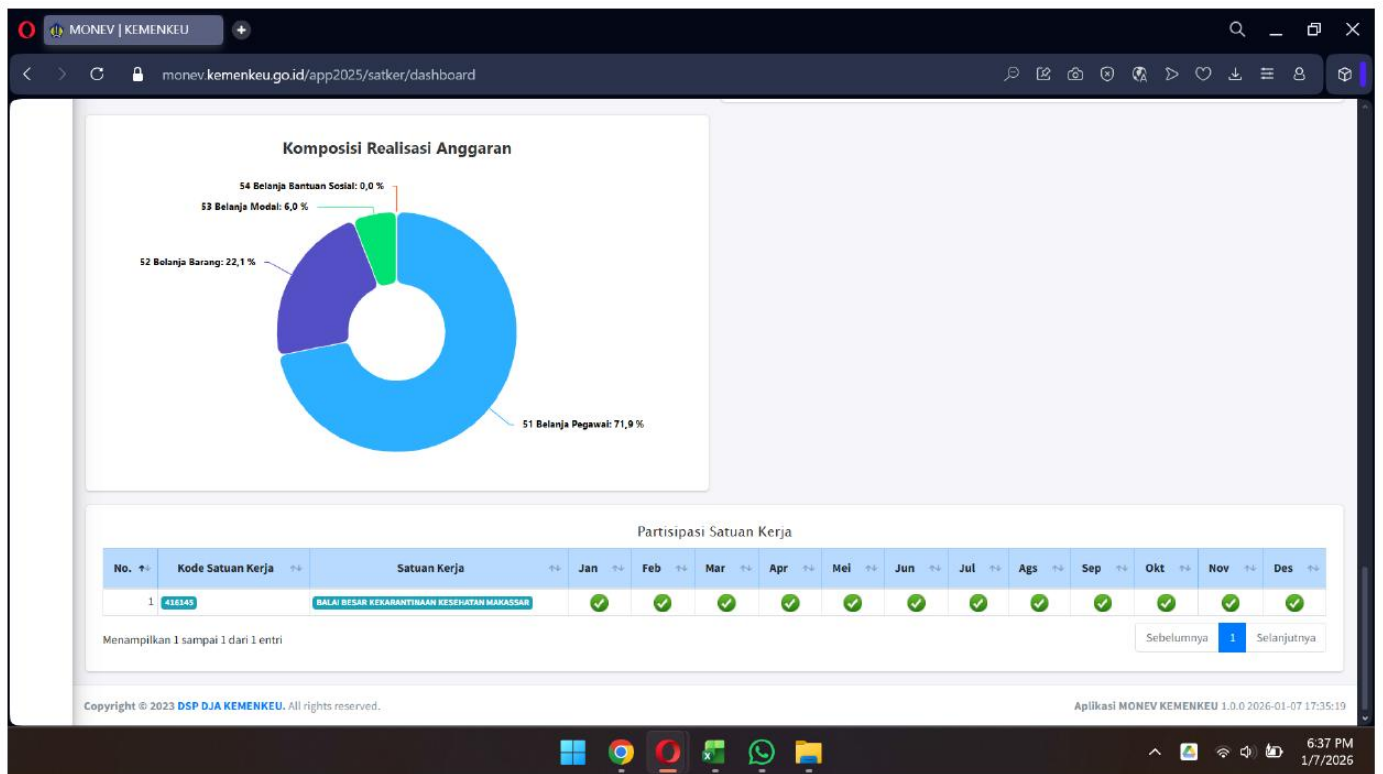
Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum

Yusrianto, SKM
NIP.197208112000031005









MONEV BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR KEMENTERIAN KESEHATAN Role: Pilih TA (2025) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	024.05.416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	99,91	100,00	100,00	99,40

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-01-07 17:37:35

MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nilaiikpasatker

RolePilih TA (2025)Logout

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN MAJIS

Desember

Tampilkan

Download PDFDownload Excel

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	Desember	136	024	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nilai	100,00	94,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,16	100%	0,00	99,16	
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
						Nilai Akhir	10,00	14,16	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00					
						Nilai Aspek	97,22			100,00			100,00					

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-01-07 17:37:50

MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatkergabungan

RolePilih TA (2025)Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	024.05.416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	99,91	99,16	99,54

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-01-07 17:38:08

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.														
Formula Perhitungan: Nilai agregat dari 8 parameter perhitungan Nilai IKPA yakni: 1. Revisi DIPA 2. Revisi Hal III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output														
Target dan capaian dihitung secara kumulatif.														
Nilai	100.00	100.00	100.00	88.13	95.72	97.16	97.79	98.76	98.94	97.79	98.46	99.16	99.16	Subag Adum

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum


 Yusrianto, SKM
 NIP. 197208112000031005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	136	024	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nilai	100.00	94.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.16	100%	0.00	99.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.22			100.00			100.00				

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 7: Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum


Yusianto, SKM
NIP.197208112000031005



[illegible]

[illegible]

Kertas Kerja Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Sub Bagian Administrasi Umum
Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar
Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator 8: Persentase Realisasi Anggaran

Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Realisasi Per Bulan Tahun 2025												Jumlah Realisasi	PJ
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Definisi Operasional: Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran. Formula Perhitungan: Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%. Target dan capaian dihitung secara kumulatif														
Persentase	2.15%	5.66%	19.30%	24.67%	30.23%	41.72%	48.86%	54.81%	59.30%	64.64%	72.11%	82.91%	82.91%	Subag Adum

Makassar, Januari 2026
Mengetahui,
Kepala Subbag Administrasi Umum

Yusianto, SKM
NIP. 197208112000031005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	024-416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	PAGU REALISASI PERSENTASE	20,515,595,000 20,494,547,223 (99.90%)	12,077,512,000 6,310,844,209 (52.25%)	1,792,481,000 1,704,121,284 (95.07%)	0	0	0	0	0	0	34,385,588,000 28,509,512,716 (82.91%)	
				SISA	21,047,777	5,766,667,791	88,359,716	0	0	0	0	0	0	5,876,075,284	
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	20,515,595,000 20,494,547,223 (99.90%)	12,077,512,000 6,310,844,209 (52.25%)	1,792,481,000 1,704,121,284 (95.07%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	34,385,588,000 28,509,512,716 (82.91%)	
				SISA	21,047,777	5,766,667,791	88,359,716	0	0	0	0	0	0	5,876,075,284	

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)